



UNIVERSITAS INDONESIA

**RESPON TAIWAN TERHADAP PENINGKATAN
KAPABILITAS MILITER CHINA PADA MASA PEMERINTAHAN
PRESIDEN CHEN SHUI-BIAN (2000-2008)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar M.Si

FAUZAN HISYAM

0906501081

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
JAKARTA
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Fauzan Hisyam

NPM : 0906501081

Tanda tangan :



Tanggal : 12 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Fauzan Hisyam
NPM : 0906501081
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul Tesis : Respon Taiwan Terhadap Peningkatan Kapabilitas Militer China Pada Masa Pemerintahan Presiden Chen-Shui Bian (2000-2008)

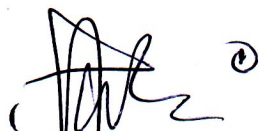
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : DR. Tirta N. Mursitama

()

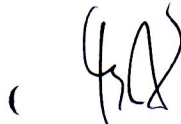
Sekretaris Sidang : Asra Virgianita, MA

()

Penguji Ahli : Andi Widjajanto, MS, M.Sc

()

Pembimbing : Broto Wardoyo, MA

()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Juli 2011

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Broto Wardoyo, M.A, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Dewan Penguji tesis: Andi Widjajanto, MS., M.Sc selaku penguji ahli; DR. Tirta N. Mursitama selaku ketua sidang, dan Asra Virgianita, MA selaku sekretaris sidang yang telah meluruskan tesis saya pada Rabu, 22 Juni 2011;
- (3) Istri, orangtua, adik dan keluarga besar saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
- (4) Sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan kuliah dan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 12 Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauzan Hisyam
NPM : 0906501081
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional
Departemen : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Respon Taiwan Terhadap Peningkatan Kapabilitas Militer China Pada Masa Pemerintahan Presiden Chen Shui-bian (2000-2008)** beserta perangkat yang ada (jika ada). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta

Pada tanggal: 12 Juli 2011

Yang menyatakan:



(Fauzan Hisyam)

ABSTRAK

Nama : Fauzan Hisyam
Program Studi : Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional
Judul : **Respon Taiwan Terhadap Peningkatan Kapabilitas Militer China Pada Masa Pemerintahan Presiden Chen Shui-bian (2000-2008)**

Tesis ini membahas tentang ironi respon Taiwan di bawah Pemerintahan Presiden Chen Shui-bian pada 2000-2008, terhadap dampak peningkatan kapabilitas militer China. Pada periode tersebut, strategi militer China bertransformasi menjadi menyerang, namun Taiwan justru tidak meningkatkan, dan bahkan menurunkan, kapabilitas militernya. Dalam penelitian kualitatif dengan disain deskriptif ini, penyusun menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi respon Taiwan terhadap kpeningkatan kapabilitas militer China di tengah-tengah dilema keamanan yang mereka alami. Akhirnya, penyusun menyarankan China dan Taiwan untuk menggalang kerjasama melalui forum resmi atau tidak resmi, demi mencegah meletusnya konflik terbuka di sekitar Selat Taiwan.

Kata kunci:

Kapabilitas militer, postur keamanan, dilema keamanan, kebijakan pertahanan.

ABSTRACT

Name : Fauzan Hisyam
Study Program : Postgraduate Program of International Relations
Title : **Taiwan's Respond Towards China's Military Capability Building In The Governanace of President Chen Shui-bian (2000-2008)**

This Thesis is about the ironic of Taiwan's respond in the period of President Chen Shui-bian (2000-2008) towards the China's military capability building. In that period of time, China's military strategy transform into attacking format, while Taiwan tend not to increasing it's military capability, but seem to *down-grading* it's military capability. In this qualitative research along with description design, writers will explain some factors that influencing Taiwan's respond towards China's military capability building in the middle of security dilemma among them. At the end, writers suggests that China and Taiwan must cooperate through both official or un-official organization, in order to avoid warfare at the Taiwan Strait.

Key words:

Military capability, security posture, security dilemma, defence policy.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
I. 1 Latar Belakang Masalah	1
I. 2 Perumusan Masalah	7
I. 3 Tujuan Penelitian	9
I. 4 Signifikansi Penelitian	10
I. 5 Kerangka Teori	10
I. 6 Model Analisis	17
I. 7 Hipotesa	18
I. 8 Metodologi Penelitian	18
I. 9 Sistematika Penulisan	19
BAB II PENINGKATAN KAPABILITAS MILITER CHINA	22
II. 1 Gambaran Umum China	22
II. 2 Kemajuan Ekonomi China	24
II. 3 Kapabilitas Militer China	27
II. 4 Peningkatan Kapabilitas Militer China	33
II. 5 Alasan China Meningkatkan Kapabilitas Militer	39
II. 6 Perubahan Doktrin Militer China	41
II. 7 Strategi Militer China.....	42
II. 8 Strategi Induk (<i>Grand Strategy</i>) Peningkatan Kapabilitas Militer China	45
II. 9 Sejarah Konflik Selat Taiwan	48
II. 10 China Dalam Konflik Selat Taiwan	50
II. 11 Respon Taiwan Terhadap Peningkatan Kapabilitas Militer China	57
BAB III KEBIJAKAN PERTAHANAN TAIWAN	63
III. 1 Sekilas Tentang Taiwan	63

III. 2 Kekuatan Militer Taiwan	66
III. 3 Kebijakan Reformasi Pertahanan Taiwan	70
III. 4 Antisipasi Taiwan Terhadap Strategi China	81
III. 5 Formulasi, dan Implementasi Kebijakan Pertahanan Taiwan	87
III. 6 Peluang Penyatuan Kembali Taiwan Dengan China	94
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	98
DAFTAR REFERENSI	102



DAFTAR GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL

Gambar I Model Analisis	18
Gambar III. 1 Alur Formulasi Kebijakan Pertahanan Taiwan	88
Gambar III. 2 Struktur Pihak-Pihak Berwenang Dalam Penentuan Kebijakan Pertahanan Taiwan	90
Grafik I Anggaran Pertahanan China Periode 2000-2008	2
Tabel I. 1 Jumlah Personil Tentara China 2010	3
Tabel I. 2 Jumlah Senjata Matra Angkatan Darat China	3
Tabel I. 3 Jumlah Senjata Matra Angkatan Laut China	3
Tabel I. 4 Jumlah Senjata Matra Angkatan Udara China	4
Tabel I. 5 Peta Kemungkinan Terjadinya Dilema Keamanan (Robert Jervis)	17
Tabel II. 1 Total Anggaran Belanja Pertahanan China dan Perkiraan Lembaga Intelejen Pertahanan Amerika Serikat (DIA)	29
Tabel II. 2 Evolusi Doktrin & Strategi TPR China Richard D. Fisher Jr	45
Tabel IV Konsep Dilema Keamanan Robert Jervis	98

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang Masalah

Memasuki abad ke-21, China terus berkembang menjadi salah satu kekuatan dunia. Status sebagai negara adidaya pun semakin mendekati negara dengan populasi terbanyak di dunia ini. Sejumlah ahli bahkan memperkirakan China akan menjadi kekuatan utama dunia menggeser Amerika Serikat¹. Penyebabnya tidak hanya pertumbuhan ekonominya yang mencapai rata-rata 9-10 persen per tahun (terutama pada dekade 1990-an), tetapi juga karena kekuatan militernya². Perdana Menteri (PM) China saat itu, Wen Jiabao, mengungkapkan, peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negaranya ketika menyampaikan laporan kinerja pemerintah selama lima tahun terakhir dalam pidato sesi pertama Kongres Rakyat Nasional (NPC) ke-11 di Gedung Balai Agung Rakyat, Beijing, pada 6 Maret 2008. PDB China antara 2002 sampai 2007 meningkat 65,5 persen atau senilai 3,74 triliun dollar Amerika Serikat (selanjutnya disebut dollar AS), sedangkan total pendapatan pemerintah selama periode itu juga meningkat 171 persen, yakni mencapai sekitar 777 miliar dollar AS³.

Sebuah lembaga survei bernama Dow Jones Newswires melaporkan, data pertumbuhan ekonomi pada 2010, PDB China meningkat 10,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yakni mencapai 5,98 trilyun dollar AS⁴. Data dari Standard & Poor's menyebutkan, pencapaian tersebut menjadikan China menduduki peringkat ke-2 dunia sebagai negara berpendapatan terbesar di bawah

1 Jose Miguel Alonso Trabanco, *The Great Dragon Awakens: China Challenges American Hegemony*, dalam Jurnal *Centre for Research on Globalization*, edisi 2 Februari 2009, <http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=11638>., paragraf 2, (diakses pada 21 November 2010).

2 Simela Victor Muhamad, *Pengembangan Kekuatan Militer China Dan Dampaknya Terhadap Kawasan Asia Timur*, dalam Jurnal *Kajian*, volume 14 nomor 3, 2009, hal. 407.

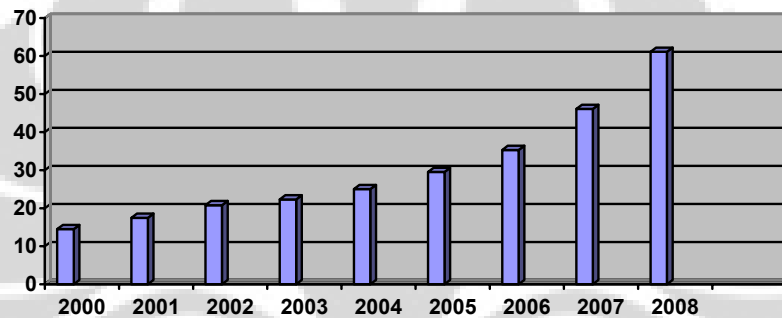
3 Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi China Capai 10%, <http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/03/06/213/89403/rata-rata-pertumbuhan-ekonomi-china-capai-10-6>., 2008, paragraf 4, (diakses pada 17 Februari 2011).

4 Pertumbuhan Ekonomi China Dilaporkan 10,1%, dalam *China Securities Journal* edisi 18 Januari 2011, <http://www.pacific2000.co.id/research/berita-hong-kong/report-pertumbuhan-ekonomi-china-dilaporkan-101.php>., paragraf 2, (diakses pada 17 Februari 2011).

Amerika Serikat dengan PDB sebesar 13,25 triliun dollar AS, dan di atas Jepang yang turun ke peringkat ke-3 dengan PDB sebesar 5,47 triliun dollar AS⁵.

Pertumbuhan ekonomi China yang berbanding lurus dengan kapabilitas militernya. China terus mengembangkan kekuatan militernya dengan modal yang tidak sedikit. Dalam setiap tahunnya, China menaikkan anggaran pertahanannya.

**Grafik I.1 Anggaran Pertahanan China Periode 2000-2008
(dalam miliar dollar AS)**



Sumber: Data dari *Military Balance* 2000 sampai 2008 yang telah diolah kembali oleh penulis

Peningkatan jumlah anggaran pertahanan China terus berlangsung. Pada 2009, anggaran pertahanan China naik sekitar 14,9 persen dari tahun sebelumnya, atau naik dari 61,1 miliar dollar AS menjadi 70,27 miliar dollar AS⁶. Sedangkan pada Maret 2010, China meningkatkan anggaran pertahanan sebesar 7,5 persen menjadi 77,9 miliar dollar AS, seperti yang dilaporkan China melalui Departemen Pertahanannya ke berbagai media, sebagai bentuk kerjasama dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat, dalam rangka memperbaiki keadaan konflik di Selat Taiwan⁷.

5 Kalahkan Jepang, Ekonomi China Kini Terbesar Kedua di Dunia, <http://www.detikfinance.com/read/2011/02/14/103031/1570639/4/kalahkan-jepang-ekonomi-china-kini-terbesar-kedua-di-dunia?992204topnews.>, edisi 14 Februari 2011, paragraf 1, (diakses pada 15 Februari 2011).

6 China's Defense Budget To Grow 14,9%, http://www.chinadaily.com.cn/china/2009-03/04/content_7535244.htm., edisi 4 Maret 2009, paragraf 2, (diakses pada 10 April 2011).

7 China Perkuat Kekuatan Militer, <http://international.okezone.com/read/2010/08/18/18/363978/china-perkuat-kekuatan-militer.>, edisi Rabu 18 Agustus 2010, paragraf 6, (diakses pada 18 November 2010).

Meski anggaran militer China masih hanya sekitar sepersepuluh dari anggaran militer Amerika Serikat, pengembangan kekuatan militer dan persenjataan China meningkat cepat dalam satu dekade terakhir seiring dengan kemajuan pembangunan ekonominya. Data mengenai postur militer China (dilihat dari jumlah personel tentara dan kepemilikan senjata) terakhir (2010) dari sejumlah sumber menyebutkan:

Tabel I. 1 Jumlah Personil Tentara China 2010

TENTARA	JUMLAH (PERSONIL/ORANG)
Tentara aktif	2.285.000
Tentara cadangan	510.000
Paramiliter	660.000

Sumber: *Military Balance* 2010 yang telah diolah kembali oleh penulis

Tabel I. 2 Jumlah Senjata Matra Angkatan Darat China

JENIS SENJATA	JUMLAH (UNIT)
Mbt (Main Battle Tank)	6550 +
Pengangkut personil	1617
Meriam	14000
Senjata pendorong	1700
Sistem peluncur roket	2400 +
Mortir	16000
Senjata kendali anti-tank	6500
Senjata kendali anti-pesawat	7700

Sumber: Data *Military Balance* 2010 dan dari Tim Riset Global Future Institute (GFI) yang telah diolah kembali oleh penulis

Tabel I. 3 Jumlah Senjata Matra Angkatan Laut China

JENIS SENJATA	JUMLAH (UNIT)
Kapal perang	760
Kapal pengangkut personil	1822
Pelabuhan utama	8
Kapal pengangkut pesawat	1

Kapal perang permukaan	80
Kapal selam	65
Frigat	52
Kapal patroli pantai	253
Kapal penyapu ranjau	69
Amphibi	497

Sumber: : Data *Military Balance* 2010 dan dari Tim Riset Global Future Institute (GFI) yang telah diolah kembali oleh penulis

Tabel I. 4 Jumlah Senjata Matra Angkatan Udara China

JENIS PESAWAT	JUMLAH (UNIT)
Pesawat tempur	1617
Helikopter	499+
Lapangan udara	67

Sumber: Data *Military Balance* 2010 dan dari Tim Riset Global Future Institute (GFI) yang telah diolah kembali oleh penulis

China sangat berkepentingan untuk memiliki angkatan bersenjata yang modern dan kuat sebagai kekuatan ‘pengungkit’ dalam ranah strategi dan politik, baik untuk kepentingan dalam negeri maupun internasional. Dalam hubungan ini, Tentara Pembebasan Rakyat (People’s Liberation Army/ PLA) menempati posisi yang sangat strategis dan merupakan unsur utama dalam sistem pertahanan nasional, sekaligus kekuatan terdepan untuk melindungi kepentingan nasional China⁸.

Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) terbagi atas tiga elemen, yakni Angkatan Darat (TPR-AD), Angkatan Laut (TPR-AL), dan Angkatan Udara (TPR-AU). Kepemimpinannya dibagi kepada empat orang jenderal sebagai kepala satuan masing-masing. Wilayah militer langsung dipimpin oleh kepala masing-masing unit yang ada di bawahnya. Total, ada 18 satuan (kooprs) yang di

⁸ Simela Victor Muhamad, *loc.cit.*, hal. 417.

dalamnya terdapat masing-masing satuan tempur⁹. China juga membentuk *Second Artillery Force*, sebuah satuan yang menangani peluru kendali strategis.

TPR-AD memiliki sekitar 1,6 juta personil dan dibagi ke dalam 18 Grup yang masing-masing berkekuatan sekitar 30.000 hingga 65.000 personil¹⁰. Susunan kekuatan setiap kelompok disusun berbeda-beda dan memiliki kekuatan pasukan yang berbeda-beda pula. Mereka mengedepankan teknologi tinggi, maupun keunggulan dalam C4ISR (*Command, Control, Communication, Computer, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance*).

Matra ke-dua, yakni TPR-AL yang berubah peran dari peran statis yaitu pertahanan pantai dan laut dekat ke peran pertahanan laut aktif¹¹. Artinya, peran TPR-AL menjadi sangat penting dalam mendukung sistem pertahanan nasional strategis. Prioritas ditekankan pada pengembangan sistem informasi maritim dan pengembangan generasi baru persenjataan dan peralatan tempur lain. Alasannya adalah tuntutan dan kebutuhan militer dalam mengantisipasi Taiwan, keinginan membangun *blue-water presence* di seluruh kawasan Pasifik Barat dan Samudera Hindia¹², dan juga sebagai bagian dari pengembangan industri kapal China.

Ada tiga aspek berbeda dalam program modernisasi TPR-AL, yakni:¹³

- 1) Menetapkan prioritas kepada penghapusan sejumlah besar kapal perang perang yang sudah tua;
- 2) Memanfaatkan (secara agresif) teknologi Barat untuk meningkatkan kemampuan tempur TPR-AL dan merevitalisasi alat utama sistem senjata TPR-AL;

9 International Institute Of Strategic Studies, *The Military Balance 2010*, (Singapore:Nanyang Technological University), <http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t716100759>, halaman 399, (diakses pada 1 Maret 2010).

10 Simela Victor Muhamad, *loc. cit.*,

11 Peter Howarth, *China's Rising Sea Power: The PLA Navy's Submarine Challenge*, 2006, (New York: Routledge), hal. 44.

12 Alexander Nemets dan Thomas Torda, PLA Navy: From 'Green Water' to 'Blue Water, 2002, <http://archive.newsmx.com/archives/articles/2002/7/25/16133.shtml>., paragraf 3, (diakses pada 15 Februari 2011).

13 Andrew S. Erickson, PLA Navy Modernization: Preparing for 'informatized' War at Sea, dalam *China Brief*, Volume 8, edisi 29 Februari 2008, http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/Itx_news., paragraf 5, (diakses pada 14 Februari 2011).

- 3) Meningkatkan program pelatihan personil TPR-AL mulai tamtama hingga perwira selaras dengan program TPR untuk meningkatkan kemampuan personil.

Matra berikutnya adalah TPR-AU, yang memiliki kuantitas terbesar di dunia dilihat dari segi kepemilikan perangkat kerasnya. Namun secara teknologi, masih jauh dibandingkan negara-negara tetangganya, Jepang, Korea Selatan, bahkan Taiwan. TPR-AU mengoperasikan Armada Udara yang sebagian besar masih menggunakan teknologi 1950-an dan 1960-an¹⁴, dengan kekuatan melebihi 6000 pesawat militer dan 300.000 personel aktif. Oleh sebab itu, TPR-AU mulai melakukan pembenahan armada tempurnya (yang didominasi oleh pesawat-pesawat tua), dengan meningkatkan efektifitas dan pemekaran kekuatan tempur serta melakukan investasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi udara dan angkasa luar.

Untuk membangun keunggulan di udara dan angkasa luar terutama di wilayah Asia Timur, TPR-AU memusatkan upayanya untuk membangun sistem kesenjataan udara handal, yang dapat memberikan pukulan maksimal dengan menjalin kerjasama dengan sejumlah negara seperti Rusia, Israel, Pakistan dan Iran¹⁵.

Perkembangan ekonomi China yang maju pesat berdampak besar pada meningkatnya anggaran militer China. Artinya, peningkatan anggaran militer berbanding lurus dengan peningkatan kapabilitas militernya. Meski peningkatan ini sangat positif bagi China, fase ini dianggap berpotensi mengubah perimbangan kekuatan militer di Asia dan dapat mengancam negara-negara di kawasan Asia Timur¹⁶. Apalagi Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon, dalam laporan tahunannya yang juga dimuat dalam media massa internasional, menyinggung perihal peningkatan kapabilitas militer China yang antara lain

14 Walter J. Boyne (ed.), *Air Warfare: An International Encyclopedia*, 2002, ABC-CLIO, hal. 563.

15 Avery Goldstein, *Rising to the Challenge: China's Grand Strategy and International Security*, 2005, Stanford University Press, hal. 59.

16 Thom Shanker, U.S. Sees Chinese Military Rise, dalam *International Herald Tribune* edisi 26 Maret 2009, dalam Simela Victor, *loc. cit.*, hal. 408.

disebutkan berpotensi mengubah perimbangan kekuatan militer di Asia dan dapat mengancam negara-negara di kawasan¹⁷.

Peningkatan kapabilitas militer China tentu tak bisa dilepaskan dari perhatian tetangga terdekat mereka, ‘provinsi pembangkang’, Taiwan. Meski hubungan kerja sama ekonomi bilateral China dengan Taiwan tetap berjalan baik (bahkan mengalami peningkatan yang pesat), peningkatan kapabilitas militer China hampir selalu menimbulkan kekhawatiran dan dianggap ancaman oleh Taiwan. Apalagi dalam beberapa waktu belakangan, berkembang anggapan bahwa peningkatan kapabilitas kekuatan militer oleh China dilaksanakan untuk mencapai posisi sebagai negara yang kuat secara regional (di Asia Timur) dan juga global¹⁸, sehingga negara-negara tetangganya di kawasan Asia Timur (khususnya Taiwan) memandang perlu untuk meresponnya dengan cara meningkatkan kekuatan militer sekaligus menyikapi secara kritis pengembangan militer China tersebut.

I. 2 Perumusan Masalah

Perkembangan ekonomi China yang maju pesat berdampak besar pada meningkatnya anggaran militer China yang berbanding lurus dengan peningkatan kemampuan militernya. Pengembangan kekuatan militer China ini dianggap berpotensi mengubah perimbangan kekuatan militer di Asia dan dapat mengancam negara-negara di kawasan tersebut¹⁹. Apalagi Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon dalam laporan tahunannya, yang juga dimuat dalam media massa internasional, menyinggung perihal pengembangan kekuatan militer China²⁰.

Kekhawatiran tidak hanya dirasakan oleh negara-negara utama di kawasan Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan. ‘Propinsi pembangkang’ China,

17 Pentagon Report: China’s Military Expanding Its Capabilities, CNN.com/asia, edisi 26 Maret 2009, <http://www.cnn.com/2009/WORLD/asiapcf/03/25/china.military.report/>., paragraf 3, (diakses pada 26 Februari 2011).

18 Steven W. Mosher, *Hegemon: China’s Plan to Dominate Asia and the World*, 2000, Encounter Books. Lihat juga Rosemary Foot, Chinese Strategies in a US Hegemonic Global, Order: Accommodating And Hedging, dalam Jurnal *International Affairs*, volume 82, 2006, hal. 77-94.

19 Thom Shanker, *loc.cit.*,

20 Pentagon Report: China’s Military Expanding It’s Capabilities, CNN.com/asia., *loc.cit.*, paragraf 4.

yakni Taiwan juga, khawatir terhadap pengembangan kekuatan militer China. Suatu hal yang sangat beralasan, mengingat China memiliki sejarah yang kurang baik serta sengketa wilayah (*territory dispute*) dengan Taiwan. China tetap menghargai keberadaan Taiwan, dan kukuh pada prinsipnya yang menganggap Taiwan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari China, sehingga muncullah semboyan ‘Satu China’ atau ‘One China’, sebagai basis perundingan untuk penyatuan China dan Taiwan dengan rumusan ‘Satu negara dengan dua sistem’, atau ‘*One country–two systems*’. Pada pihak lain, Taiwan menolak versi China tentang ‘Satu China’ dan menghendaki pembicaraan dilakukan dalam kesetaraan.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah China telah menganggap Taiwan berada di bawah kekuasaannya sejak berakhirnya perang sipil pada 1949²¹. Sejak perang China dengan Jepang berakhir pada 1945, Partai Komunis China yang semula berkerja sama dengan Partai Nasional atau Kuomintang terlibat perang sipil (Perang Pembebasan), yang berlangsung dari 1945 hingga 1949. Partai Komunis di bawah kepemimpinan Mao Zedong memenangkan perang ini, sehingga Partai Nasional atau Kuomintang pimpinan Chiang Kai Shek menyingkir ke Taiwan. Pada 1 Oktober 1949 dalam suatu upacara besar di lapangan Tiananmen, Mao Zedong sebagai pemimpin Pemerintahan Rakyat Pusat memproklamirkan berdirinya Republik Rakyat China. China juga berjanji akan menguasai lagi pulau itu meski harus mengerahkan semua kekuatan perangnya. Sebagai langkah untuk mencegah Taiwan melepaskan diri dari China, Kongres Rakyat Nasional Partai Komunis China telah mengeluarkan Undang-Undang Anti-Pemisahan (Anti-Seccession Law) pada Maret 2004²².

Asumsinya, pengembangan militer yang dilakukan (China) dapat juga menciptakan dilema keamanan (*security dilemma*), di mana tindakan suatu negara untuk meningkatkan keamanannya (misalnya dengan peningkatan kekuatan militer) membuat Taiwan merasa tidak aman, sehingga cepat atau lambat akan melakukan hal yang sama. Apalagi saat pemerintahan Presiden Chen Shui-bian yang berasal dari Partai Demokratik Progresif, yang notabene dikenal sebagai

21 Timothy Cheek, *Mao Zedong and China's Revolutions*, 2002, (New York: Bedford/St. Martin's), hal. 6-8.

22 *Ibid.*,

golongan yang ingin merdeka dari China daratan. Meski Presiden Chen Shui-bian mengatakan dalam pidato pengukuhan pada Mei 2000, bahwa dia tidak akan mendeklarasikan kemerdekaan selama China tidak menyerang dan tidak akan meminta referendum kemerdekaan atau menghapuskan cetak biru resmi Taiwan untuk akhirnya reuni dengan China daratan, namun China menanggapi dengan menuduh dia curang karena telah menghindari pertanyaan kunci, yakni apakah dia (Presiden Chen Shui-bian) menganggap Taiwan bagian dari China?²³

Fakta yang terjadi adalah militer Taiwan justru kerap 'terjerat' sistem persenjataan yang sudah tua dan bahkan tidak secanggih China. Meski pada akhir 1990-an Taiwan cukup signifikan meningkatkan anggarannya dari 8,3 miliar dollar AS (pada 1998) menjadi 10,9 miliar dollar AS (pada 1999)²⁴, namun China seolah tak mau ketinggalan dengan meningkatkan anggarannya dari 11 miliar dollar (pada 1998) menjadi 12,6 miliar dollar AS (pada 1999)²⁵.

Berangkat dari perumusan masalah di atas, muncul pertanyaan utama dalam penelitian ini, yakni: Bagaimana respon Taiwan terhadap peningkatan kapabilitas militer China? Mengapa Taiwan justru mengurangi kapabilitas militernya untuk menghadapi strategi *offensive* China, khususnya pada periode pemerintahan Presiden Chen Shui-bian yang dikenal berseberangan dengan China?

I. 3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan reaksi Taiwan dalam menghadapi peningkatan kapabilitas militer China terkait dilema keamanan yang dihadapinya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pertahanan Taiwan dalam upaya merespon peningkatan kapabilitas militer China.

23 Taiwan's Profile, <http://www.bbc.co.uk/2/hi/americas/country_profiles/1285915.stm>, paragraf 4, (diakses pada 11 April 2011).

24 International Institute Of Strategic Studies, *The Military Balance 2000*, (Singapore: Nanyang Technological University), <http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t716100759>, hal. 214, (diakses pada 1 Maret 2010).

25 *Ibid.*, hal. 194.

I. 4 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pemahaman penulis terhadap konsep *security dilemma* (dilema keamanan) yang terjadi di Negara-Negara Asia Timur (khususnya Taiwan), sekaligus menambah pengetahuan penulis tentang respon negara-negara Asia Timur (khususnya Taiwan) terhadap upaya peningkatan kapabilitas militer China.

I. 5 Kerangka Teori

Peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan oleh China sesungguhnya termasuk dalam kerangka mendukung kebijakan pertahanan nasional. Kebijakan pertahanan nasional China sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam Buku Putih Pertahanan China (China's National Defense) 2008, 'Defensif aktif' atau dalam terminologi China disebut *jiji fangyu*, yakni sikap mempertahankan diri dan hanya akan menyerang kalau diserang lebih dahulu²⁶.

Dalam kerangka pertahanan nasionalnya, China menempatkan kedaulatan negara, keamanan, integritas wilayah, kepentingan pembangunan nasional dan kepentingan rakyat China di atas segalanya. China menjamin bahwa modernisasi militer yang dilakukannya adalah hanya untuk memenuhi kebutuhan mempertahankan diri. Sejalan dengan sikap itu, China secara teguh berpegang kepada kebijakan bukan pihak pertama menggunakan senjata nuklir, dan bersikap menahan diri terhadap perkembangan senjata nuklir. China pun tidak akan melibatkan diri dalam perlombaan senjata nuklir dan tidak akan pernah menempatkan senjata nuklir di luar wilayah China.

Presiden China saat itu, Hu Jin Tao, pernah menegaskan pada kongres Partai Komunis China ke-17 yang berlangsung di Beijing pada Oktober 2007. Dia menyatakan bahwa, "Meskipun China melakukan pembangunan dan modernisasi militer, tetapi peranan Tentara Pembebasan Rakyat (*People's Liberation Army*) masih terbatas pada kapasitas pertahanan untuk menjaga kedaulatan negara,

26 China's National Defense in 2008, The State Council Information Office, 20 Januari 2009, http://www.china.org.cn/government/central_government/200901/20/content_1755577.htm. Lihat juga Richard D. Fisher Jr., *China's Military Modernization Building for Regional and Global Reach (Global Security Watch)*, 2008, (Connecticut: Praeger Security International), hal. 40.

keamanan dan integritas territorial". Kemampuan serang-balas senjata nuklir China dibatasi hanya untuk mendukung strategi penangkalan menghadapi serangan nuklir dari negara lain²⁷.

China sangat berkepentingan dan berupaya keras membangun sistem pertahanan nasional dan kekuatan militer yang kuat yang sesuai dengan kebutuhan keamanan dan pembangunan nasional. Peningkatan kapabilitas militer bagi China merupakan suatu keharusan dalam kerangka menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, integritas wilayah dan keamanan nasional, menjamin berlanjutan pembangunan ekonomi, serta meningkatkan kekuatan nasional secara sistematis dan berlanjut. Pengembangan militer China juga dimaksudkan untuk mengamankan dan mendukung tujuan dan tugas pokok pertahanan nasional China, seperti untuk mencegah setiap pelanggaran wilayah teritorial, baik darat, laut, dan udara, dan melawan tindakan agresi.

Perkembangan teknologi dan doktrin militer China mengalami sejarah yang panjang. China di bawah pimpinan Partai Komunis China berhasil memenangkan beberapa peperangan penting, seperti:

- 1) *Northern Expeditionary War* yang berlangsung dari 1924 hingga 1927
- 2) Perang Revolusi Agraria yang dikenal juga dengan Perang Sipil Sepuluh Tahun yang berlangsung dari 1927 hingga 1937, dan
- 3) Perang melawan penjajah Jepang pada 1937 hingga 1945.

Tidak hanya perang melawan negara lain, China juga sempat mengalami perang sipil atau perang saudara yang melibatkan dua partai besar di negara tersebut, yakni Partai Komunis melawan Partai nasionalis atau Partai Kuomintang. Perang yang berlangsung selama empat tahun tersebut dikenal sebagai Perang Pembebasan, dan Partai Komunis pimpinan Mao Zedong memenangkannya, sekaligus memaksa para pengikut Chiang Kai Shek di Partai Kuomintang menyingkir ke Taiwan²⁸.

²⁷ *Ibid.*, hal. 41.

²⁸ Timothy Cheek, *op.cit.*, Lihat juga Diana Lary, *China's Republic*, 2007, (New York: Cambridge University Press), hal. 151-177.

Sejumlah kebijakan peningkatan kapabilitas militer China tidak hanya ditujukan untuk menjamin keamanan wilayah Asia Timur saja. Kawasan Asia Tenggara yang terletak dekat (bahkan sejumlah ahli menganggapnya termasuk dalam) Asia Timur, termasuk ke dalam tujuan China. Negara berpenduduk terbanyak di dunia ini telah melakukan klaim ke sejumlah wilayah kaya minyak dan gas bumi di Laut China Selatan, dan bersinggungan dengan dengan Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Peningkatan kapabilitas militer yang sedang dilakukan China, salah satunya melalui perubahan status Angkatan Lautnya yang kini mencapai tingkat samudera (*Blue Water Navy*), tentunya berpotensi mendorong mereka setiap saat untuk mengirim satuan-satuan kapal perangnya ke wilayah-wilayah 'rentan konflik' tersebut.

Pada sisi lain, peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan suatu negara dapat juga menciptakan 'dilema keamanan' (*security dilemma*) di mana tindakan suatu negara untuk menjaga keamanan wilayahnya membuat negara-negara lain di sekitar negara itu merasa tidak aman, sehingga cepat atau lambat akan melakukan hal yang sama. Dalam realisme, hal itu sebagai akibat dari sistem internasional yang anarkis dengan karakteristik dasar ketiadaan pemerintah tertinggi yang melebihi negara²⁹.

Dilema keamanan terjadi ketika suatu tindakan pengamanan terhadap negara sendiri disalah-artikan oleh negara lain³⁰. Poin pentingnya adalah bagaimana suatu aktor (negara) A menginterpretasikan perilaku aktor (negara) B di masa lalu, untuk kemudian digunakan untuk memproyeksikan perilaku negara B tersebut, dipengaruhi oleh pemahamannya tentang dilema keamanan dan kemampuannya dalam memahami aktor (negara) lain³¹. Dilema akan semakin kuat kalau aktor itu tidak memahami poin di atas, dan tidak memahami bahwa ketika aktor B memperkuat persenjataan mereka itu, hanyalah tindakan untuk mengamankan diri sendiri, bukan ingin menyerang. Aktor B yang merasa

29 Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond*, 1999, (Boston: Allyn & Bacon), hal. 68.

30 Robert Jervis, *Cooperation Under The Security Dilemma*, dalam Jurnal *World Politics*, volume 30, No.2, Center of International Studies, 1978, (New York: Princeton University Press), hal. 400.

31 *Ibid.*, hal. 401.

terancam akan ikut mempersenjatai diri bukan karena ingin menyerang balik, namun karena takut diserang.

Membahas peningkatan kapabilitas militer China dan dampaknya bagi hubungannya dengan Taiwan, tak bisa dilepaskan dari kerangka berpikir realisme. Realisme adalah salah satu pendekatan dalam studi Hubungan Internasional yang biasa digunakan sebagai kerangka berpikir untuk memahami isu-isu politik keamanan yang terjadi di tingkat global maupun suatu kawasan.

Negara dianggap sama dengan manusia yang senantiasa memiliki hasrat untuk mendominasi manusia lain atau sekurang-kurangnya mempertahankan eksistensi dan keamanan dirinya. Realisme mengasumsikan politik global sebagai kumpulan negara-negara yang memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing dengan instrumen utamanya adalah kekuatan militer³². Ole R. Holsti menyebut realisme sebagai “*The most venerable and persisting model of international relations*”.

Perspektif Realis secara umum memiliki beberapa argumen standar, yakni:

- 1) Negara adalah aktor rasional yang uniteral.
- 2) Prioritas kebijakan negara terletak pada kepastian kondisi keamanan.
- 3) Lingkungan internasional dianggap memiliki karakteristik anarki yang berarti bahwa negara sebagai unit dalam sistem internasional menganut sistem yang mandiri sebagai berdaulat dengan tidak adanya pemerintahan dunia.
- 4) Dalam situasi yang anarki maka terciptalah kompetisi keamanan sebagai kondisi yang harus dihadapi setiap negara sebagai unit dalam sistem.
- 5) Kompetisi tersebut melahirkan kecenderungan kebijakan keamanan negara yang ekspansionis khususnya dalam bentuk penggelaran militer.

32 Ole R. Holsti, *Theories of International Relations and Foreign Policy: Realism and It's Challenges*, dalam Charles W. Kegley (ed.), *Controversies in International Relations Theory: Realism and the Neoliberal Challenges*, 1995, (New York: Saint Martin's Press), hal. 36. Lihat juga Charles W. Kegley dan Eugene R. Wittkopf, *World Politics: Trends and Transformation*, 2003, (Belmont: Wadsworth), hal. 37-38.

Perspektif Realis melandasi diri pada tiga asumsi utama:

- 1) Negara berupaya memaksimalkan kekuatannya secara relatif sehingga menciptakan situasi *zero sum* yang semakin menjauhkan diri dari kerjasama.
- 2) Keinginan negara untuk mencapai tujuan keamanan yang “nisbi” membuat kerjasama keamanan menjadi sulit.
- 3) Negara senantiasa menempuh kebijakan kompetisi karena adanya resiko kecurangan yang membuat kerjasama menjadi riskan.

Salah satu aliran pemikiran dalam perspektif realis adalah *Complex Realist*, yang dikemukakan oleh Thucydides. Asumsi dasarnya terbagi menjadi:

- 1) Sistem Internasional adalah anarki sehingga setiap negara cenderung melakukan pelipatgandaan *power* tanpa ada pengendalian seperti pada politik domestik.
- 2) Aktor utama dalam sistem internasional adalah negara yang independen yang memiliki hierarki secara domestik (kedaulatan) yang berkaitan erat dengan anarki pada sistem internasional.
- 3) Tidak adanya legitimasi dalam sistem internasional menyebabkan tidak ada pembatasan sehingga tidak mudah untuk mengendalikan konflik karena berkaitan dengan masalah kepentingan nasional, nilai-nilai yang dianut dan *prestice*.

Berdasarkan argumen dasar realis yang menitikberatkan pada struktur sistem internasional yang anarki, di mana negara merupakan unit yang mandiri dan cenderung berkompetisi, maka strategi keamanan berdasarkan perpektif Realis pada dasarnya merupakan strategi keamanan yang cenderung ‘agresif’ atau *offensive*. Makna dari kata agresif di sini adalah pengutamaan terhadap unsur-unsur pokok yang berkaitan dengan pengertian dasar strategi yaitu penggunaan atau ancaman penggunaan kekuatan (militer) dalam rangka mencapai tujuan atau mempertahankan kepentingan nasional. Dalam hal ini strategi keamanan akan senantiasa dikaitkan dengan upaya peningkatan kapabilitas militer, persiapan akan

terjadinya konflik terbuka, kecenderungan perlombaan senjata termasuk proliferasi persenjataan, peningkatan pertahanan (militer) serta penangkalan.

Menurut Hans J. Morgenthau, elemen *power* terdiri dari:³³

- 1) Populasi,
- 2) Kondisi geografis,
- 3) Sumber daya alam,
- 4) Kapabilitas industri,
- 5) Kepemimpinan,
- 6) Organisasi internal, serta
- 7) Kekuatan (kapabilitas) militer

Adapun kekuatan (kapabilitas) militer yang dibentuk dan dikembangkan oleh suatu negara dimaksudkan untuk kepentingan keamanan nasional dan juga untuk kepentingan strategis yang lebih luas di tingkat regional dan juga global. Kekuatan militer dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- 1) Kekuatan militer konvensional yang terdiri dari kekuatan darat, laut, udara dan teknologi persenjataan.
- 2) Kekuatan militer senjata pemusnah massal, seperti nuklir, senjata kimia dan senjata biologi.

Kekuatan militer menuntut anggaran pertahanan yang memadai, dan oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kapabilitas militer faktor anggaran pertahanan juga menjadi hal yang sangat penting. Peningkatan kapabilitas militer suatu negara dapat sebagai penangkalan (*deterrence*) terhadap negara-negara lain, reaksi dari ancaman negara lain, ataupun sebagai upaya untuk mencapai hegemoni.

Menurut Robert Jervis, ada dua variabel (fenomena) rumit yang hampir selalu muncul mengiringi dilema keamanan, yakni: apakah kebijakan pertahanan

33 Daniel S. Papp, *Contemporary International Relations*, 1997, (Boston: Allyn & Bacon), hal. 360-365.

bisa lebih utama atau penting/berguna dibandingkan kebijakan menyerang, dan apakah kebijakan bertahan dan menyerang masing-masing memiliki keuntungan? Jervis mendeskripsikan bahwa,³⁴

“Saat senjata aktor yang bertahan berbeda dengan yang menyerang, memungkinkan salah satu aktor untuk membuat dirinya lebih aman tanpa harus berusaha mengurangi keamanan lawannya. Dan saat aktor yang bertahan lebih unggul dibanding menyerang, perkembangan pesat keamanan suatu negara hanya agak mengurangi keamanan aktor lain, sehingga kekuatan aktor status-quo bisa melestarikan kekuasaannya dan menghindari sifat menyerangnya”.

Jervis menggambarkan empat situasi yang mungkin tercipta dari kemungkinan-kemungkinan pilihan kebijakan keamanan, yakni: *Pertama*, lingkungan terburuk bagi aktor status-quo, yang tidak menemukan cara lain untuk mendapatkan keamanan tanpa membahayakan aktor lainnya, sehingga keamanan sulit diperoleh jika memilih kebijakan bertahan. Artinya, negara status-quo harus mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan terlebih dahulu. Ciri lain dari gambaran seperti ini adalah identik dengan terjadinya perlombaan senjata antaraktor.

Ke-dua, dilema keamanan terjadi dalam situasi dimana sifat (strategi) bertahan dan menyerang bukan yang utama. Aktor-aktor yang ada dalam lingkungan ini akan cenderung lebih longgar merespon setiap sikap aktor lain, sehingga keamanan lebih berpeluang terjadi.

Ke-tiga, situasi yang terjadi memungkinkan untuk terciptanya dilema keamanan, melainkan ada masalah keamanan karena aktor-aktor saling bertahan satu sama lain. Tetapi karena sikap menyerang mempunyai keunggulan, maka serangan sangat mungkin terjadi, bahkan cenderung lebih mudah dilakukan.

Situasi *ke-empat* adalah keamanan (damai) yang tercipta bagi semua aktor. Perbedaan antara sikap menyerang dan bertahan memberikan suatu jalan keluar bagi dilema keamanan. Aktor status-quo tidak mempunyai alasan untuk

³⁴ *Ibid.*, hal. 403.

mendapatkan kekuatan, dan oposisi juga hanya memperhatikan dengan kondisi yang terjadi di sekitarnya.

Tabel I. 5 Peta Kemungkinan Terjadinya Dilema Keamanan (Robert Jervis)

	CENDERUNG MENGGUNAKAN STRATEGI MENYERANG	CENDERUNG MENGGUNAKAN STRATEGI BERTAHAN
	1	2
SIKAP BERTAHAN LEBIH DOMINAN DIBANDING SIKAP MENYERANG	Sangat berbahaya	Terjadi dilema keamanan, tetapi tuntutan keamanan menjadi pilhan tepat
	3	4
SIKAP MENYERANG LEBIH DOMINAN DIBANDING BERTAHAN	Tidak terjadi dilema keamanan, sangat memungkinkan terjadi penyerangan. Aktor status-quo mampu mengikuti perbedaan sikap lawan (menunggu stimulus). Waspada mutlak diperlukan.	Stabil bagi para aktor (dunia aman)

Sumber: Robert Jervis, Cooperation Under The Security Dilemma, dalam *World Politics*, 1978, Center of International Studies, (New York: Princeton University Press), hal. 400.

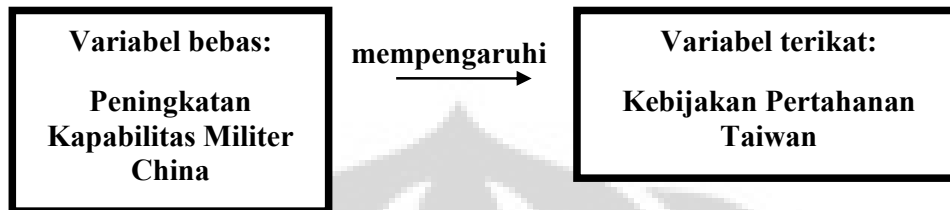
I. 6 Model Analisis

Mengacu kepada penjelasan Robert Jervis di bagian sebelumnya, variabel yang dipengaruhi atau variabel terikat (*dependent variable*) pada penelitian ini adalah kebijakan pertahanan Taiwan pada masa pemerintahan Presiden Chen Shui-bian (2000-2008), yang bisa juga disebut sebagai konsekuensi logis dari dilema keamanan yang dihadapi Taiwan (kecenderungan bersikap menyerang atau bertahan) terhadap peningkatan kapabilitas militer China (bisa dianggap sebagai stimulan dari aktor lainnya). Dengan kata lain, kebijakan pertahanan Taiwan menjadi variabel yang terikat karena dipengaruhi oleh variabel bebas (peningkatan kapabilitas militer China).

Sedangkan variabel tidak terikat (bebas) atau variabel yang mempengaruhi adalah peningkatan kapabilitas militer China, yang direpresentasikan oleh kemajuan teknologi dan peningkatan anggaran pertahanannya. Sesuai dengan konsep *security dilemma* Robert Jervis, China yang tengah meningkatkan kapabilitas militernya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan peningkatan jumlah anggaran pertahanannya, menjadi variabel yang berdampak terhadap

keamanan di wilayah Selat Taiwan. Secara sederhana, gambar model analisisnya seperti berikut ini:

Gambar I. Model Analisis Penelitian



I.7 Hipotesa

Peningkatan kapabilitas militer yang sedang dilakukan China berpengaruh terhadap kebijakan pertahanan Taiwan. Orientasi militer China yang bergerak menuju modernisasi militer, bisa dianggap sebagai sikap menakut-nakuti (*coercion*) atau malah menguasai melalui invasi (*capture*), sehingga negara-negara tetangganya cenderung akan ikut meningkatkan kapabilitas militer mereka. Tetapi kenyataannya, Taiwan justru mengurangi kapabilitas militernya yang tercermin dari penurunan persentase anggaran pertahanan terhadap anggaran belanja mereka. Sebuah kebijakan yang lebih disebabkan oleh kondisi (ekonomi dan politik) domestik, serta ketergantungan Taiwan terhadap Amerika Serikat dalam hal keamanan mereka menghadapi ‘tanah leluhur’, China.

I. 8 Metodologi Penelitian

Penelitian mengenai pengaruh pengembangan kemampuan militer China terhadap keamanan di Selat Taiwan akan menjadi sebuah bentuk penelitian yang berusaha menjelaskan pola hubungan antarvariabel terikat dengan tidak terikat, atau interaksi sebab-akibat antarvariabel dan kemudian bisa menjawab pertanyaan penelitian dalam bentuk analisa eksplanatif, sebagai bentuk refleksi terhadap kenyataan realitas sosial³⁵. Penelitian eksplanatif bertujuan untuk menganalisa, mengidentifikasi, dan menjelaskan faktor dan indikator yang terkait dengan

35 W. Lawrence Newman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, fifth edition, 2003, (Boston: Pearson Education, Inc.), hal. 71.

pertanyaan penelitian, untuk menjelaskan logika empiris yang diuraikan secara deduktif-induktif³⁶.

Penelitian mengenai dampak peningkatan kapabilitas militer China ini menggunakan teknik pengumpulan data baik kualitatif maupun kuantitatif yang terkait dengan studi mengenai kebijakan-kebijakan pertahanan. Tak ketinggalan, penelitian ini juga menekankan pada studi dokumen, yakni teknik pencarian data yang mengandalkan dokumen resmi atau kebijakan terkait yang dikeluarkan pemerintah. Teknik lainnya adalah studi literatur, yakni teknik pengumpulan yang bersifat pada bentuk data teoritis atau data-data yang terdapat pada karya-karya ilmiah.

I. 9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan dibagi ke dalam lima bab. Bab pertama adalah pendahuluan yang berupa deskripsi tentang sejarah (singkat) peningkatan kapabilitas militer China dan upaya pengembangannya yang berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, pada bab pertama ini juga terdapat pertanyaan penelitian, kerangka teori serta metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Bab kedua akan membahas mengenai sejarah peningkatan kapabilitas militer China yang direpresentasikan oleh postur kepemilikan alat utama sistem senjata (alutsista) yang dimilikinya, serta peningkatan anggaran pertahanan mereka. Dalam bab tersebut juga akan dibuktikan hipotesa yang menyebutkan bahwa, “Peningkatan kapabilitas militer China diikuti oleh peningkatan kapabilitas militer Taiwan’.

Bab selanjutnya atau bab ke-tiga, berisi analisa yang mendukung pembuktian hipotesa. Penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi reformasi kebijakan pertahanan Taiwan menjadi hal utama. Sehingga bisa terlihat pengaruh kapabilitas militer China terhadap kebijakan keamanan Taiwan. Bab keempat atau bab terakhir akan diisi oleh kesimpulan sekaligus saran penyusun atas hasil penelitian ini.

³⁶ *Ibid.*, hal. 72.

BAB II

PENINGKATAN KAPABILITAS MILITER CHINA (2000-2008)

II. 1 Gambaran Umum China

China pada masa lalu merupakan salah satu negeri yang mempunyai sejarah peradaban dan budaya paling maju dan tua di dunia. Hingga saat ini telah menapak perjalanan sejarah yang panjang dengan rentang waktu mencapai hampir 4.000 tahun. Dalam perjalanan masa yang panjang itu, negara tersebut mengalami berbagai peristiwa dan sejarah penting, di antaranya pernah mengalami masa kekuasaan kerajaan-kerajaan yang dipenuhi sejarah peperangan, kemudian berhasil dipersatukan, tetapi kemudian terpecah kembali, sampai akhirnya berhasil dipersatukan kembali. China modern (setelah berbentuk republik) juga pernah mengalami sejarah penjajahan bangsa asing, sehingga China dipenuhi pergulatan internal. Baru pada penghujung abad ke-20 China mulai memperlihatkan masa yang penuh harapan, dengan kemajuan ekonomi yang menjanjikan.

Dalam bidang militer, negara ini pun mengalami sejarah yang panjang. Di bawah pimpinan Partai Komunis, China berhasil memenangkan beberapa peperangan penting, di antaranya.³⁷

- 1) *Northern Expeditionary War* yang berlangsung dari 1924 hingga 1927;
- 2) 'Perang Revolusi Agraria' yang dikenal juga dengan 'Perang Sipil Sepuluh Tahun' yang berlangsung dari 1927 hingga 1937;
- 3) Perang melawan penjajah Jepang pada 1937 hingga 1945;
- 4) Perang Pembebasan pada 1945 sampai 1949, terjadi tidak lama setelah perang melawan Jepang. Partai Komunis China yang semula berkerja sama dengan Partai Nasional atau Kuomintang terlibat dalam perang sipil ini. Perang ini dimenangkan oleh Partai Komunis China di bawah

³⁷ Simela Victor Muhamad, *loc.cit.*, hal. 412.

pimpinan Mao Zedong, sehingga Partai Nasional atau Kuomintang pimpinan Chiang Kai Shek menyingkir ke Taiwan.

- 5) Puncaknya, pada 1 Oktober 1949 dalam suatu upacara besar di lapangan Tiananmen, Mao Zedong sebagai pemimpin Pemerintahan Rakyat Pusat memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat China³⁸.

China adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Data sensus pada 2002 menyebutkan, jumlah penduduk negara berbentuk republik ini mencapai 1,27 miliar jiwa. Mereka terdiri dari beragam suku bangsa dan bahasa lokal, seperti Mandarin, Xiang, Fukien dan Hakka. Hingga kini, China menganut paham Komunisme dan dipimpin seorang presiden sebagai kepala negara.

Dalam bidang kependudukan, negara bernama asli Zhounghua Renmin ini, sedang melakukan program keluarga berencana secara intensif, dengan semboyan 'satu anak cukup' dan 'laki-laki atau perempuan sama saja'. Hasilnya, China berhasil menekan angka laju pertumbuhan penduduknya sampai 1,3 persen, sehingga berdampak kepada peningkatan pendapatan perkapitanya yang mencapai 2,8 persen, pada tahun 1980-an.

China memiliki wilayah seluas 9.600.000 Km², yang terdiri dari 22 provinsi, lima wilayah otonomi dan tiga kota besar (Ibukota Beijing, Shanghai dan Guang Zhou). Negara penganut Paham Komunis ini menempati peringkat lima besar dalam hal populasi hewan ternak, dengan rincian: Kepemilikan ternak kuda terbesar ke-dua di dunia; ternak domba terbesar ke-dua; dan ternak sapi peringkat ke-lima terbesar sedunia. Sementara sumber daya alam andalannya meliputi: batubara, timah, mangan dan merkuri.

Meski China kini mulai bergeser menjadi salah satu negara industri maju dunia, pemerintahnya tetap mempertahankan ketersediaan pangan bagi rakyatnya. Terbukti, China masih menjadi penghasil terbesar beras, tembakau, telur dan daging sedunia. Negara yang memproklamirkan kemerdekaannya pada 1 Oktober 1949 ini juga, dikenal sebagai penghasil jagung, kacang, gula, teh, dan kapas.

38 Timothy Cheek, *op. cit.*,

II. 2 Kemajuan Ekonomi China

Pada periode 1980-an, China dianggap sebagai kandidat negara maju oleh sejumlah akademisi. Salah satunya adalah Avery Goldstein yang menyatakan, “China merupakan kandidat negara adikuasa karena rezim komunis telah gagal mempromosikan pembangunan domestik yang sebenarnya basis kekuatan ekonomi dan militer tingkat dunia”³⁹. Sejak saat itu, China memfokuskan diri untuk membangun ekonominya demi mencapai kekuatan ekonomi nasional yang komprehensif (*comprehensive national power* atau CNP, dalam bahasa China dikenal dengan nama *zonghe guoli*).

Beberapa akademisi mengategorikan elemen-elemen yang membangun CNP, terdiri dari: sumber daya alam, sumber daya manusia, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, pertahanan dan politik. akademisi lain membagi elemen-elemen tersebut dalam empat kategori, yakni:⁴⁰

- 1) Kekuatan dasar, terdiri dari populasi, sumber daya alam, dan persatuan nasional;
- 2) Kekuatan ekonomi, meliputi kekuatan industri, kekuatan pertanian, kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kekuatan keuangan, dan kekuatan komersial;
- 3) Kekuatan pertahanan nasional yang terdiri dari sumber daya alam strategik, teknologi, kekuatan militer dan kekuatan nuklir;
- 4) Kekuatan diplomatik, yang meliputi kebijakan luar negeri, sikap terhadap hubungan internasional, bantuan luar negeri, dan lain-lain.

China dianggap mempunyai syarat-syarat untuk menjadi negara adikuasa seperti yang ditulis pada paragraf sebelumnya. Salah seorang akademisi, Michael Pillsbury, bahkan mendefinisikan CNP China sebagai ‘kombinasi dari semua

39 Avery Goldstein, *Great Expectations: Interpreting China’s Arrival*, dalam Jurnal *International Security*, Volume 22, Nomor 3, 1997, hal. 54–55.

40 Guo Wanchao, *Zhongguo Jueqi (Rise of China)*, 2004, (Nanchang: Jiangxi Renmin Chubanshe), halaman 24.

kondisi dan kekuatan semua negara di sejumlah wilayah⁴¹. Kemajuan China dalam bidang ekonomi ini mengagetkan sejumlah pihak. Pengaruh merekapun otomatis ikut berkembang, khususnya di kawasan Asia Timur. China menjelma menjadi wilayah yang paling berpotensi untuk investasi modal asing (*foreign direct investment*, FDI), menggantikan negara-negara anggota ASEAN, khususnya setelah krisis keuangan melanda Asia Tenggara pada 1997. FDI di Asia Tenggara turun dari 16 miliar dollar AS pada 1999, menjadi hanya 10 miliar dollar AS pada 2000⁴².

Ekonomi China dalam periode 2002-2007 menunjukkan pertumbuhan yang tinggi. Sejumlah indikatornya pernah diungkapkan Perdana Menteri (PM) China, Wen Jiabao, saat berpidato pada sesi pertama Kongres Rakyat Nasional (NPC) ke-11 di Gedung Balai Agung Rakyat, Beijing, yang meliputi:⁴³

- 1) Produk Domestik Bruto (PDB) China pada 2007 mencapai 24,66 triliun yuan atau naik 65,5 persen dibanding 2002.
- 2) Rata-rata pertumbuhan ekonomi tiap tahun mencapai 10,6 persen selama periode itu (2002-2007).
- 3) Total pendapatan pemerintah selama periode 2002-2007 mencapai 5,13 triliun yuan, naik 171 persen dibanding 2002.
- 4) Cadangan mata uang asing sebesar 1,52 triliun dollar AS.
- 5) Produksi biji-bijian naik dalam empat tahun berturut-turut hingga mencapai 500 miliar Kilogram selama 2007.
- 6) Volume ekspor dan impor China mencapai 2,17 triliun dolar AS pada 2007, dan menjadikan posisi China sebagai negara yang melakukan perdagangan terbesar di dunia dari urutan enam menjadi ke urutan tiga.

41 Michael Pillsbury, *China Debates the Future Security Environment*, 2000, (Washington, DC: National Defense University Press, <www.fas.org/nuke/guide/china/doctrine/pills2/> (diakses pada 26 Februari 2011).

42 Yang Jian, *The Rise Of China: Chinese Perspective*, dalam Kevin J. Cooney and Yoichiro Sato (eds.), *The Rise Of China and International Security*, 2009, (New York: Routledge), hal. 18.

43 Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi China Capai 10,6 %, <<http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/03/06/213/89403/rata-rata-pertumbuhan-ekonomi-china-capai-10-6>>, paragraf 4, (diakses pada 17 Februari 2011).

- 7) Pendapatan per-kapita masyarakat perkotaan setiap tahun naik dari 7.703 yuan pada 2002 menjadi 13.786 yuan pada 2007.
- 8) Sementara di desa, pendapatan per-kapitanya naik dari 2.476 yuan menjadi 4.140 yuan dalam periode yang sama.
- 9) Dalam hal administrasi dan kerjasama ekonomi luar negeri juga, China mencapai kemajuan yang cukup pesat.
- 10) China sukses untuk urusan domestiknya, seperti pembentukan BUMN, sistem finansial, sistem fiskal dan pajak.
- 11) Inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada dunia internasional.

Dari tahun ke tahun, China tetap menunjukkan kemajuan ekonomi negaranya. Produk domestik bruto (PDB) China meningkat menjadi 39,5 triliun yuan atau setara dengan 5,98 triliun dollar AS di tahun 2010, atau 10,1 persen lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya⁴⁴. Beijing juga telah menetapkan target pertumbuhan kredit bagi perbankan nasional untuk 2011 antara 7,2 triliun yuan sampai 7,5 triliun yuan. Target tersebut setara dengan 1,09 triliun dollar AS sampai 1,14 triliun dollar AS⁴⁵.

Target pertumbuhan kredit 2011 ternyata lebih kecil dari 7,95 triliun yuan yang disalurkan oleh lembaga keuangan China pada tahun 2010, dan juga jauh di bawah rekor penyaluran kredit yang mencapai 9,6 triliun yuan yang dikucurkan pada 2009 silam. Laporan ini juga menambahkan bahwa pemerintah telah menetapkan batas kredit bulan ini sebesar 12 persen dari target setahun penuh. Perbankan China cenderung menyalurkan kredit yang melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah. Umumnya, mayoritas kredit yang mereka salurkan pada awal tahun memaksa pihak berwenang untuk membatasi pertumbuhan kredit mereka pada pertengahan dan akhir tahun.

44 Pertumbuhan Ekonomi China Dilaporkan 10,1%, dalam *China Securities Journal*, edisi 18 Januari 2011, <<http://www.pacific2000.co.id/research/berita-hong-kong/report-pertumbuhan-ekonomi-china-dilaporkan-101.php>>, paragraf 2, (diakses pada 14 Februari 2011).

45 *Ibid.*,

Laporan-laporan di atas menunjukkan kemajuan pesat perekonomian China. Sebuah laporan bahkan menyebutkan, perekonomian China kini menduduki peringkat ke-2 terbesar di Dunia, di bawah Amerika Serikat. Dibandingkan dengan kekuatan ekonomi lainnya di Asia (bahkan dunia), China berhasil menggeser Jepang yang sudah 40 tahun menduduki posisi *runner up*⁴⁶.

Perekonomian Jepang di 2010 mencatat angka pertumbuhan 3,9 persen, jauh di bawah pertumbuhan ekonomi China yang di 2010 lalu mencatat angka 10,3 persen. Secara nominal, Jepang mencatat angka PDB sebesar 5,474 triliun dollar AS di 2010. Angka itu tentu saja jauh dari PDB China yang di 2010 mencapai 5,879 triliun dollar AS. Sementara Amerika Serikat masih di peringkat pertama dengan PDB sebesar 13,249 triliun dollar AS⁴⁷.

Data dari Pemerintah Jepang yang dikutip *AFP* menunjukkan pada kuartal IV-2010, perekonomian negeri matahari terbit itu tumbuh 1,1 persen (secara tahunan) akibat selesainya subsidi otomotif yang menggerus penjualan, kenaikan cukai rokok yang mengurangi permintaan dan penguatan yen yang menghambat ekspor. Berdasarkan data, pertumbuhan ekonomi Jepang pada 2010 hanya sebesar 3,9 persen yang disebabkan oleh belanja konsumen dan permintaan yang melemah⁴⁸.

II. 3 Kapabilitas Militer China

Setelah mengalami kemajuan pesat dalam bidang ekonomi, China kemudian menggunakannya untuk menopang peningkatan kapabilitas militer mereka. Seluruh matra TPR (Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Darat) dibangun dengan anggaran yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Salah satu catatan menyebutkan, anggaran militer China pada 2007 mencapai 46,7 miliar dollar AS, atau bertambah 17,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Misi China meningkatkan kapabilitas militernya juga terkait letak geografis mereka

46 Kalahkan Jepang, Ekonomi China Kini Terbesar Kedua di Dunia, <<http://www.detikfinance.com/read/2011/02/14/103031/1570639/4/kalahkan-jepang-ekonomi-china-kini-terbesar-kedua-di-dunia?992204topnews>>, 2011, paragraf 1, (diakses pada 14 Februari 2011).

47 *Ibid.*, paragraf 3.

48 *Ibid.*, paragraf 2.

yang berada di sepanjang Laut Kuning, Laut China Timur, dan Laut China Selatan, sehingga menjadi wajar demi mempertahankan kedaulatan wilayah.

Militer China sejak awal 1990 (setelah berakhirnya Perang Dingin), benar-benar berusaha mengembangkan penelitian dan inovasi berbasis teknologi mutakhir, demi mencapai kekuatan militer (TPR) yang mempunyai kekuatan komprehensif di abad ke-21⁴⁹. Dalam perjalanannya, keterlibatan para pemimpin tertinggi TPR dalam terobosan-terobosan teknologi serta pengawasan kebijakan, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian China tersebut. Pada 1997, Partai Komunis China memperkenalkan '16 Karakter Kebijakan Militer' yang bertujuan: (1) Menggabungkan sipil dengan militer, (2) mengkombinasikan perang dengan damai, (3) Memprioritaskan produk militer, dan (4) Menyarankan sipil untuk mendukung militer. Gambaran tersebut terlihat jelas, saat pada 2000, Jiang Zemin (Presiden China saat itu) mengatakan, "Industri senjata harus terhubung lebih dekat dengan industri lain, sehingga sistem pertahanan nasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi bisa dibentuk"⁵⁰.

Selama 15 tahun, China mulai menampakkan perwujudan janji mereka, yakni membangun kapabilitas militer yang mengadopsi teknologi dari dua atau tiga generasi ke depan. Teknologi persenjataan yang lahir pada 1950-an, kini mulai diganti menggunakan teknologi 1990-an. Pada kurun 2001 sampai dengan 2007, militer China tumbuh sebesar 258 persen, yang terlihat dari total anggaran untuk pengadaan alutsista mereka, yang mencapai antara 85 sampai 125 miliar dollar AS⁵¹. Angka tersebut menempatkan China di posisi ke-dua sebagai negara yang paling besar menghabiskan anggaran untuk alutsistanya, di bawah Amerika Serikat⁵². Pada 2006, China bahkan diprediksi akan meningkatkan anggaran pertahanannya dua sampai tiga kali lipat pada 2025, atau mencapai 210 sampai 315 miliar dollar AS.

49 Richard D. Fisher Jr., *op.cit.*, hal. 80.

50 *Ibid.*,

51 Major Foreign Holders of Treasury Securities, <http://www.ustreas.gov/tic/mfh.txt>, dalam *Ibid.*, hal. 16.

52 Amerika Serikat menghabiskan 532 miliar dollar AS (173 miliar di antaranya untuk perang dan penanggulangan terorisme) pada 2007, dalam *Ibid.*,

**Tabel II. 1 Total Anggaran Belanja Pertahanan China dan
Perkiraan Lembaga Intelejen Pertahanan Amerika Serikat (DIA)⁵³
(dalam miliar dollar AS)**

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Perkiraan Tertinggi DIA	67	71	78	86	94	105	125
Perkiraan Terendah DIA	47	50	55	60	66	70	85
Anggaran Pertahanan China sebenarnya	17,48	20,78	23,26	26,90	30,27	37,41	45

Sumber: Data Major Foreign Holders of Treasury Securities, <http://www.ustreas.gov/tic/mfh.txt>, hal. 16, yang telah diolah kembali oleh penulis.

Peningkatan anggaran pertahanan China yang lebih dari sepuluh persen dari total anggaran belanja negara mereka, ditujukan untuk tiga tujuan utama, yakni menyesuaikan dengan harga alutsista yang dari waktu ke waktu terus naik, mensejahterakan prajurit, dan pelayanan (kepada rakyat) yang lebih baik. Meski demikian, total anggaran pertahanan juga ditujukan untuk program-program pertahanan lainnya, seperti:

- 1) Petempuran ruang angkasa (*space warfare*), yang membutuhkan: Roket, pesawat luar angkasa, dan senjata laser.
- 2) Pusat informasi luar angkasa (*space information architecture*), yang meliputi: Penyelidikan, navigasi, komunikasi, dan satelit intelejen elektronik (*electronic intelligence satellites* atau ELINT).
- 3) Sistem pertahanan antirudal (*Anti-ballistic missile defenses* atau ABM), yang mampu beroperasi hingga lebih dari tahun 2020.
- 4) Mempersiapkan astronot-astronot handal, yang berguna untuk mengamankan potensi kepentingan militer dan ekonomi China.
- 5) Rudal nuklir (*nuclear missiles*), dengan jenis/ kapasitasnya: berbahan bakar padat, berdaya-jangkau antarkontinental, serta diluncurkan dari kapal selam (*new solid-fuel intercontinental and submarinelaunched ballistic missiles* atau ICBMs/SLBMs) yang siaga di sekitar dan dekat dengan pantai China.

⁵³ *Ibid.*, hal. 17.

- 6) Senjata berenergi tinggi, seperti senjata gelombang mikro (*high-power microwave weapons*) yang kini sudah disebar.
- 7) Generasi ke-lima pesawat tempur jenis jet, yang saat ini sedang dikembangkan (setidaknya ada tiga unit).
- 8) Pesawat jet tempur dan pengintai, yang kini sedang dikembangkan oleh tiga perusahaan penerbangan local China.
- 9) Kapal selam nuklir berkemampuan menyerang bersenjata rudal balistik, yang saat ini sedang dibangun.
- 10) Pesawat pengangkut personil (*aircraft carriers*), yang menurut informasi seorang perwira TPR AL, kini sedang dibangun berjumlah empat sampai enam unit.
- 11) Rudal balistik antikapal perang, (*antiship ballistic missiles*), senjata khusus yang hanya dibangun oleh China.
- 12) Kapal amfibi penyerang (*large amphibious assault ships*), dengan berat 20000 ton, dan dilengkapi dengan galangan untuk parkir helikopter (*landing helicopter dock*) yang sedang dibangun.
- 13) Pesawat pengangkut berkapasitas 60 ton, yang digagas oleh kosorsium local.
- 14) Kendaraan tempur udara beroda generasi baru, yang sedang dikembangkan oleh TPR AU.

Sejumlah program yang disebutkan pada paragraf sebelumnya menunjukkan China berpandangan global, dan tidak sebatas regional Asia Timur saja. Beberapa program bahkan sudah mulai direalisasikan, dan hanya pembentukan astronot saja yang belum (karena China memproyeksikannya terjadi antara tahun 2020 sampai dengan 2030), tetapi diprediksi akan segera terjadi setidaknya pada dekade ini.

Pada matra angkatan laut, China menaruh perhatian khusus karena kapal perang Amerika Serikat kerap berpatroli di wilayah perairan Asia. China telah memesan kapal yang dilengkapi dua unit rudal penghancur kelas *Sovremenny*

(Proyek-956), selain itu kapal ini dilengkapi dengan senjata rudal SS-N-22. Kedua, pembuatan dan *upgrading* (peningkatan kemampuan) delapan buah kapal selam yang dilengkapi dengan rudal jelajah anti-kapal dan torpedo VA-111 Shkval. Kapal-kapal selam China pun kini telah dilengkapi dengan teknologi propulsi *air-independent* yang menjadikannya mampu diam dan menunggu di bawah permukaan air dalam waktu lama untuk mengejutkan pihak lawan.

TPR AL China memahami bahwa untuk mencapai kemampuan bertahan yang sangat baik, maka mereka harus mampu memantau (menjaga) pergerakan kapal perang musuh yang jauh dari perairan China sekalipun. Pada saat yang sama, untuk menaggulangi konflik perbatasan dan perairan yang melibatkan China dan negara-negara di sekitarnya, TPR AL harus mampu memproyeksikan kekuatannya hingga jauh dari wilayah mereka. samudera luas. Secara berangsur, doktrin TPR AL berkembang menjadi sebuah teori AL, termasuk taktik pertempuran, program persenjataan militer laut lepas (*bluewater*), dan seluruh ajaran kekuatan mentalitas AL (*haiyang yishi*). Wakil Kepala Staf AL TPR, Laksamana Madya Cheng Mingshang, merupakan konseptor yang memperkenalkan doktrin tersebut pada 1991.

Selain angkatan laut, China juga didukung oleh kekuatan angkatan udara yang cukup kuat, di antaranya sekitar 800 unit pesawat tempur termasuk di dalamnya pesawat pembom, pesawat serang darat, pesawat patroli maritim, dan helikopter. Angkatan Udara China memiliki kekuatan sekitar 250.000 personil yang mengoperasikan sekitar 3.000 pesawat tempur dan juga mempunyai 600 sampai 800 sistem rudal. TPR Angkatan Udara China ini tercatat sebagai yang terbesar di Asia dan ketiga terbesar di dunia.

Secara personil, China memiliki pasukan Korps Marinir yang kekuatan utamanya terdiri dari dua brigade bersenjata gabungan dengan 6.000 personil, yang ditempatkan pada Armada Laut Selatan, termasuk infantri, artileri, kavaleri, zeni, komlek, anti-tank, dan personil kawal. Korps Marinir memiliki dua rantai komando paralel, yakni operasional di bawah komandan Armada Laut Selatan dan administrasi latihan, peralatan, perencanaan, personil dan kebijakan, di bawah komando Markas Besar Angkatan Laut di Beijing.

Program senjata nuklir China merupakan salah satu yang tersukses di antara negara-negara pengembang nuklir. Kekuatan nuklirnya sangat efektif. China juga berhasil mengembangkan infrastruktur dan fasilitas rancang bangun, pembuatan, pengujian dan pabrikasi sistem rudal nuklir taktis. Secara umum, China memiliki sekitar 400 *warheads* rudal balistik, yang di antaranya dirancang taktis seperti bom yang dijatuhkan dari pesawat udara dan ranjau darat nuklir.

China merupakan salah satu aktor yang menguasai teknologi angkasa luar selain Amerika Serikat, Rusia dan beberapa negara Eropa Barat. Beberapa contoh prestasi China antara lain telah berhasil meluncurkan satelit-satelit telekomunikasi dan melaksanakan misi penerbangan manusia ke luar angkasa (dua kali pada 2005). China pun melakukan investasi besar dalam pengembangan dan pengerahan sistem berbasis angkasa luar, yakni dengan menempatkan satelit telekomunikasi militer di ruang angkasa, dan dua buah satelit telekomunikasi ganda (untuk keperluan sipil dan militer).

Peningkatan kapabilitas militer China juga terlihat dari kepemilikan mereka dalam bidang teknologi kapal selam, inovasi pesawat tempur multi fungsi, dan kekuatan pasukan darat dengan peningkatan kemampuan serta perangkat sistem persenjataan yang semakin maju. China bahkan tidak asing lagi dalam mengadopsi *targeting system* untuk senjata dengan tingkat akurasi tinggi. Gambarannya, kapabilitas rudal darat-darat China terus meningkat, serta improvisasi pertahanan udara dengan basis darat maupun laut.

Kapabilitas militer China juga semakin mengeksploitasi kemampuan inovasi dengan penggunaan bahan-bahan dan teknologi canggih. Belum lagi program pengembangan senjata nuklir, yang memperoleh perhatian cukup besar. Setiap tahun, China mengalokasikan sekitar lima persen dari dana anggaran pertahanan untuk program pengembangan persenjataan strategis. China bahkan menjadikan Amerika Serikat sebagai target serangan rudal nuklir, apabila negara adikuasa tersebut mengintervensi konflik di Selat Taiwan. China kini tengah memperluas kekuatan rudal nuklir dan memungkinkan kekuatan ini menjangkau banyak kawasan dunia di luar Pasifik. Rudal yang kapasitasnya dapat menjangkau

target di India dan Rusia, sebenarnya juga bisa menjangkau seluruh Amerika Serikat hingga ke selatan Asia-Pasifik, seperti Australia dan Selandia Baru.

China juga memiliki kapabilitas yang cukup kuat dalam bidang kekuatan khususnya (*special force*). Bahkan sebelum Perang Teluk (salah satu tonggak terjadinya modernisasi kekuatan militer China) terjadi, petinggi TPR sudah mempunyai konsep modernisasi militer yang menitik-beratkan kepada kekuatan matra laut dan udara. Pada dasarnya, pencarian China terhadap perbandingan yang tepat di antara empat matra yang ada, sudah menjadi bagian dalam pencarian mereka terhadap kekuatan militer yang berbasis teknologi mutakhir, meskipun restrukturisasi 'sekadar' menjadi bagian pendahulu.

Dua elemen menjadi sangat penting dalam memandu upaya restrukturisasi TPR, yakni pola pikir baru militer dan pengenalan terhadap perangkat keras mutakhir, secara berkelanjutan. Elemen yang disebutkan terakhir itulah, yang akhirnya berkembang di kalangan TPR. Masih menurut para tentara, perang teknologi mutakhir secara alamiah menyebabkan lahirnya perang yang diwarnai strategi saling serang (*offensive war*). Sejak para pasukan khusus dihormati sebagai senjata utama dalam pertempuran agresif, kelompok ini pun mendapat status khusus. Kesimpulannya, China memproyeksikan penggabungan empat matra yang mereka miliki dalam perang di masa mendatang, karena mereka mempunyai peran yang sangat menentukan.

II. 4 Peningkatan Kapabilitas Militer China

Kemajuan China dalam bidang ekonomi berdampak kepada kekuatan militernya, yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar mereka yang menyebutkan bahwa,

Ayat (1): "Kekuatan bersenjata (militer) China adalah milik rakyat. Mereka bertugas untuk memperkuat pertahanan nasional, menahan serangan musuh, mempertahankan tanah air, tenaga pelindung perdamaian penduduk, berpartisipasi dalam pembangunan nasional, dan bekerja keras untuk melayani rakyat. Ayat (2): Modernisasi, pembaharuan, dan pengaturan kekuatan bersenjata (militer) bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan nasional".

Dikaitkan dengan kondisi sekarang, modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), bertujuan melindungi momentum kemajuan ekonomi, terutama dengan cara menciptakan stabilitas dalam negeri serta melindungi aset-aset ekonomi. Sedangkan terkait dengan ancaman separatisme, peningkatan kapabilitas militer China bertujuan untuk menangkal berbagai gerakan, terutama yang selama ini dianggap mampu ‘menggoncang’ stabilitas dalam negeri China, yakni gejolak yang timbul dari Taiwan dan Tibet. Dua wilayah itu, pada derajat yang berbeda, menantang legitimasi otoritas pemerintah pusat China atas mereka. Landasan dari alasan ini adalah nasionalisme dan integritas teritorial.

Sejak 1990, China beberapa kali meningkatkan anggaran militernya dalam jumlah cukup besar. Militer China membangun kapabilitas yang selaras dengan doktrin ‘*limited war under high-technology condition*’. Sebelumnya, China menganut doktrin ‘*people’s war*’ (1935-79), ‘*people’s war under modern conditions*’ (1979-85), dan ‘*limited war*’ (1985-91).

Doktrin “*limited war under high-technology conditions*” atau “*gao jishu tiaojian xia de jubu zhanzheng*” bermula dari kekusaran para petinggi TPR melihat kapabilitas militer Amerika Serikat dalam Perang Teluk Pertama pada tahun 1991. Pada saat itu, para petinggi komando TPR bisa dibilang merasa ‘minder’ terhadap Amerika Serikat, yang memamerkan kemampuannya dalam teknologi pengintaian, intelijen, dan misil pertahanan anti-balistik Patriot.

Selain Perang Teluk Pertama, ada tiga peristiwa lain yang membuka mata petinggi PLA. *Pertama*, Insiden China-Taiwan pada tahun 1996, di mana Taiwan mendapat dukungan dari Amerika Serikat. *Kedua*, keterlibatan langsung NATO dalam konflik di Yugoslavia pada tahun 1999. *Ketiga*, *Operation Enduring Freedom* di Afghanistan oleh Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden George W. Bush, pada 2001.

Empat peristiwa tersebut berpengaruh sangat besar terhadap penilaian strategis China mengenai kondisi geopolitik regional dan internasional. TPR, mau tidak mau, menyesuaikan diri dengan tren RMA (*revolution in military affairs*) yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. TPR mulai menyadari pentingnya aplikasi teknologi informasi dalam medan peperangan kontemporer, contohnya

penggunaan satelit untuk misi intelijen dan *stealth technology*. Singkat kata, China giat berbenah diri untuk menghadapi model peperangan elektronik (*Electronic Warfare/EW*) dan peperangan informasi (*Information Warfare/IW*).

Guna memodernisasi kapabilitas militernya, China di antaranya bekerjasama dengan Rusia dan Uni Eropa (*European Union/EU*). Namun, khusus kerjasama dengan EU, China menghadapi batu sandungan. Sejumlah aktivis LSM di Eropa, menganggap ekspor senjata ke China menyalahi *EU Code of Conduct on Arms Exports*. Selain ekspor, China juga mengembangkan industri strategis dalam negeri.

Pada 2004, China meningkatkan anggaran militernya hingga 18 persen, tahun 2005 sebesar 12,6 persen, dan tahun 2006 sebesar 14,7 persen⁵⁴. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi perdebatan terkait berapa angka sesungguhnya pengeluaran China untuk pertahanannya. Dalam laporan tahunan Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk Kongres tahun 2005 yang tercantum dalam ‘Kekuatan Angkatan Bersenjata China’ mengungkapkan, pengeluaran China dalam bidang militer pada 2005 lebih besar dua sampai tiga kali lipat dibandingkan dengan anggaran resmi 29,8 miliar dollar AS⁵⁵. Meskipun tidak mungkin untuk menghitung dengan pasti total pengeluaran militer di China, perubahan dalam sistem anggaran pertahanan China dan penelitian lebih lanjut menggunakan dokumen berbahasa China, telah mengarahkan ‘The Military Balance’ untuk menentukan metodologi guna menghitung jumlah pengeluaran pertahanan di China, dan menyoroti beberapa masalah yang tersisa dalam upaya ini.

Menurut *The Military Balance 2006*, kekuatan militer China terdiri dari: Tentara aktif 2.255.000, terdiri dari TPR AD 1.600.000 personil, TPR AL 255.000 personil, TPR AU 400.000 personil, dan semi militer 3.969.000 personil dengan

54 China Terus Tingkatkan Anggaran Petahanannya, dalam *Harian Umum Kompas*, edisi Senin, 5 Maret 2007.

55 *The Military Balance 2007*, *op.cit.*, hal. 249.

masa tugas masing-masing dua tahun⁵⁶. Sedangkan tentara cadangan terdiri dari 800.000-an orang.

Pada 2006, China mempublikasikan anggaran pertahannya meningkat dari 244 miliar Renminbi di 2005 ke 280 miliar Renminbi⁵⁷. Data tersebut menunjukkan kenaikan anggaran pertahanan sebesar lebih dari 10 persen dalam tahun ke-15. Bila disesuaikan dengan inflasi, anggaran pemerintah secara riil kini telah tumbuh sebesar 96 persen sejak tahun 2000, dan 300 persen selama satu dekade terakhir⁵⁸.

Data lain seperti yang digambarkan pada tabel di bawah menyebutkan, China menjadi negara di Asia yang paling banyak mengalokasikan anggarannya untuk pertahanan pada 2007. Jumlah anggaran pertahanan China yang hanya 41 miliar dollar AS, bahkan dianggap tidak sepenuhnya benar, karena masih di bawah perkiraan *Department of Defense* (DoD) Amerika Serikat, yang memperkirakan anggaran pertahanan China mencapai antara 99 sampai dengan 140 miliar dollar AS.

Reformasi anggaran sejak 1998 telah membantu mengurangi kesenjangan antara anggaran resmi TPR dan total pendapatan aktual. Dalam kebijakan reformasi anggaran tersebut diatur tentang larangan bagi tentara China untuk melanjutkan kegiatan usahanya, termasuk sebuah praktik yang menghasilkan pendapatan tambahan signifikan, di seluruh unit angkatan bersenjata. Meski tidak diketahui secara pasti berapa banyak usaha yang dibubarkan sejak saat itu, pada akhirnya mereka hanya mempertahankan usaha pertaniannya. Meski reformasi sudah dijalankan, laporan keuangan pertahanan China masih dianggap belum transparan sepenuhnya, sehingga ada beberapa *item* anggaran pertahanan utama yang akan paling sering dimasukkan dalam anggaran pertahanan di negara-negara Barat, yang berada di luar anggaran pertahanan resmi China⁵⁹.

⁵⁶ *The Military Balance 2006, op.cit.*, hal. 264-269.

⁵⁷ *Ibid.*,

⁵⁸ *Ibid.*,

⁵⁹ *The Military Balance 2007, op.cit.*, hal. 249.

Ketika China mempublikasikan 'Buku Putih Pertahanan Nasional' pertamanya pada 1998, sedikit yang diketahui tentang anggaran TPR. Buku Putih lainnya yang diterbitkan pada 2000, 2002 dan 2004, bahkan tidak terlalu detil menjelaskan laporan keuangan, tapi menyediakan penjabaran singkat anggaran keuangan berdasarkan katagori pengeluaran utama, yakni untuk personel, operasi dan peralatan.

Buku Putih edisi 2004 menggaris-bawahi lima alasan di balik tren yang terjadi di anggaran pertahanan resmi dalam beberapa tahun terakhir:

- 1) Kenaikan gaji dan uang saku anggota militer untuk menyesuaikan perkembangan sosial-ekonomi, dan juga kenaikan pendapatan per-kapita, baik di masyarakat pinggiran maupun perkotaan. Kenaikan itu juga menyesuaikan dengan kebijakan kenaikan gaji bagi seluruh PNS. Tak hanya bagi militer aktif, gaji dan pengeluaran harian staf militer (paramiliter) pun sudah ikut naik beberapa kali.
- 2) Pengenalan sistem keamanan sosial bagi para staf militer, termasuk tunjangan ketidakmampuan (cacat) dan asuransi jiwa, subsidi perumahan, asuransi kesehatan bagi staf militer lapangan serta tunjangan yang juga berlaku bagi pasangan (suami/ istri) para staf militer.
- 3) Suntikan dana untuk reformasi organisasi dan struktural angkatan bersenjata, termasuk biaya yang muncul sejalan dengan proses perampingan yang dilakukan dalam tubuh TPR.
- 4) Meningkatkan investasi dalam program 'pembentukan mental militer tingkat tinggi' di dalam angkatan bersenjata, termasuk perbaikan fasilitas pendidikan militer sejalan dengan 'Proyek Strategis TPR untuk orang berbakat'.
- 5) Peningkatan terhadap proses pengadaan peralatan yang lebih modern guna 'mendorong perkembangan persenjataan yang lebih mutakhir'.

Secara umum, peningkatan kapabilitas militer China bisa dibagi menjadi dua tahap besar, yakni.⁶⁰

- 1) Masa Pemerintahan Presiden Deng Xiaoping sampai dengan 2010 bisa disebut sebagai 'era mengejar' persiapan menuju kemungkinan perluasan pengaruh militer, seperti di Selat Taiwan dan Selat Korea, sekaligus menjajaki kemungkinan memperkuat pengaruh/kontrol di Laut China Selatan.
- 2) Tahap menyelesaikan tujuan-tujuan pada tahap sebelumnya, namun lebih khusus memenuhi berbagai tuntutan untuk menjadi kekuatan militer global.

Pada awal Rencana Lima Tahun (Peningkatan Kapabilitas Militer) periode 2006-2010, menandai langkah besar China. TPR saat itu memang belum secara tegas dan nyata berperang melawan Taiwan, namun China dianggap sudah berhasil memberikan pengaruh di kawasan Selat Taiwan, dan berhasil mengembangkan kapabilitas militer yang 'luar biasa'⁶¹. Meski faktanya Taiwan terus mencurigai China, dan berusaha merespon dengan cara mencoba meningkatkan kapabilitas mereka, khususnya dalam persenjataan seperti nuklir, rudal jarak jauh, kapal selam, dan pesawat tempur, tetapi sejumlah pengamat mengatakan bahwa China sulit untuk dihadapi oleh Taiwan.

Dalam laporan 'The Military Balance 2006' disebutkan, China berupaya meningkatkan kemampuan Angkatan Lautnya menjadi tingkat '*blue-water*' dengan menunjukkan kapal selam penyerang tenaga nuklir Type 093 miliknya, yang segera dioperasikan. Sementara, Angkatan Udaranya memiliki kurang lebih 60 pesawat tempur mesin tunggal multifungsi tipe Chengdu J-10, dilaporkan jumlahnya akan diperbanyak menjadi sekitar 300 unit. Tapi jumlah ini kemungkinan juga bisa berkurang hingga menjadi 100 unit, karena mulai dikenalkannya pesawat tempur multifungsi buatan Rusia tipe Su-30MKK. Tak berhenti di situ, China juga berencana membeli rudal jelajah darat tipe 3M14E dari Rusia. Beberapa laporan mengatakan, langkah terakhir ini sangat mungkin,

60 Richard D. Fisher Jr., *op.cit.*, hal. 67.

61 *Ibid.*,

menyusul sistem kontrol rudal tipe *nuclear-powered attack submarines* atau kapal selam penyerang bersenjata nuklir (SSN-27) bisa digunakan bersama rudal tipe 3M14E tadi.

Menurut data Global Future Institute (GFI) pada 2009, TPR Angkatan Laut China memiliki 250.000 tentara yang didalamnya termasuk 35.000 tentara *Coastal Defense Force* (Pasukan Pertahanan Lepas Pantai). Sedangkan pasukan infantri marinir lautnya berjumlah 56000 tentara. Belum lagi termasuk 56000 *Aviation Naval Air* (Pasukan Unit Udara Angkatan Laut).

Bukan itu saja, jumlah kapal selam milik TPR AL China juga boleh dibilang cukup fantastis. Saat ini China memiliki 100 unit kapal selam. Kemajuan yang sangat pesat, mengingat sebelumnya TPR AL China hanya memiliki 35 unit kapal selam, sedangkan kapal pembawa rudal juga meningkat dari 20 menjadi 100 buah⁶².

II. 5 Alasan China Meningkatkan Kapabilitas Militer

Alasan China mengembangkan kapabilitas militernya bisa dilihat dari dua sisi, internal dan eksternal. Secara internal, China mengembangkan kapabilitas militernya demi mempertahankan kedaulatan dan wilayahnya. Dilihat dari sejarahnya, China menjadi sangat traumatik terhadap keterpaksaan menerima dan mengakui eksistensi Negara-Negara Barat, sejak Perang Candu dengan Inggris (1839—1842). Kala itu, China dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, ekonomi, budaya, serta politik Barat yang dibawa Inggris. Akibatnya, pola tradisional yang tadinya berlaku di China mulai goyah. Salah satu contohnya adalah kekuatan dan kekuasaan Kaisar yang makin merosot, sehingga menyebabkan berbagai pemberontakan di dalam negeri dan gangguan Barat.

Selanjutnya, China semakin tidak mampu menghadapi tekanan Barat, dan mereka terpaksa untuk mengakui superioritas militer asing. China bahkan menandatangani perjanjian yang tidak seimbang, karena China tidak mampu

62 Tim Riset Global Future Institute (GFI), Meneropong Kekuatan Angkatan Laut Bersenjata Cina, 2011, <http://forum.detik.com/militer-china-menuju-yang-terkuat-di-dunia-t212674.html>, paragraf 3, (diakses pada 5 Mei 2011).

untuk melindungi wilayahnya dari invasi asing, sehingga akhirnya sebagian besar wilayah China diklaim oleh Negara-Negara Barat.

Sedangkan jika dilihat dari lingkup eksternal, permasalahan China dengan Taiwan yang awalnya merupakan masalah internal, kemudian meluas menjadi masalah dunia internasional. Walaupun eksistensi Republik Rakyat China (RRC) diakui, tetapi Amerika Serikat justru memihak Taiwan. Meskipun hingga kini Amerika Serikat selalu melindungi Taiwan, namun China terus berusaha untuk mengembalikan Taiwan ke dalam wilayah kekuasaannya, karena menurut China hanya ada satu China di dunia, dan Taiwan adalah bagian dari kesatuan atau termasuk ke dalam wilayah China, yakni salah satu provinsinya.

China telah mengesahkan undang-undang antipemisahan, yang memberi wewenang kepada pasukan militer China menyerang Taiwan, sekaligus pijakan legal yang dapat digunakan China untuk menyerang Taiwan. Jika ini terjadi, kemungkinan berperang melawan Amerika Serikat (yang menjadi ‘pelindung’ Taiwan), semakin besar. Tidak hanya itu, propaganda China terhadap dunia internasional agar tidak melakukan hubungan diplomatik apapun dengan Taiwan, berpotensi mendapat perlawanan dari Amerika Serikat dan sekutunya.

Setelah mencapai kemajuan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, pandangan masyarakat dunia internasional justru menjadi ambigu. Di satu sisi, dunia internasional memandang kagum atas kemajuan ekonomi China yang begitu pesat, sedangkan di sisi sebaliknya banyak pula yang mencemaskan pembangunan ekonomi China, karena kemajuan ekonomi China tidak sedikit yang digunakan untuk menopang peningkatan kapabilitas militer mereka. Negara-negara di kawasan Asia pada umumnya, dan Asia Timur pada khususnya, khawatir akan menjadi ‘korban’ persaingan kekuatan militer, terutama antara China, Jepang, Taiwan, dan Amerika Serikat. China yang berpotensi sangat besar menjadi *major regional power*, diprediksi akan meningkatkan persaingan dengan negara-negara di Asia, terutama yang menjadi sekutu Amerika Serikat.

II. 6 Perubahan Doktrin Militer China

Selanjutnya, modernisasi kapabilitas militer pun tidak terlepas dari perubahan doktrin militer pada Tentara Pembebasan Rakyat China (People's Liberation Army/PLA). Prinsip-prinsip yang menjadi pedoman operasi militer, cara mendapatkan dan menggunakan senjata, struktur serta latihan-latihan kemiliteran lainnya ini, jarang mendapat perhatian. Padahal, modernisasi kapabilitas militer, di negara manapun itu, tidak terlepas dari doktrin militer yang mengarahkan proses modernisasi tersebut. Studi terhadap doktrin militer sangat penting untuk menjelaskan lebih jauh tentang strategi termasuk tipe operasi, yang selanjutnya bisa digabungkan dengan struktur kekuatan militer suatu negara, sebelum akhirnya digunakan untuk memperkirakan kekuatan dan aktivitas militer yang sesungguhnya dari suatu negara⁶³.

Pada 1999, doktrin baru resmi diberlakukan terhadap TPR, yakni 'Regulasi Generasi Baru', atau dalam Bahasa Mandarin disebut *gangyao* atau pedoman tertinggi untuk operasi perang. Di dalamnya diatur mengenai penggabungan kekuatan (khususnya logistik) TPR AD, AL, AU dan tentara cadangan dalam sebuah peperangan⁶⁴.

Selain stabilitas dan integritas wilayah, modernisasi militer China pun terkait langsung dengan persepsi ancaman. China sudah melihat kemungkinan jangkauan di luar Taiwan, dengan cara melanjutkan proyek lama militer, yakni membangun sebuah rudal jarak jauh yang memiliki daya jangkau hingga kapal induk Amerika Selatan di Pasifik⁶⁵. China bahkan dianggap memiliki kemampuan untuk 'menyerang' Taiwan dan wilayah Amerika Serikat, yakni Guam. Bisa dikatakan, fokus militer China adalah mengubah keseimbangan militer Asia

63 Richard D. Fisher Jr., *China's Military Modernization Building for Regional and Global Reach (Global Security Watch)*, 2008, (Westport, Connecticut: Praeger Security International), hal. 68.

64 David M. Finkelstein, Thinking about the PLA's Revolution in Doctrinal Affairs, dalam James Mulvenon and David Finkelstein (eds.), *China's Revolution in Doctrinal Affairs: Emerging Trends In the Operational Art of the People's Liberation Army*, 2005 (Alexandria, VA: Center for Naval Analysis and RAND Co.), hal. 11-12.

65 China Perkuat Kekuatan Militer, <http://international.okezone.com/read/2010/08/18/18/363978/china-perkuat-kekuatan-militer.>, 2010, paragraf 4, (diakses pada 18 April 2011).

Timur, yang juga berarti mengancam dominasi militer Amerika Serikat (khususnya di Asia Pasifik).

Potensi China seperti di atas tadi telah melahirkan keinginan Pentagon untuk berdialog dengan China, demi menghindari kesalahan kalkulasi antara dua kekuatan (utama) militer dunia tersebut. Apalagi menyusul laporan Jepang dan Vietnam tentang insiden meningkatnya kekuatan militer China di Laut China Selatan, yang direpresentasikan oleh patroli keamanan.

II. 7 Strategi Militer China

Doktrin pertahanan China disebut dengan doktrin Perang Rakyat (*people's war*) sebagai hasil buah pikiran Mao Zedong dalam bidang militer sejak dekade 1930-an, yang kemudian disistematisasi secara modern oleh Lin Biao⁶⁶. Pada 1960-an, Lin Biao menuangkan pemikirannya dalam tulisannya yang berjudul *Long Live the Victory of People's War*⁶⁷. Pemikiran Mao tentang doktrin Perang Rakyat diterjemahkan dengan istilah *Maoist Triad* yaitu strategi penggerogotan (*attrition*) dalam bentuk pertahanan mendalam (*defense-in-depth*) yang secara operasional dilakukan dalam bentuk taktik bertahan (*defense*), mengendap (*stalemate*), dan menyerang (*offensive*).

Doktrin perang rakyat yang dianut China telah berulang kali dikaji ulang dan terus disesuaikan dengan perubahan, baik karena perubahan lingkungan strategis maupun perkembangan teknologi militer. Seorang akademisi Ilmu Hubungan Internasional bernama David Shambaugh, membagi perubahan-perubahan tersebut dalam empat fase, yakni:

- 1) Fase pertama, disebut fase perang rakyat (*people's war*) yang berlangsung dari 1935 hingga 1979.

66 Paul H.B. Godwin, *The PLA Faces the Twenty-First Century: Reflections on Technology, Doctrine, Strategy, and Operations*, dalam James R. Lilley dan David Shambaugh (eds.), *China's Military Faces the Future*, 1999, M.E. Sharpe, hal. 44-48.

67 Lin Biao, *Long Live the Victory of People's War*, Lin Biao Reference Archive (Online Version), 2003, http://www.marxists.org/reference/archive/linbiao/1965/09/people's_war/index.htm, paragraf 5, (diakses pada 18 April 2011).

- 2) Fase ke-dua, disebut dengan fase perang rakyat disesuaikan dengan perkembangan modern (*people's war under modern condition*) yang berlangsung dari 1979 hingga 1985.
- 3) Fase ke-tiga, disebut dengan fase perang terbatas (*limited war*) atau perang lokal (*local war*) yang berlangsung dari 1985 hingga 1991. Fase dan penggunaan terminologi perang terbatas (*youxian zhanzheng*) dan perang lokal (*jubu zhanzheng*) adalah hasil pemikiran Deng Xiao Ping yang mengatakan bahwa perang yang akan datang akan bersifat lokal dan terbatas. Perang Iran-Irak menjadi pembeda terhadap pemikiran Deng Xiao Ping. Pemikiran ini berarti pengakhiran terhadap konsep perang total (*zongti zhanzheng*).
- 4) Fase ke-empat, disebut dengan fase perang terbatas dalam kondisi teknologi tinggi (*limited war under high technology condition*) yang berlangsung sejak awal tahun 1990-an.

Pedoman utama strategi operasional China disebut 'Pertahanan Aktif', yakni 'China tidak memulai perang atau melawan agresi'. Pada Konferensi Shangri-La di Singapura pada Juni 2007, yang diselenggarakan oleh International Institute for Strategic Studies, Direktur Departemen Kedua TPR (kepala intelijen), Letnan Jenderal Zhang Qinsheng, berusaha untuk meyakinkan pendengar dengan memberikan pernyataan mengenai standar kebijakan pertahanan China, yakni "Strateginya, kita bertahan, membela diri dan segera akan menang setelah musuh menyerang duluan. Dengan kata lain, China tidak akan menembak duluan"⁶⁸. Pendekatan tersebut konsisten dengan prinsip China kuno yang bertindak berhati-hati sebelum menghadapi perang atau berperang. Perang hanya ditempuh untuk tujuan yang benar, menghormati sesama, dan menghargai hidup.

Di lain pihak, pedoman utama strategi tersebut tidak sama dengan apa yang tertera di dalam Buku Cetak Universitas Pertahanan Nasional China. Pentagon bahkan menemukan 'indikasi' yang tertulis di dalam buku tersebut

⁶⁸ Richard D. Fisher Jr., *op.cit.*,

adalah inti “Pertahanan Aktif”, yakni untuk mengambil inisiatif dan memusnahkan musuh⁶⁹. Pada buku lain (Strategi Ilmu Militer) disebutkan, “Dengan dibekali teknologi tinggi, cara bertahan bukanlah semata menunggu musuh menyerang terlebih dahulu tanpa bertindak (pasif)”. Hal yang kemudian mengubah definisi ‘definisi pertama’ secara fundamental. “Jika keberadaan suatu kelompok bersenjata seperti aliran agama garis keras, kaum separatis maupun teroris internasional sudah mulai mengancam kedaulatan negara, itu sudah bisa diartikan dengan melakukan tembakan pertama dilihat dari kaca mata strategi dan politik”.

Teori baru itu akan menjelaskan tindakan yang militer China ambil ketika menghadapi pendudukan wilayah Tibet dan East Turkestan (Xinjiang). Kelompok tersebut mengancam karena masuk dalam kriteria aliran agama garis keras, atau ketika militer China menghadapi kaum separatis di Taiwan.

Pada 2007, Pentagon menyimpulkan bahwa, “Perkembangan kekuatan militer China antara lain: sistem komunikasi militer jarak jauh, perintah kontrol udara dan komunikasi pesawat, kapal selam berdaya tahan lama, kendaraan tempur tak berawak udara, dan rudal presisi kendali jarak jauh, yang menunjukkan bahwa TPR menghasilkan kapasitas yang lebih besar dalam aktivitas serangan balik militer”.

Secara umum, gambaran Fisher tentang evolusi doktrin dan strategi TPR China itu dibagi berdasar periode waktu. Sedangkan sejumlah faktor menjadi indikatornya, seperti: skala, jenjang/ durasi, peta kekuatan (postur), dinamika, kekuatan pasukan dan teknologi, serta persenjataan. Pada dasarnya, evolusi tersebut dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Semakin mutakhir teknologi yang ditemukan, maka persenjataan pun semakin canggih sekaligus praktis. Efisiensi personil tentara pun bisa dicapai, sehingga strategi atau taktik perang berubah tidak lagi mengandalkan tenaga tentara, melainkan kemampuan memanfaatkan senjata canggih yang ada. Gambaran umumnya seperti tabel berikut:

⁶⁹ *Ibid.*,

Tabel II. 2 Evolusi Doktrin & Strategi TPR China (Richard D. Fisher Jr.)

Periode	Skala	Jenjang/ Durasi	Postur	Dinamika	Kekuatan Pasukan & Teknologi	Persenjataan
Sebelum 1979: Doktrin Perang Rakyat	Awal, total, perang nuklir	Bertahan lama	Dominasi bertahan	Dinamis, menekan musuh sampai ke dalam	Kekuatan manusia- intensif, 'inferior perangi superior'	Kombinasi milisi reguler & lokal
Setelah 1979: Perang Lokal Dalam Pemanfaatan Teknologi	Utama, perang total	Tidak diakhiri	Dominasi bertahan	Memposisikan di perbatasan dan kota-kota	Kurang bersifat manusia- intensif	Kombinasi senjata (mayoritas kekuatan darat)
Setelah 1985: Perang Lokal Dalam Dunia Modern	Perang lokal	'Peperangan singkat, resolusi cepat'	Menyerang: inisiatif menyerang lebih dulu	Dinamis, menempatkan pasukan dalam posisi menyerang	Kekuatan khusus (elit) dan senjata tajam	Kombinasi senjata (mayoritas kekuatan darat)
Setelah 1996: Perang Lokal Dalam Dunia Mutakhir	Perang zona perang	'Peperangan singkat, resolusi cepat'	Dominasi menyerang	Dinamis, menempatkan pasukan dalam posisi menyerang	Dibentuk ' kekuatan khusus (elit) dan senjata tajam'; 'superioritas lokal & temporer'	Latihan gabungan antarangkatan
Setelah 2002: Perang Lokal Dalam Era Informasi	Kampanye & peperangan	'Peperangan singkat, resolusi cepat'	Dominasi menyerang	Proyeksi dinamisasi kekuatan	Dibentuk & dilengkapi teknologi informasi	Operasi militer gabungan terpadu

Sumber: Richard D. Fisher Jr., *China's Military Modernization Building for Regional and Global Reach (Global Security Watch)*, 2008, hal. 70.

II. 8 Strategi Induk (*Grand Strategy*) Peningkatan Kapabilitas Militer China

Konsep utama pemikiran strategis lahir dari pemikiran yang terkait dengan kemampuan dan cara-cara sebuah negara dalam mengontrol aspek-aspek lingkungan internasionalnya. Setidaknya, ada empat aspek yang berhubungan

dengan konsep utama tersebut, yakni strategi, doktrin, kebijakan, dan aksi pada masa kontemporer. Dari empat aspek tersebut kemudian diturunkan ke dalam empat bagian pokok pemikiran, yakni yang pertama adalah kebijakan keamanan (security policy), yang bertujuan untuk menciptakan kondisi politik nasional dan internasional, yang dapat melindungi tujuan-tujuan dasar sebuah negara. Ada tiga dimensi yang dibahas dalam kebijakan pertahanan, salah satunya adalah kebijakan bidang militer yakni yang terkait langsung dengan angkatan bersenjata, dan penggunaan kekuatan militer.

Pokok pemikiran selanjutnya adalah kebijakan ekonomi dan diplomatik, yang difokuskan kepada bidang ekonomi dan strategi revolusi. Artinya, kebijakan pertahanan diarahkan pada pengembangan strategi untuk menghadapi 'perang regional dan terbatas'. Pengembangan strategi pertahanan nasional didasarkan kepada pertahanan secara aktif yang lebih komprehensif. Jika dikaitkan dengan strategi induk (*grand strategy*) pertahanan China, maka mereka bisa dikatakan memanfaatkan seluruh potensi/kemampuan negara, untuk mencapai tujuan politik melalui pembangunan ekonomi, peningkatan kapabilitas militer, sumber daya alam dan manusianya. Sedangkan secara khusus, *grand strategy* pertahanan China bertujuan untuk menjamin kelangsungan efektifitas dari kekuatan militer, yang dipacu kekuatan moral rakyat dalam rangka melemahkan perlawanan musuh.

Pengembangan strategi induk pertahanan China juga dilakukan melalui pendekatan tidak langsung, yang berarti ada usaha untuk menggoyahkan keseimbangan 'musuh' secara psikis dan fisik. Dampak selanjutnya, musuh akan berkurang dalam hal kemampuannya untuk melawan. Ini terkait dengan doktrin perang di China, yakni Perang Rakyat, yang dikenalkan oleh Pemimpin Mao Zedong, dan Doktrin Perang Rakyat Modern, hasil pemikiran Deng Xiaoping. Dua pemikiran pemimpin legendaris China ini menekankan aspek pertahanan teritorial dalam kebijaksanaan keamanan China. Lebih khusus, doktrin yang modern menuntut China untuk mampu menahan serangan musuh dan mengubah perimbangan kekuatan.

Aspek ke-tiga terkait dengan kebijakan, yakni *Comprehensive National Power* (CNP). Konsep ini merujuk kepada kekuatan secara umum (*tangible or intangible*) dari sebuah negara. Tidak seperti kebanyakan konsep kekuatan politik Barat, bagi China, CNP dapat diperhitungkan secara matematis dan terdapat serangkaian indikasi yang bertujuan untuk mengukur kekuatan suatu negara, sehingga konsep ini sangat penting bagi pemikiran politik kontemporer China. Hasil-hasil perhitungan selanjutnya menjadi bahan-bahan prediksi, yang terdiri dari perhitungan faktor militer (*hard power*) dan faktor ekonomi serta budaya (*soft power*). CNP diketahui sebagai konsep dasar politik China, dan tujuan utama China adalah untuk memaksimalkan CNP-nya.

Aspek aksi menjadi bagian berikutnya. China dilandasi oleh suatu teori pembagian dunia, yakni ‘Teori Tiga Dunia’ yang lahir dari pemikiran Pemimpin Mao Zedong. Dalam teori ini, kawasan Asia-Pasifik menempati prioritas tertinggi dalam lingkup perhatian China, karena negara-negara kunci yang terlibat langsung dengan kepentingan mereka secara geografis terletak di kawasan ini. Uni Soviet dan Amerika Serikat digolongkan dalam dunia pertama, kemudian Jepang, Eropa, dan Kanada dalam dunia kedua, serta negara-negara sedang berkembang seperti negara-negara anggota ASEAN dan seluruh Afrika, digolongkan dalam dunia ketiga, dan China termasuk di dalamnya. Konsep pemikiran Mao ini mendorong aksi China yang ingin membentuk suatu persatuan guna menghadapi negara-negara hegemonis, sehingga persatuan dunia ketiga dimaksudkan untuk menghadapi baik dunia pertama maupun kedua. Untuk itu, sejak awal 1970-an politik luar negeri China lebih mengedepankan kepentingan keamanan dan kepentingan ekonomi daripada kepentingan ideologi.

China pernah merasa terganggu dengan ditandatanganinya Deklarasi Aliansi Keamanan untuk abad ke-21 antara Amerika Serikat dan Jepang di penghujung abad 21. Dua negara tersebut bahkan memperluas aliansi tersebut dengan mengajak kerjasama Singapura (2004), India (2006), dan Australia (Maret 2007), sehingga China menganggap pembentukan aliansi tersebut merupakan upaya ‘lawan-lawannya’ dalam merespon peningkatan kapabilitas militer China.

China pun bereaksi. Untuk meredam bahkan meniadakan keberadaan aliansi Amerika Serikat dan Jepang, China menjalankan strategi diplomatik yang mendukung penuh rezim keamanan multilateral di kawasan Asia-Pasifik yakni ASEAN Regional Forum (ARF). Namun, di awal 2003 Amerika Serikat menyatakan membuka kembali program ‘perang bintangnya’ (*star wars*) yang digabungkan dengan rencana pembangunan sistem pertahanan rudal nasional (*National Missile Defense System*) di wilayah nasional setiap negara sekutunya seperti di Jepang, Inggris, Korea Selatan, dan Australia untuk menghadang China.

Kondisi ini memaksa China untuk mempercepat proses modernisasi sistem pertahanannya, sehingga yang pertama kali diincar China adalah kemampuan menembak sasaran musuh di ruang angkasa. Alasannya, dalam kalkulasi militer, baik strategi pertahanan perang bintang maupun sistem pertahanan rudal nasional, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya hanya dapat dipatahkan secara dini di luar angkasa. China merasa sudah waktunya Amerika Serikat (sang hegemon) keluar dari kawasan Asia, sekaligus menghilangkan pengaruh sang adikuasa tersebut yang sudah meluas lebih dari dua dasawarsa (sejak pascaberakhirnya Era Perang Dingin di awal 1990-an).

II. 9 Sejarah Konflik Selat Taiwan

Konflik Selat Taiwan berpangkal pada kebijakan ‘Satu Cina’ yang sejak lama dilancarkan oleh China dengan tujuan (utama) untuk menyatukan Taiwan, berdasarkan pandangan bahwa Taiwan merupakan ‘provinsi pembangkang’. Status Taiwan sebagai ‘provinsi pembangkang’ diperjelas oleh sikap mereka yang mandiri, membangun pulau dan rakyatnya sendiri tanpa meminta izin dan restu apalagi dana, dari ‘sang induk’, China. China bahkan seringkali menyatakan akan menyerangnya jika waktunya sudah tepat⁷⁰. Salah seorang Presiden China, Deng Xiaoping, bahkan pernah menyatakan akan negaranya tidak akan segan menyerang dan membawa kembali Taiwan ke dalam kekuasaan China jika:⁷¹

- 1) Taiwan membangun kekuatan nuklirnya;

⁷⁰ Aco Manafe, Konflik Selat Taiwan: Politik Satu China Paradigma Perang Dingin, dalam *Harian Umum Suara Merdeka*, edisi Minggu, 14 Desember 2003.

⁷¹ *Ibid.*,

- 2) Jika hubungan Taiwan menjalin hubungan dengan Rusia;
- 3) Terjadinya kerusuhan besar-besaran (*widescale*) di Taiwan;
- 4) Jika Taiwan mendeklarasikan kemerdekaannya; dan
- 5) Jika Taiwan menolak untuk melakukan unifikasi dengan Cina.

Pengertian ‘provinsi pembangkang’ itu pun datangnya sepihak dari Beijing, yang melancarkan diplomasi aktif dan represif sejak Masa Perang Dingin, atau tepatnya setelah 1972. saat itu, Perdana Menteri China Chou Enlai dan Presiden Richard Nixon (Amerika Serikat) setuju mengakui hanya ada ‘Satu Cina’, yakni Republik Rakyat China (RRC). Kebijakan Amerika Serikat yang ‘merangkul’ Beijing saat Perang Dingin, bertujuan agar Washington bisa menyatukan kekuatan dengan China untuk menghadapi ‘sang musuh besar’, Uni Soviet. Sedangkan bagi China, membina hubungan harmonis dengan Amerika Serikat bertujuan demi mengungguli Uni Soviet, dan ‘terperangkap’ oleh politik *détente* Amerika Serikat⁷². Konsekuensinya, Amerika Serikat harus ‘mengorbankan’ hubungannya dengan Taiwan, negara pulau berpenduduk 16 juta di masa itu (saat ini 23 juta). Tak hanya itu, Taiwan juga dicampakkan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Tetapi secara diam-diam, Amerika Serikat mendukung Taiwan baik politik maupun militer, sebagai sebuah sekutu tradisional. Sebuah kesepakatan bernama *Taiwan Relations Act* (TRA) dicapai pada 1979 yang isinya menyatakan bahwa, Amerika Serikat wajib membantu Taiwan dari serangan asing⁷³. Lewat TRA juga, Taiwan diberi otoritas (kewenangan) untuk mendapat bantuan persenjataan dari Amerika Serikat untuk kepentingan bertahan (*defensive*). Berdasarkan TRA tersebut, pada Agustus 2010 Amerika Serikat mengizinkan Taiwan untuk mengakuisisi dua kapal *frigates* kelas Oliver Hazard Perry bekas Angkatan Laut Amerika Serikat (U.S. Navy SEAL). Kebijakan ‘politik dua sisi’ Amerika Serikat juga berdasarkan status Taiwan sebagai sekutu dagang, politik dan ideologi

⁷² *Ibid.*,

⁷³ A. Dahana, *Taiwan Beban Berat Hu, Ma, Obama*,

<<http://m.inilah.com/read/detail/62655/taiwan-beban-berat-hu-ma-obama>>, paragraf 8, (diakses pada 26-02-11).

nonkomunis, Taiwan ‘dimanfaatkan’ untuk mengimbangi kekuatan China di Selat Taiwan.

Pada sisi lain, hubungan bilateral Amerika Serikat dengan China didasari persamaan status sebagai negara adidaya. Niat awalnya, China ingin menyamakan Taiwan dengan Hong Kong dan Makao, yang selama ratusan tahun disewa Inggris dan Portugal, dan solusinya adalah ‘One Country-Two System’. Ironisnya, China tidak pernah lagi mencatat tentang status Taiwan sebagai bagian sah, protektorat, provinsi atau jajahan China, sehingga niat tersebut dianggap ‘gagal’.

Konflik berkepanjangan yang terjadi di Selat Taiwan juga, dipicu dengan permintaan Taiwan akan persenjataan canggih dari Amerika Serikat. Melalui persenjataan tersebut, Taiwan berusaha untuk membentuk citra sebagai negara yang memiliki kekuatan (*power*), seperti definisi yang dikemukakan oleh Charles P. Kindleberger, yakni kekuatan yang bisa digunakan secara efisien dan efektif guna mendukung suatu tujuan khusus⁷⁴. Dalam fenomena Taiwan-Amerika Serikat, selain mempunyai wewenang untuk membeli atau mendapat bantuan senjata dari Amerika Serikat, Taiwan juga memiliki ‘keuntungan’ lain, yakni mendapat dukungan Amerika Serikat untuk melindungi (*back up*) mereka dalam menghadapi ancaman dari China.

II. 10 China Dalam Konflik Selat Taiwan

Penyatuan nasional merupakan salah satu dari tiga tugas pemerintahan bersejarah China untuk abad baru. Sejak akhir 1970-an, China telah bertekad bahwa penyatuan ini akan dapat tercapai dengan damai melalui dialog di Selat Taiwan⁷⁵. China menempuh jalan panjang untuk penyatuan ini, dan ini terwakili oleh para pemimpin China yang merasa sudah cukup sabar, fleksibel, berorientasi ke depan dan murah hati. Lebih jauh, para pemimpin China

74 James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff, Jr., *Teori-Teori Hubungan Internasional*, terjemahan M. Amien Rais, Harwanto Dahlan, dan Tulus Warsito, 1995, (Yogyakarta: UMY), hal. 174.

75 Andrew Scobell, *China’s Military Threat to Taiwan in The Twenty-First Century: Coercion or capture?*, dalam Martin Edmonds and Michael M. Tsai (eds.), *Taiwan’s Defense Reform*, 2006, (New York: Routledge), hal. 29.

menawarkan Taiwan ‘otonomi seluas-luasnya’. Artinya, mereka tetap dapat mempertahankan sistem perekonomian dan sosial pascapenyatuan.

Meski kebijakan China terhadap Taiwan lebih lunak pasca-Pemerintahan Mao, Beijing selalu menolak untuk tidak menggunakan kekuatan demi mencapai penyatuan. China melihat peran kekuatan militer bisa mencapai penyatuan dengan Taiwan, sehingga para pemimpinnya memberi pilihan, yakni dengan jalan memaksa (*coercion*), yang berarti mencegah Taiwan untuk memperjuangkan kemerdekaan, atau mencaplok untuk menguasai (*capture*), berarti melibatkan penggunaan kekuatan militer yang cukup untuk mengambil alih kendali. sekaligus mendorong Taiwan untuk melakukan penyatuan.

Untuk mengetahui alasan China yang bersikeras menggunakan kekuatan militer untuk menyatukan kembali Taiwan, kita harus bisa menaksir pola pikir strategis yang China gunakan, khususnya cara para petinggi China melihat keseluruhan situasi (*daju*), dan juga tren (*qushi*) di masa itu, yang menjadi salah satu kuncinya. Dalam kata lain, kita perlu memperhatikan cara China dalam menaksir keseluruhan situasi dan tren, yang tengah terjadi di Semenanjung Taiwan.

Berdasarkan Buku Putih Pertahanan China yang diluncurkan pada Desember 2002, pola dasar dan tren perkembangan di Semenanjung Taiwan cenderung tetap. Dokumen tersebut menunjukkan tren positif, yang menyebutkan bahwa, “Bangsa Taiwan lebih vokal untuk mendapatkan ketenangan, kedamaian dan perkembangan. Pertukaran perekonomian, perdagangan, budaya dan pekerja antarpulau semakin banyak. Serta dibukanya jalur telekomunikasi jalur udara dan laut antarkedua wilayah menunjukkan tren positif”⁷⁶.

Di sisi lain, Buku Putih Pertahanan China juga menunjukkan beberapa tren negatif, di antaranya suhu tinggi dari akar masalah antara China-Taiwan tidak berubah sama sekali, serta pendirian para pemimpin Taiwan juga tetap tidak berubah, yakni menolak penyatuan antara China dan Taiwan. Para pemimpin

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 30.

Taiwan bahkan mengizinkan berkembangnya gerakan separatis, dan melakukan semua jenis gerakan separatis dengan menggunakan taktik tambahan.

Faktor lain yang ikut mewarnai peta perlawanan Taiwan sejak akhir 1980-an adalah perubahan sistem politik yang terjadi di lingkungan domestik mereka, yaitu perubahan dari sistem represif menjadi demokratis. Sejumlah akademisi memperkirakan, kekhawatiran China akan mendorong Taiwan lebih jauh menuju kemerdekaannya tanpa dipengaruhi tindakan represif dari tentara China.

Pemikiran negatif China tentang kemerdekaan Taiwan terus berkembang hingga pertengahan 1990-an. Peristiwa Presiden Taiwan saat itu, Lee Teng-hui, yang berkunjung ke Amerika Serikat dalam lawatan reuni ke almahalnya di Cornell University di Ithaca, Juni 1995, menjadi titik acuannya⁷⁷. Apalagi lawatan Presiden Lee itu bersamaan dengan persiapan pemilihan presiden Taiwan pada Maret 1996.

Satu dasawarsa setelahnya, China semakin 'marah' terhadap Taiwan. Referendum yang diselenggarakan bersamaan dengan pemilihan presiden Taiwan pada Maret 2004 oleh Presiden Taiwan pada saat itu, Chen Shui-bian, dianggap China sebagai langkah Taiwan menuju kemerdekaan sekaligus gerakan anti-China. Pemimpin China menuduh langkah tersebut terkait dengan upaya sebelumnya oleh Presiden Lee Teng-hui pada pertengahan 1990-an, serta artikel Lee yang diterbitkan pada 1999 yang di dalamnya terdapat artikulasi konsep hubungan lintas-Selat, yang Presiden Lee sebut sebagai hubungan 'antarnegara'.

Sejumlah 'langkah negatif' Taiwan pada akhirnya menyebabkan China semakin tidak sabar menghadapinya. Para pemimpin China di awal abad 21, menjadi cenderung tidak bervisi jangka panjang dalam melihat permasalahan ini. Apalagi China juga punya target penyatuan China-Taiwan.

Terlepas dari lingkup tren negatif seperti disebutkan di paragraf-paragraf sebelumnya, hingga pertengahan 1990-an, China memegang kepercayaan bahwa hubungan mereka dengan Taiwan akan semakin baik, atau bisa bersatu kembali. Dari sisi Taiwan, mereka secara tidak sadar dan tidak dapat mengelak, semakin

⁷⁷ *Ibid.*,

akrab dengan China seiring semakin solidnya angka perdagangan dan investasi kedua negara, serta perpindahan warga antarpulau.

Penggunaan kekuatan militer oleh China demi menuntaskan misi mereka untuk menyatukan kembali Taiwan, sempat diperkirakan akan terjadi, setelah pada November 2003, Mayor Jenderal Wang Zaixi dari Tentara Pembebasan Rakyat pernah menyatakan, “Jika otoritas Taiwan berkerjasama dengan semua kekuatan ‘separatis’ pro-kemerdekaan secara terbuka melakukan kegiatan perlawanan dan menantang prinsip ‘Satu Cina’, penggunaan kekerasan mungkin tak akan terhindarkan”. Namun perkiraan tersebut tidak menjadi kenyataan, dan para analis justru memperkirakan langkah pemaksaan (*coercion*) lebih banyak dipilih oleh para pemimpin China untuk mengakhiri kasus China-Taiwan ini, daripada langkah ambisius seperti mencaplok untuk menguasai *capture*. Meski demikian, para analis juga memperkirakan China masih terus mempersiapkan operasi militer untuk menghentikan langkah Taiwan.

Berangkat dari aksi Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat China di Selat Taiwan pada 1995-1996, yang dianggap berhasil ‘menakut-nakuti’ Taiwan, hasil analisis sejumlah akademisi justru menyimpulkan, Pemerintah China perlu mempertimbangkan langkah pemaksaan (*coercion*) yang mereka tempuh dalam menghadapi Taiwan⁷⁸. Meski China dianggap berhasil menerapkan langkah pemaksaan mereka, respon terhadap isu artikel ‘antarnegara’ di 1999, Pemilihan Umum Presiden di Taiwan pada 2000-an, serta peluncuran Buku Putih Pertahanan China pada Februari 2000 juga, dianggap minim. Taiwan dinilai para analis cenderung ‘adem-ayem’ saja menghadapi tindakan China.

Sejumlah pemimpin China akhirnya menyadari bahwa tindakan pemaksaan yg diambil para pendahulunya pada periode 1995-1996, bersifat kontraproduktif terhadap tujuan penyatuan yang telah dicanangkan. Sebaliknya, langkah-langkah tersebut justru mendekatkan Taiwan pada tujuan kemerdekaan mereka. Di sisi lain, Taiwan juga tidak menyadari tujuan China, sehingga untuk

78 Andrew Scobell, *China’s Use of Military Force*, hal. 189, dan Robert S. Ross, *The 1995–96 Taiwan Strait Confrontation: Coercion, Credibility, and the Use of Force*, dalam *Jurnal International Security*, edisi ke-25, volume (2), 2000, hal. 87-123.

menarik perhatian Taiwan di awal abad 21, China perlu meningkatkan level pemaksaan (*coercion*) mereka.

Menurut Scobell, ada sejumlah langkah pemaksaan (*coercion*) yang bisa dilakukan China tanpa harus melibatkan peperangan dalam skala besar, yaitu:⁷⁹

- 1) Pengujian rudal balistik dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan ketika 1995-1996.
- 2) Memblokade lautan di sekitar Taiwan dengan menggunakan kekuatan kapal laut, kapal selam, pesawat tempur dan pertambangannya. Tujuannya untuk menghalangi Taiwan mendapatkan suplai persenjataan dari luar negeri. China bisa beralasan menetapkan daerah dilarang melintas, salah satunya karena kawasan tersebut ada barang tambang yang sedang digali.
- 3) Blokade pulau terpencil Taiwan, misalnya di Taiping Dao atau Kepulauan Pratas. Risikonya lebih kecil ketimbang memblokade pulau-pulau utama Taiwan seperti Quemoy atau Matsu.
- 4) Penyitaan Taiping Dao atau Kepulauan Pratas tetap akan berdampak, dan Taiwan pasti mengetahui maksud China.

Meski begitu, tidak ada jaminan bagi langkah-langkah pemaksaan (*coercion*) yang dilakukan China itu akan efektif. Mereka perlu alternatif lain. Walau para pemimpin China juga sepertinya lebih suka menghindari operasi militer untuk ‘menguasai’ Taiwan, pilihan melakukan langkah pencaplokkan untuk menguasai (*capture*) tetap perlu dipertimbangkan. Meski langkah itu lebih mahal, lebih beresiko, dan tetap tidak menjamin tercapainya tujuan penyatuan, berdasarkan pengamatan di lapangan, publikasi militer dan perencanaan militer China, kita bisa mengetahui adanya skenario penyerangan terhadap Taiwan.

Jika langkah *capture* diambil para Pemimpin China, ada beberapa prinsip yang harus mereka jadikan acuan, yakni:

- 1) Menjaga tingkat peperangan dan kerusakan akibat perang pada tingkat minimum. Artinya, langkah *capture* jangan sampai terlalu merusak

⁷⁹ Andrew Scobell, *Ibid.*, hal. 32.

infrastruktur Taiwan, karena dampak dari segi ekonominya akan sangat terasa. Seperti proses kembalinya Hongkong, China juga perlu mempertimbangkan potensi Taiwan yang telah mencapai kemajuan dalam bidang ekonomi. Dalam istilah lain, Chian jangan sampai ‘membunuh angsa bertelur emas’.

- 2) Usahakan peperangan berlangsung sesingkat mungkin. Tujuannya, agar Taiwan tidak mempunyai waktu untuk minta bala bantuan dari negara-negara tetangga, ataupun mengembangkan strategi dan senjata. Alasan kedua, agar China tidak terlalu menghambur-hamburkan keuangan negaranya untuk sebuah peperangan.
- 3) Mengatur kebutuhan perang seefektif mungkin. Meski militer Taiwan dikenal sebagai ‘pasukan yang bertangan pendek dan berkaki lambat’, tetapi tidak menutup kemungkinan mereka akan memperbaiki diri. Karenanya, China bisa memanfaatkan potensi mereka yang mempunyai rakyat sangat banyak, dengan cara mempersenjatai rakyat sipil untuk ikut berperang bersama militer melawan Taiwan ketika dibutuhkan. Intinya, langkah ini cukup efektif dan efisien untuk dijadikan strategi perang melawan Taiwan. Tetapi pertimbangan lainnya, rakyat China harus diupayakan berada dekat dengan ‘zona aman’ (*comfort zone*) dan TPR hanya menginstruksikan kepada mereka apa yang telah diajarkan (tidak melebihi perintah bagi militer).

Ada dua pilihan strategi (langkah) yang bisa dilakukan China dalam upayanya menyatukan kembali Taiwan, yang mempertimbangkan tingkat (*level*) strategi dan operasionalnya. Dilihat dari tingkat (*level*) strategi, China harus memperhatikan tipe tentara Taiwan yang cenderung berani mengambil risiko, sehingga China wajib menekankan aspek kehati-hatian, perhitungan akurat dan penggunaan sinyal⁸⁰. Pertimbangan berikutnya berdasarkan kepada pemikiran

80 Rekomendasi tersebut disampaikan oleh Allen Whiting dan peneliti awal lainnya dalam studi kekuatan China sejak 1949. Studi awal ini berdasarkan keterbatasan bukti dan minimnya penggunaan logika deduktif. Studi terbaru akhir-akhir ini berdasarkan banyaknya sumber penelitian utama yang mengungkapkan adanya kemauan dari pemimpin China untuk mengambil resiko besar yang sudah diperhitungkan, dalam Andrew Scobell, *Ibid.*, hal. 35.

para pemimpin China yang secara tegas hanya akan menggunakan kekuatan militer untuk pertahanan diri (bukan untuk menyerang duluan). Ini ada hubungannya dengan prinsip China yang *active-defense* itu. Tapi seprtinya mereka tidak akan menngkultuskan pertahanan sebagai strategi utama.

Terlepas dari jenis strategi (langkah) yang digunakan China terhadap Taiwan, *coercion* atau *capture*, ancaman militer yang diberikan China terhadap Taiwan maupun sebaliknya, harus dilihat secara cermat. Praktiknya, perbedaan antara *capture* dan *coercion* cukup membingungkan. Dua strategi ini bahkan tidak saling menguntungkan ataupun bisa dikombinasikan. Contohnya, hasutan perang di Selat Taiwan oleh Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) China bisa berubah menjadi invasi sungguhan terhadap Taiwan, atau dengan kata lain bisa merupakan latihan menyelidik atau bahkan penipuan. Pada skenario strategi *capture*, serangan udara dan rudal cepat dan dapat digunakan dalam kombinasi dengan pasukan invasi laut, menghasilkan kekuatan yang lebih solid.

Berdasarkan laporan tahunan tentang Kekuatan Militer China yang diterbitkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, jika China menerapkan strategi *coercion*, maka mereka akan melancarkan serangan langsung terhadap pemimpin Taiwan⁸¹. Bisa jadi pemimpin Taiwan itu diculik diisolasi dan dipaksa untuk menyerah.

Kaitannya dengan pertempuran konvensional, Amerika Serikat memperkirakan China akan melakukan beberapa taktik alternatif selain melancarkan serangan militer langsung terhadap Taiwan, seperti:⁸²

- 1) Latihan militer yang bersifat provokatif, dan uji rudal;
- 2) Aktivitas udara yang bersifat provokatif di sekitar Taiwan;
- 3) Serangan rudal skala kecil;

81 Ming-Shih Shen dan Chen-Tin Tsai, *An Analysis Of The Republic Of China's Military Organization And Force Structure*, dalam Martin Edmonds and Michael M. Tsai (eds.), *Taiwan's Defense Reform*, 2006, (New York: Routledge), hal. 97-98.

82 *Ibid.*,

- 4) Serangan rudal skala menengah yang ditujukan untuk menghancurkan sistem perekonomian dan pertahanan Taiwan;
- 5) Pemasangan ranjau dasar laut dan meluncurkan serangan dengan kapal selam terhadap kapal dagang Taiwan, untuk mencegah Taiwan berkomunikasi dengan negara lain melalui laut;
- 6) Merebut pulau-pulau lepas pantai Taiwan seperti Pescadores, Paracel dan Kepulauan Spratly;
- 7) Penyerangan dan pelumpuhan rudal dan pertahanan udara Taiwan.

Berdasarkan argumen dasar realis yang menitikberatkan pada struktur sistem internasional yang anarki, dimana negara merupakan unit yang mandiri dan cenderung berkompetisi, maka strategi keamanannya cenderung ‘agresif’, yakni mengutamakan unsur-unsur ancaman dengan menggunakan kekuatan (militer), dalam rangka mencapai tujuan atau mempertahankan kepentingan nasional. Strategi keamanan akan senantiasa dikaitkan dengan upaya peningkatan kapabilitas militer, persiapan akan terjadinya konflik terbuka, kecenderungan perlombaan senjata, termasuk proliferasi persenjataan, peningkatan pertahanan (militer), serta penangkalan. Meski secara umum strategi pertahanan China adalah aktif bertahan, peningkatan kapabilitas militer mereka justru mencerminkan adanya kecenderungan ‘agresif’. China tetap menolak meninggalkan kekuatan militernya untuk mencapai penyatuan dengan Taiwan.

II. 11 Respon Taiwan Terhadap Peningkatan Kapabilitas Militer China

Dalam merespon peningkatan kapabilitas militer China, Taiwan seharusnya bersiap untuk menunjukkan perlawanan yang kuat. Kebijakan pertahanan (keamanan nasional) seharusnya bertujuan untuk membuat negara merasa aman, walaupun tidak secara absolut⁸³. Aman yang tidak semata-mata tercipta pada saat negara mampu mengatasi kerawanan, tetapi juga dalam menghadapi ancaman dari luar. Secara teknis, kesiapan pasukan militer yang

⁸³ Barry Buzan, *Security: a New Framework for Analysis*, 1998, (London: Lynne Rienner), dalam Nurani Chandrawati, *Modul Pengkajian Strategi*, bahan ajaran bagi mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Indonesia, 2009, hal. 29.

ditempuh dengan latihan rutin yang keras, sangat penting untuk dilakukan. Angkatan bersenjata Taiwan harus bekerja untuk melawan semua serangan TPR China baik dari udara atau laut, termasuk memperkuat strategi anti-kapal selam dan menyapu ranjau yang harus menjadi prioritas. Secara doktrin, moral militer Taiwan juga harus dibenahi, untuk mencegah TPR yang menunjukkan kekuatan dan tekad, tanpa terlalu provokatif.

Perencana pertahanan Taiwan juga harus fokus pada keberlanjutan—kemampuan terus berperang selama beberapa hari, bahkan saat peristiwa invasi besar-besaran terjadi dan keadaan terlihat semakin mendesak⁸⁴. Setiap usaha yang diambil harus dapat memastikan pasukan Taiwan tetap bisa bertahan dan melanjutkan perang. Untuk mencapai tujuan ini, penting untuk mengembangkan desentralisasi komando dan kontrol. Hal ini akan membantu memastikan bahwa kerusakan atau inaktivasi dari beberapa pusat komando kunci tidak menghancurkan kapasitas untuk koordinasi dan pengendalian seluruh pasukan militer dari Taiwan. Semakin lama pasukan Taiwan mampu bertahan dalam sebuah invasi, semakin besar kemungkinan akan bahwa bantuan militer asing akan datang untuk membantu.

Di samping itu, para pemimpin Taiwan harus terus menekankan, bahwa respon militer Taiwan atas invasi yang dilakukan merupakan wujud dari deklarasi langsung bagi kemerdekaan pulau. Hal ini merupakan pesan kepada China untuk tidak memulai menyerang selat Taiwan. Untuk menjamin hal ini, Taiwan harus menunjukkan keinginan yang jelas untuk melanjutkan dialog yang berkelanjutan dengan Beijing pada isu-isu kepentingan bersama. Dengan kata lain, sesuai dengan pemikiran golongan *Contingent Realist* yang justru melihat secara optimis terhadap masalah kerjasama dan perdamaian. Terdapat tiga argumen dasar yang ditawarkan golongan ini, yakni:⁸⁵

- 1) Bahwa kompetisi terkadang hanya dilihat dari segi keharusan untuk dilakukan dalam situasi *self-help system* saja, tanpa melihat resiko dan dampaknya. Dalam kenyataannya, kebijakan yang kooperatif juga

84 Andrew Scobell, *loc.cit.*, hal. 33.

85 Nurani Chandrawati, *loc.cit.*, hal. 27-28.

dibutuhkan untuk mengantisipasi lingkungan yang *self-help system* tersebut.

- 2) Hal lain yang perlu ditanggapi dalam mengatasi kondisi sistem internasional yang anarki adalah dengan cara apa formulasi standar kebijakan keamanan dibentuk berdasarkan kapabilitas militer suatu negara khususnya kemampuan dalam menghadirkan misi militer. Dalam mengupayakan keamanan wilayahnya, negara harus memfokuskan diri pada kemampuan untuk menghadirkan misi militer. Namun misi militer yang efektif dalam rangka mengantisipasi dilema keamanan adalah mengintegrasikan kekuatan ofensif dan defensif. Dalam hal ini kerjasama dapat menjadi pilihan terbaik negara untuk mengidentifikasi keadaan dimana negara dapat memiliki kebijakan yang lebih defensif misalnya pengendalian persenjataan atau perlombaan senjata secara defensif.
- 3) Di samping itu, kerjasama juga dibutuhkan untuk mengetahui motif negara lain dalam mengantisipasi dilema keamanan. Konsekuensinya negara harus melatih untuk menahan diri dan menekankan kebijakan kerjasama militer sebab kebijakan ini dapat menimbulkan pemikiran rasional dari pihak lawan untuk merevisi pandangannya terhadap motivasi negara dalam penyusunan kebijakan keamanan.

Masih menurut golongan ini, kerjasama dapat menjadi pilihan berdasarkan tiga argumen:

- 1) Membatasi bias yang tidak diinginkan melalui kompetisi yang dihadirkan pemikiran standar realis.
- 2) Menghadirkan secara lebih berani namun bijak bahwa alur dari asumsi dasar perspektif realis (struktur realis) yaitu memfokuskan diri pada kapabilitas militer khususnya kemampuan untuk menghadirkan misi-misi militer akan mengintegrasikan dilema keamanan ke dalam struktur realis.
- 3) Kebutuhan akan komunikasi sebagai aktor yang rasional untuk memberikan maupun menerima informasi tentang motivasi yang berkaitan dengan antisipasi terhadap situasi dilema keamanan. Sebagai hasilnya,

negara akan mencari keamanan melalui keuntungan dari kebijakan kerjasama yang dapat mengkomunikasikan antar motivasi.

Kenyataannya, sejak akhir 1990 terjadi penurunan kondisi perekonomian Taiwan, seiring dengan semakin meruncingnya tekanan di bidang politik, khususnya menghadapi isu kesejahteraan sosial. Anggaran keuangan Taiwan menurun tajam hingga di bawah tiga persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pada neraca keuangan negara tahun 2000. Kemudian kembali anjlok hingga ke level terendah, 2,5 persen terhadap PDB di tahun 2002. Para pimpinan sipil berpendapat bahwa kemajuan ekonomi harus menjadi prioritas utama dalam pemerintahan, dan itu tidak hanya berlaku untuk kepentingan domestik.

Menghadapi cepatnya strategi penyerapan ekonomi China yang ditujukan untuk melakukan perlawanan terhadap Taiwan, membuat pemerintahan Taiwan berpikir mereka pun perlu meningkatkan kemampuan mereka untuk melindungi posisi keamanan mereka di segala bidang. Ing-Wen Tsai, Ketua Dewan Hubungan Dengan China, pada 2003 berpendapat bahwa, Taiwan harus konsentrasi pada isu perdagangan dan perekonomian lintas selat dalam jangka waktu pendek. Selanjutnya, baru meningkat ke isu militer dalam jangka waktu menengah (2006-2007).

Akibat semakin turunnya anggaran pertahanan Taiwan dalam tahun-tahun terakhir, beberapa uji coba dan pengadaan peralatan angkatan bersenjata yang diusulkan oleh kalangan reformis, dipandang sebagai sesuatu yang mewah dan tidak dapat terpenuhi. Tak hanya itu, pada 2006, paket senjata pertahanan dari Amerika Serikat untuk Taiwan justru ditolak oleh legislatif mereka (Taiwan), dengan alasan keuangan negara tidak bisa mendukung pembelian paket tersebut. Paket itu senilai 18,8 miliar dollar AS, yang terdiri dari sistem antirudal bernama Patriot dan pesawat antikapal selam tipe P3-C⁸⁶. Sementara, sejak jumlah anggaran pertahanan tidak bisa mengakomodir program investasi militer, Menteri Pertahanan Nasional tidak punya pilihan selain melakukan lobi-lobi untuk

86 International Institute Of Strategic Studies, *The Military Balance 2006*, *op.cit.*, hal. 247.

mengusulkan rancangan anggaran khusus untuk militer, sebuah inisiatif yang dianggap sangat kontroversial.

Pada Konferensi Bisnis Industri Pertahanan Amerika Serikat-Taiwan di San-Antonio, Texas, pada 2003, Randall Schriver, Deputy Sekretaris Asisten Amerika Serikat untuk Asia Pasifik dan Asia Timur, mengatakan kepada delegasi Taiwan bahwa, para pimpinan politik dan militer Taiwan sebenarnya telah menyadari perlunya melakukan reformasi atas sistem pertahanan mereka. Ada beberapa elemen yang perlu dilakukan dan Amerika Serikat menyadari Taiwan sudah berjalan ke arah sana dan saat ini tengah melakukan beberapa penyesuaian di sana-sini. Namun Amerika Serikat juga menganggap masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Taiwan. Khususnya, sikap Taiwan pada proses pengadaan paket persenjataan dari Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden George W. Bush tahun 2001, membuat Amerika Serikat berpikir ulang (ragu) terhadap keinginan Taiwan untuk benar-benar ingin mempertahankan diri mereka sendiri.

Terkait dengan hipotesis yang disusun oleh penyusun pada bab pertama, maka tidak terbukti jika peningkatan kapabilitas militer China mempengaruhi kebijakan pertahanan Taiwan di bawah Pemerintahan Presiden Chen-Shui Bian periode 2000 sampai 2008, yang justru menurunkan anggarannya. Artinya, peningkatan kapabilitas militer China tidak mempengaruhi kebijakan pertahanan Taiwan, meski peningkatan kapabilitas militer China sudah memunculkan dilema tersendiri bagi keamanan negara-negara tetangga lainnya dan menyebabkan mereka ikut meningkatkan kapabilitas militernya.

Jika hipotesis penelitian ini tidak terbukti, pertanyaan yang kemudian muncul adalah faktor apa saja yang mempengaruhi respon Taiwan tersebut? Dilihat dari konsep strategi keamanan berdasarkan sudut pandang realis, maka satu aktor akan senantiasa berusaha untuk mengantisipasi situasi dilema keamanan dalam lingkungan internasional yang anarki. Makna dari dilema keamanan adalah suatu kondisi dimana meskipun suatu negara telah berupaya meningkatkan kekuatan (kapabilitas militernya), namun tetap tidak dapat mencapai keamanan yang maksimal karena keamanan adalah hal yang nisbi, bahkan tindakan tersebut

justru cenderung menjadi ancaman bagi negara lain⁸⁷. Untuk menjawabnya, penyusun akan mencoba membahas tentang kebijakan pertahanan Taiwan pada bab selanjutnya (bab ke-tiga).



87 Nurani Chandrawati, *loc.cit.*, hal. 27.

BAB III

KEBIJAKAN PERTAHANAN TAIWAN DI BAWAH PEMERINTAHAN PRESIDEN CHEN-SHUI BIAN (2000-2008)

III. 1 Sekilas Tentang Taiwan⁹³

Nama resmi negara ini adalah Republik China. Taiwan sebenarnya merupakan sebuah kawasan dalam negara, yakni salah satu provinsi di China. Taiwan secara *de facto* merupakan negara berdaulat tetapi secara *de jure* bukanlah negara yang merdeka, karena Taiwan tidak mendapat pengakuan internasional sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, terutama dari PBB⁹⁴. Taiwan juga adalah nama sebuah pulau, yang bernama Pulau Formosa, dengan luas wilayah 32.260 km².

Ibukota negara ini adalah Taipei, dengan bahasa resmi Bahasa Mandarin. Penduduk Republik China (Taiwan) umumnya beretnis Tionghoa, dan memiliki hubungan erat dengan wilayah China di daerah Fujian dengan sub-etnis Hokkien, yakni sub-etnis yang juga terdapat di negara-negara kawasan Asia Tenggara, dan mereka pada umumnya hidup dari sektor perdagangan, bahkan secara riil menjadi penggerak roda ekonomi di kawasan itu.

Taiwan merupakan merupakan negara republik dan dipimpin oleh seorang presiden. Taiwan menggunakan sistem politik demokrasi, berbeda dengan Republik Rakyat China dengan sistem Komunisnya. Perbedaan sistem politik inilah yang menjadi alasan dasar sekaligus berkelanjutan penyebab konflik China dengan Taiwan.

Posisi Taiwan kembali berubah ketika terjadi perang saudara di China daratan, antara Partai Nasionalis *Kuomintang* ‘melawan’ Partai Komunis. Perang

93 Taiwan's Profile, <http://www.bbc.co.uk/2/hi/americas/country_profiles/1285915.stm>, *loc.cit.*,

94 Catur Hadianto, Proses Pengambilan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap RRC Pada Krisis Selat Taiwan Tahun 1995/1996 dan 1999/2000, <http://www.lontar.ui.ac.id//opac/themes/libri2/detail.jsp?id=92079&lokasi=lokal>, halaman 1, (diakses pada 4 Maret 2011).

yang berakhir di tahun 1949 ini dimenangkan oleh kubu komunis, sehingga *Kuomintang* tergusur dan lari ke Taiwan. Di Taiwan, *Kuomintang* yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek, kemudian mendirikan pemerintahan yang tetap diberi nama Republik China. Chiang Kai-shek mendirikan pemerintahan ini dengan tujuan untuk tetap mempertahankan filosofis nasionalis, dan berusaha membangun kekuatan yang pada akhirnya bertujuan ‘merebut’ kembali China daratan.

Ekonomi Taiwan sebelum abad ke-20 hampir keseluruhannya berbentuk pertanian, tetapi saat ini sektor pertanian hanya menyumbang dua persen dari pendapatan mereka (Produk Domestik Bruto atau PDB), berkurang dari 35 persen dibandingkan pada 1952. Industri-industri yang dahulunya dijalankan buruh, kini diambil alih oleh keuangan dan teknologi yang intensif. Saat ini, ekonomi Taiwan bergerak di bidang industri jasa konstruksi, perbankan, industri elektronika, komputer dan semikonduktor yang sudah diakui kualitasnya di pasar internasional, perkapalan, jasa penerbangan serta transportasi. Taiwan telah menjadi mitra sejumlah negara di kawasan Asia (Timur dan Tenggara khususnya) seperti Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, Vietnam, dan termasuk di China (kini terdapat 50.000 perusahaan Taiwan di China).

Perang saudara di China yang berakhir pada 1949 dan dimenangkan oleh Mao Zedong atas Chiang Kai Shek, membawa negara tersebut pada paham Sosialis-Komunis. Para pengikut Chiang Kai Shek yang kalah, kemudian mengungsi ke Pulau Formosa yang terisolasi di lepas pantai China, pulau yang saat ini dikenal dengan nama Taiwan. Taiwan menjadi tempat pengungsian bagi sekitar dua juta orang pengikut Partai Kuomintang pimpinan Chiang Kai Shek yang berhaluan nasionalis. Para pengungsi tersebut kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah negara yang terpisah dari pemerintahan China daratan. Pendeklarasian ini jelas mengundang rasa tidak senang dari pemerintahan China, karena merasa bahwa pulau tersebut merupakan bagian dari negaranya⁹⁵. Taiwan dianggap sebagai pemberontak yang harus ditumpas untuk mengembalikan kedaulatan China daratan atas pulau tersebut.

95 Angga Nurdin, Taiwan: Dilema Di Antara Dua Super Power, dalam Jurnal *Multiversa*, volume 02 Nomor 01, 2010, (Yogyakarta: Institute of International Studies (IIS) Jurusan Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada), paragraf 10.

Taiwan sampai saat ini masih diakui sebagai salah satu provinsi oleh pemerintah China. Meski secara *de facto* Taiwan telah menjadi sebuah negara, tetapi belum mendapatkan pengakuan secara *de jure* oleh banyak negara maupun oleh PBB, sehingga Taiwan tidak sempurna sebagai sebuah negara di dunia internasional. Usaha selama 15 tahun yang dilakukan oleh Taiwan untuk menyempurnakan status kenegaraannya, termasuk untuk masuk kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang keanggotaannya dihapuskan pada 1971 sebagai dukungan atas China⁹⁶.

Penghapusan keanggotaan Taiwan dari organisasi bangsa-bangsa dikeluarkan melalui Resolusi PBB Nomor 2758 tahun 1971⁹⁷. China senantiasa memberikan ultimatum kepada negara lain, untuk tidak mengakui Taiwan sebagai negara, dan harus mengakui Kebijakan 'Satu China' dalam setiap forum internasional. China menganggap setiap negara yang mengakui terhadap Taiwan berarti mengganggu atau merusak kedaulatan China, sekaligus membantu pemberontakan terhadap pemerintahannya. Namun di sisi lain banyak negara, walaupun secara tidak tersirat, melakukan kerjasama dengan Taiwan, karena saat ini Taiwan sedang tumbuh menjadi sebuah kekuatan ekonomi baru di kawasan Asia Timur. Kemajuan yang telah dicapai oleh Pemerintah Taiwan ini memberikan keyakinan bagi rakyat Taiwan untuk dapat melepaskan diri dari bayang-bayang China daratan. Walaupun China memiliki kebijakan '*one country two system*', namun tampaknya hal ini tidak akan banyak membantu dalam upaya rekonsiliasi dengan Taiwan.

Kebijakan satu negara dengan dua sistem diterapkan China, yakni sistem ekonomi yang menganut liberalisme dan sistem politik sosialis. Sistem ini terbukti mampu mengelaborasi Hongkong dan Macau yang dikembalikan menjadi bagian China oleh Pemerintah Inggris pada 1997. Namun untuk kasus Taiwan, nampaknya akan sangat sulit karena latar belakang sejarah yang kurang bersahabat yang dimiliki oleh masing-masing pihak, baik China maupun Taiwan. Tak hanya itu, Taiwan di bawah Kepemimpinan Presiden Chen-Shui Bian (2000-

96 Edward L. Dreyer, The Myth Of 'One China', dalam Peter C.Y. Chow (ed.), *The One China Dilemma*, 2008, (New York: Palgrave Macmillan), hal. 32.

97 *Ibid.*, hal. 19.

2008), cenderung berusaha memerdekakan diri dari China, sehingga kerap memancing reaksi keras dari China. Presiden Chen Shui-bian juga telah menjadwalkan sebuah referendum pada Maret 2007, yang berupaya untuk kembali menjadi anggota PBB dalam sebuah kebijakan⁹⁸.

Dua 'negara' yang telah bersitegang selama beberapa dasawarsa ini senantiasa melancarkan berbagai provokasi, baik secara diplomatis maupun dengan melakukan berbagai pertunjukan kekuatan menggunakan kekuatan militer. Secara diplomatis, Taiwan sering menyatakan akan melakukan deklarasi kemerdekaannya secara resmi, dan senantiasa melakukan lobi terhadap negara lain untuk mengakui kemerdekaannya. Perilaku ini seringkali memicu ketegangan dengan China yang membalas upaya Taiwan dengan jalan melakukan lobi diplomatis kepada negara lain untuk tidak mengakui keberadaan Taiwan sebagai negara. Akibatnya, negara lain akan berada dalam kebimbangan ketika dua pihak tersebut berada dalam kepentingannya masing-masing.

III. 2 Kekuatan Militer Taiwan

Dalam bidang militer, Taiwan memiliki kekuatan yang mencakup Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Sejak kepindahan pemerintahan nasionalis ke Taiwan, mereka memperoleh bantuan persenjataan dari Amerika Serikat dan Eropa Barat. Pada tahun 1970-1980-an ketika hubungan diplomatik antara Taiwan dengan Amerika Serikat putus, Taiwan masih tetap mendapatkan persenjataan dan hubungan militer dengan Amerika Serikat, meski ditentang oleh China.

Sebagai tindakan antisipatif apabila hubungannya memburuk dengan Amerika Serikat, Taiwan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dengan didukung kemampuan teknologi industri tinggi yang dimilikinya. Sebagai contoh, Angkatan Udara Taiwan mampu memenuhi kebutuhannya dengan memproduksi pesawat tempur buatan sendiri, sekalipun dengan bantuan teknis kontraktor militer Amerika Serikat.

98 Indonesia Tetap Berpegang Pada Kebijakan 'Satu Cina', *Antara News*, 20 September 2007, <http://www.antara.co.id/print/1190263963>, paragraf 5, (diakses pada 24 Februari 2011).

Kemajuan perekonomian Taiwan memotivasi Kementerian Pertahanan Nasionalnya dalam mengajukan anggaran belanja persenjataan sebesar 21 miliar dollar AS hingga sepuluh tahun mendatang, terhitung sejak tahun 2001⁹⁹. Anggaran tersebut diantaranya dialokasikan pada pembelian beberapa perlengkapan persenjataan.

Penjualan senjata Amerika Serikat untuk berbagai perlengkapan pertahanan ke Taiwan selama tahun 2000-2007, telah melalui persetujuan Presiden Amerika Serikat dan diumumkan secara formal kepada Kongres sejak tahun 1990, serta dipublikasikan secara terbuka karena telah diumumkan oleh pemerintah sebagai laporan pers. Penjualan senjata ini termasuk dalam program FMS (*Foreign Military Sales*) lingkup antar-pemerintahan suatu negara. Sebelum Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengabari lewat *Letters of Offer and Acceptance*, presiden harus memberitahukan FMS kepada Kongres sebagai syarat dari *Arms Export Control Act* (AECA).

Kondisi militer Taiwan tidak sepenuhnya kuat. Angkatan Laut mereka justru lebih parah karena hanya memiliki empat kapal selam, dua di antaranya dibuat pada zaman Perang Dunia II¹⁰⁰. Jika dikatitkan dengan konflik mereka dengan China, tentu kekuatannya tidak sebanding. China mempunyai lebih dari 50 kapal selam, dan beberapa di antaranya telah dipersenjatai dengan rudal balistik dengan hulu ledak nuklir. Kekuatan Angkatan Laut Taiwan terkonsentrasi terutama di pelabuhan militer Tsuoying di Kaohsiung, sehingga TPR China diprediksikan hanya butuh lusinan rudal untuk menghancurkan lebih dari setengah dari kekuatan Angkatan Laut Taiwan.

Sebagian besar prajurit Angkatan Udara Taiwan bersembunyi di gua-gua Hualien. Jika gua tersebut terkena rudal China, besar kemungkinan Angkatan Udara Taiwan akan kehilangan sebagian besar kendali mereka. Begitu juga dengan dua saluran transmisi listrik di selatan-utara Taiwan, jika terkena rudal Cjina, maka seluruh Taiwan akan terancam gelap-gulita. Sejumlah pengamat

99 Shirley A. Kan, Taiwan: Major U.S. Arms Sales Since 1990: Report for Congress, 2009, <http://fpc.state.gov/documents/organization/16159.pdf>, paragraf 5, (diakses pada 9 Mei 2011).

100 Ancaman Militer China Meningkat, <http://internasional.kompas.com/read/2009/09/02/05554688/ancaman.militer.china.meningkat>, paragraf 9, (diakses pada 23 Maret 2011).

bahkan memprediksikan, beberapa rudal cukup untuk melumpuhkan transportasi jalan tol seluruh pulau itu.

Sebenarnya Taiwan berhasil meningkatkan PDB mereka pada 2003, menyusul masalah SARS yang berakibat terhadap lonjakan permintaan produk-produk teknologi informasi (TI), yang notabene merupakan penyokong utama ekonomi Taiwan, dari luar negeri¹⁰¹. Pada tahun tersebut, Taiwan menganggarkan belanja pengeluaran pertahanan sekitar 7,7 miliar dollar AS¹⁰². Angka tersebut bertahan selama tiga tahun, sampai akhirnya Pemerintah Taiwan mengusulkan untuk menaikannya sekitar 27 persen pada 2007¹⁰³. Mereka beralasan, peningkatan pendapatan bisa, atau bahkan seharusnya, digunakan untuk membeli senjata baru untuk menggantikan senjata lama yang sudah ketinggalan jaman.

Seperti yang ditulis dalam *The Military Balance 2007*, rencana Pemerintahan Chen-Shui Bian untuk membeli paket delapan kapal selam bermesin *diesel*, 12 unit pesawat tempur pemusnah kapal laut tipe P-3C, dan enam sistem antirudal, justru ditentang oleh publik dan partai oposisi (Partai Kuomintang). Proposal awalnya, Taiwan mengalokasikan anggaran sebesar 18,6 miliar dollar AS, yang diproyeksikan untuk pengadaan paket kegiatan penjualan tanah milik Kementerian Pertahanan Nasional, privatisasi perusahaan pertahanan negara dan penerbitan obligasi khusus.

Kenyataannya, pada akhir 2004 Parlemen Taiwan justru tidak menyetujui paket tersebut, karena biayanya dianggap terlalu mahal. Penolakan tersebut bahkan diwarnai oleh aksi unjukrasa besar-besaran. Paket pengadaan itu kemudian direvisi pada pertengahan 2005, dengan meniadakan rencana pembuatan kapal selam di dalam negeri, dan dananya dialihkan untuk pembangunan dermaga kapal selam. Perubahan proyeksi tersebut akhirnya berhasil mengurangi anggaran dari 18,2 miliar menjadi sekitar 12,5 miliar dollar AS.

101 *The Military Balance 2007*, *op.cit.*, hal. 340.

102 *Ibid.*,

103 *Ibid.*,

Penghematan yang dilakukan Taiwan di bawah kepemimpinan Presiden Chen-Shui Bian, tidak berjalan sesuai harapan, karena Partai Nasionalis China (partai oposisi Taiwan yang mendukung penyatuan kembali Taiwan dengan China) berusaha menundanya. Ratifikasipun gagal, sehingga pada Oktober 2006, Pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden George W. Bush, membatalkan paket besar bantuan persenjataan lainnya lagi, yakni paket pesawat tempur F-16. Sebelum membatalkan paket itu, Amerika Serikat sebenarnya sudah memperingatkan Taiwan, bahwa mereka mulai tidak sabar dengan berbagai penundaan yang terjadi. Amerika Serikat menyarankan Taiwan agar fokus menghentikan korupsi, dan berhenti menggunakan isu pengadaan persenjataan sebagai isu politik.

Contoh lain ketidak-mampuan Taiwan untuk melakukan modernisasi alustsista adalah legislatif Taiwan menolak paket senjata pertahanan dari Amerika Serikat dengan alasan keuangan negara tidak bisa mendukung pembelian paket tersebut, pada 2006. Paket senilai 18,8 miliar dollar AS itu, terdiri dari sistem antirudal bernama Patriot dan pesawat antikapal selam tipe P3-C¹⁰⁴.

Baru pada pertengahan 2007, muncul persetujuan pembelian 12 unit pesawat P-3C Orion bekas. Sementara proyek pengadaan sistem PAC-3 sepertinya ditinggalkan, menyusul adanya persetujuan legislatif Taiwan untuk memperbaiki (*upgrade*) sistem PAC-2 yang bekas, daripada membeli sistem PAC-3 yang baru.

Pada 2007, dari total pendanaan pertahanan sebesar 9,48 miliar dollar AS, hanya sedikit yang digunakan untuk merealisasikan paket pengadaan persenjataan dari Amerika Serikat, yakni sebesar 186 juta juta dollar AS. Rinciannya: untuk pembelian pesawat tempur Orion P-3C sebesar 107 juta dollar AS; untuk memperbaiki (*up grade*) tiga sistem PAC-2 untuk menjadi PAC-3 standar, dan sekitar 79 juta dollar AS untuk evaluasi studi pembelian delapan kapal selam tenaga listrik diesel. Jadi, dari total paket aslinya yang bernilai 17 miliar dollar AS, realisasinya hanya sekitar 200 juta dollar AS.

104 *The Military Balance 2006*, *op.cit.*, hal. 247.

Di sisi lain, pemerintah Taiwan juga membekukan sepertiga dari 498 juta AS dollar yang dianggarkan untuk pembelian 66 pesawat tempur F-16C/D. Padahal menurut Amerika Serikat, salah satu *item* dalam paket pengadaan mempengaruhi kesuksesan keseluruhan paket pengadaan persenjataan tersebut. Tapi pada sisi lain, Taiwan juga tidak bosan menyatakan bahwa, pemerintahan mereka akan mendorong anggaran belanja pertahanan hingga mencapai tiga persen dari total belanja negara. Kenyataannya, anggaran pertahanan Taiwan 2007, tercatat hanya sebesar 2,2 persen dari total belanja negara.

Sama halnya dengan anggaran pertahanan, dalam hal kekuatan personil militer (pasukan) juga, sejak 1993 Taiwan mengeluarkan kebijakan pengurangan jumlah personel, menyusul perubahan doktrin strategi militer mereka, yang lebih ditunjukkan kepada kemajuan teknologi informasi pada abad ke-21. Maka sejak saat itu, Kementerian Pertahanan Taiwan terus mengurangi jumlah tentaranya hingga sesuai dengan targetnya, yakni 400.000 personil, dalam jangka waktu sepuluh tahun¹⁰⁵. Kebijakan tersebut tidak sepenuhnya diimplementasikan, diduga karena Presiden Lee Teng-hui khawatir program tersebut gagal, meski kemudian menganggapnya ketidak-mungkinan yang ada bisa direduksi.

Bentuk implementasi program pengurangan personil militer Taiwan ditandai oleh pemberlakuan kebijakan efisisensi dan konsolidasi pada 1997, yang menargetkan pengurangan pada Juni 2001. Tujuannya, mengurangi tentara dari 453.000 menjadi 400.000 personil sebagai bagian efisiensi struktur administratif militer¹⁰⁶.

III. 3 Kebijakan Reformasi Pertahanan Taiwan

Kebijakan pertahanan adalah arah operasi komprehensif dan garis besar yang digunakan pemerintah untuk menjaga keamanan nasional dengan mengerahkan kekuatan politik, ekonomi, psikologi dan militer¹⁰⁷. Pemikiran tersebut terwujud dalam tujuan menjaga interaksi yang terjadi di Selat Taiwan,

105 Bernard D. Cole, *Taiwan's Security: History and Prospects*, 2006, (New York: Routledge), hal. 72.

106 *Ibid.*,

107 Taiwan's Ministry of National Defense, National Defense Report, ROC, 2002, halaman 71–73, dalam Ching-Pu Chen, *Defense Policy-Making And Civilian Roles*; Lihat juga Martin Edmonds and Michael M. Tsai, *op.cit.*, 2006, hal. 83.

dengan cara melakukan pembicaraan diplomasi secara aktif, mengembangkan kerjasama ekonomi, menghimpun suara masyarakat dunia, mendorong departemen riset dan pengembangan untuk menarik investasi (dari luar negeri), mendirikan kekuatan dengan dasar teknologi pertahanan, dan merealisasikan demokrasi untuk melindungi hak azasi manusia (HAM). Semua ini menjadi konsep kebijakan fundamental pertahanan nasional Taiwan.

Berbicara tentang pertahanan Taiwan, tidak akan lengkap jika tidak menyinggung salah satu presiden mereka di tahun 2000-an, Chen Shui-bian. Politisi kontemporer di negaranya ini, akrab dengan urusan pertahanan dan mempunyai kedekatan secara personal dengan angkatan bersenjata. Pada 1992, saat masih menjadi anggota legislatif, Chen merupakan tokoh oposisi pertama yang terpilih sebagai Pimpinan Komite Pertahanan Nasional di Legislatif Yuan. Sikapnya yang tegas di dalam komite membuatnya menjadi narasumber favorit di kalangan media setempat.

Sejak jaman Presiden Chen Shui-bian di komisi, Partai Demokrasi Progresif (PDP/DPP) Taiwan fokus pada urusan pertahanan dan reformasi militer, dan menjadikan isu itu menjadi sebuah misi suci (penting). Tiga generasi yang berorientasi pada reformasi militer di PDP, mencatatkan sepak terjang mereka untuk memaksa pimpinan Taiwan melakukan langkah reformasi terhadap institusi militer mereka. Tiga generasi itu, yaitu:¹⁰⁸

- 1) Chen Shui-bian (antara 1990-1996) dan Huang-Hsiung Huang (1987-1990 dan 1993-1996) adalah penggerak gelombang pertama.
- 2) Paris H Chung (sejak 1993) dan Michael M Tsai (dari 1996 sampai 2002) merupakan penggerak gelombang kedua.
- 3) Setelah itu, tradisi dilanjutkan oleh Chung-Shin Chen (sejak 1999) dan Wen-Chung Li (juga sejak 1999), yang hingga kini masih menggerakkan gelombang ketiga.

108 *Ibid.*,

Salah satu pernyataan Chen Shui-bian yang terkenal tentang pertahanan adalah:

“Institusi-institusi militer sesungguhnya bukan merupakan objek terpisah dari ruang politik dan sosial, mereka tidak hanya bereaksi terhadap kondisi sekitar, tapi juga bertanggungjawab terhadap diri mereka sendiri. Institusi militer merupakan bagian dari realitas, yang juga membentuk sebuah situasi yang harus mereka hadapi. Inovasi dan reformasi untuk suksesti pertempuran menyentuh berbagai aspek baik militer maupun sipil”¹⁰⁹.

Pernyataan di atas tersebut, menyebabkan Presiden Chen dianggap sebagai ‘Bapak Reformasi Pertahanan’ Taiwan karena kebanyakan kebijakan reformasi pertahanan Taiwan berasal dari pemikirannya. Bahkan, ada banyak bagian dalam Undang-Undang Pertahanan Nasional Taiwan yang terbit pada 2000, berpedoman kepada daftar yang Chen susun berjudul Undang-Undang Organisasi Pertahanan Nasional pada 1991. Undang-Undang terakhir tadi merupakan langkah inisiatif terkait reformasi organisasi pertahanan di jaman itu. Chen Shui-bian dan koleganya, Chen-Heng Ko (pada 2006 menjadi Deputy Sekjen Dewan Keamanan Nasional), menerbitkan Buku Putih yang berjudul Kotak Hitam Pertahanan (*Black Box of Defense*) pada 1992. Buku setebal 500 halaman tersebut memaparkan visi menyeluruh mereka terhadap masa depan reformasi pertahanan Taiwan. Buku itu bahkan hingga saat ini masih relevan untuk memberikan pemahaman tentang reformasi pertahanan Taiwan.

Setelah berkuasa, Presiden Chen Shui-bian mengadopsi ‘strategi ofensif’ yang mengarah ke daratan kepada militer Taiwan. Menurut Presiden Chen, strategi tersebut berguna untuk melawan sebuah pertempuran yang menentukan di luar daerah. Sebagai pendukung strategi tersebut, Pemerintah Taiwan membeli senjata dari pihak asing, dan pada saat bersamaan meningkatkan pembangunan garis pertahanan. Salah seorang pejabat senior Taiwan menyatakan bahwa, lima garis pertahanan utama Taiwan didirikan terhadap daratan akan mampu menjamin keamanan Taiwan. Dengan kata lain, dengan lima garis pertahanan utama ini,

109 York W. Chen dan Martin Edmonds, *op.cit.*, 2006, hal. 63.

tentara Taiwan akan mampu melawan perang berkepanjangan melawan TPR China, yang terdiri atas:¹¹⁰

- 1) Garis pertahanan pertama atau ‘garis depan’, membentang dari Jinmen sampai Mazu, di mana jarak jauh artileri dan rudal anti-pesawat dikerahkan;
- 2) Garis pertahanan kedua adalah angkatan laut yang ditempatkan di Selat Taiwan, yang saat ini dilengkapi dengan lebih dari 40 kapal perang permukaan yang besar, empat kapal selam, dan beberapa lusin anti-kapal selam helikopter;
- 3) Garis pertahanan ketiga terdiri dari dua peringatan dini udara dan sistem pencegat, termasuk empat pesawat peringatan dini, lebih dari 400 pejuang, lebih dari 2000 rudal yang dilengkapi sistem artileri anti-pesawat udara;
- 4) Garis pertahanan keempat terletak di pantai barat pulau Taiwan, di mana lebih dari 1500 *tank*, lebih dari 1400 meriam dan peluncur roket multi-barel, lebih dari 60 helikopter bersenjata saat ini ditempatkan di sana;
- 5) Garis pertahanan kelima adalah ‘cadangan dasar belakang’ yang didukung oleh pegunungan tinggi di bagian timur, termasuk pangkalan militer di mana persenjataan dan material militer lainnya disimpan, seperti depot gua pesawat, pangkalan kapal selam bawah air, alternatif pelabuhan dan gudang besar militer dalam gua.

Terlepas dari berbagai kebijakan yang ditempuh Taiwan dalam menjaga pertahanan dan keamanan wilayahnya, ada empat faktor domestik yang saling berhubungan sekaligus sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, yakni:¹¹¹

- 1) Proses politik. Struktur politik Taiwan yang berubah secara cepat, aktor politik bermunculan menandai pemilu yang berlangsung secara kompetitif dengan sistem multi-partai, perjuangan politik yang berkelanjutan,

¹¹⁰ Zhu Xianlong, Analisis Aktual Kekuatan Militer Taiwan, sebuah analisis yang dimuat dalam Surat Kabar *Times Global*, edisi 15 Agustus 2010, paragraf 7.

¹¹¹ Michael D. Swaine, *Taiwan: Defense and Foreign Policy Making*, 2009, (Washington DC: National Defense Research Institute), hal. 42.

perdebatan tentang pandangan politik masing-masing aktor, dan komitmen yang lemah untuk mematuhi norma-norma demokratisasi.

- 2) Komposisi dan pandangan para elite senior. Perubahan kepribadian dan nilai-nilai politik serta respon para pemimpin militer terhadap kekuatan demokratisasi, evolusi institusional, perubahan generasi, dan pembangunan ekonomi.
- 3) Pandangan sosial. Opini di tengah-tengah masyarakat dan kelompok-kelompok kepentingan, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu sensitif seperti identitas negara, hubungan antarselat, keamanan nasional, dan kebijakan-kebijakan khusus luar negeri dan pertahanan.
- 4) Para pejabat penentu kebijakan. Dinamika struktural yang berkembang secara kompleks, dalam beberapa bagian justru menciptakan iklim yang tidak terkoordinasi, khususnya saat menentukan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan keamanan nasional, hubungan luar negeri, dan pertahanan.

Semua kelemahan yang dijelaskan Swaine di paragraf sebelumnya, memaksa Taiwan menentukan kebijakan pertahanannya tidak sesuai dengan kebutuhan. Pertarungan kepentingan antaraktor sangat mendominasi. Apalagi dua partai berpengaruh, Partai Nasionalis Kuomintang melawan Partai Demokratik Progresif, terus berusaha saling mengalahkan demi memperoleh pengaruh sekaligus kekuasaan di Taiwan.

Selain itu, faktor anggaran juga sangat mempengaruhi implementasi kebijakan pertahanan Taiwan. Faktor yang satu ini bahkan bisa dianggap dampak yang juga berdampak. Artinya, keputusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, berdampak terhadap penggunaan anggaran yang kurang tepat guna. Akibat lebih jauh, senjata yang dibeli pun tidak sesuai dengan kebutuhan. Contohnya pada Desember 2000, Legislatif Yuan merubah tiga butir utama dalam rencana anggaran pertahanan Taiwan, yang sama sekali tidak dibutuhkan sekaligus tidak sesuai dengan rancangan yang diajukan Kementerian Pertahanan Taiwan¹¹².

112 Bernard D. Cole, *op.cit.*, (New York: Routledge), hal. 157.

Pertama, Legislatif Yuan memotong anggaran yang diajukan Kementerian Pertahanan Taiwan untuk membeli suku cadang Kapal kelas frigates Kang Ding, sebagai reaksi atas dugaan korupsi saat pemesanan kapal jenis itu ke Prancis. Kedua, Legislatif Yuan juga memotong anggaran untuk pembelian suku cadang pesawat AL Taiwan jenis S-2T ASW (*anti-submarine warfare*), padahal saat itu perwira AL Taiwan menyatakan, hanya ada satu unit pesawat jenis tersebut yang beroperasi. Padahal Taiwan memiliki 26 unit, sehingga 25 unit lainnya rusak dan tidak bisa beroperasi¹¹³.

Contoh lainnya adalah kebijakan membeli tiga batere rudal Patriot PAC-3 untuk meng-*up grade* tiga unit rudal tipe PAC-2, yang bukan didasari kebutuhan militer, melainkan memuaskan keinginan konstituen politik di Kaohsiung dan Taichung¹¹⁴. Politik domestik akan selalu menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam memutuskan suatu kebijakan. Anggaran pertahanan pada masa mendatang akan meningkat signifikan hanya jika pemerintah dan rakyat yang memilih wakil mereka di legislatif percaya jika ancaman militer terhadap Taiwan tampak jelas dan nyata di depan mata¹¹⁵.

Pemerintahan Presiden Chen Shui Bian saat itu, ditekan untuk efisien dalam menyusun anggaran pertahanan untuk periode 2004-2005, tetapi di sisi lain kehilangan dukungan publik sekaligus mendapat perlawanan kuat dari anggota parlemen oposisi yang menjadi mayoritas di Legislatif Yuan. Akhirnya, pada pertengahan 2005, rapat perencanaan anggaran khusus berakhir tanpa mekanisme pengambilan suara¹¹⁶.

Perlawanan datang dari sejumlah politisi, akademisi, dan pensiunan jenderal yang mengkritik rancangan anggaran pertahanan Taiwan karena pengajuan biaya yang tinggi serta lamanya waktu untuk pengoperasian kapal selam baru yang dipesan Taiwan, yakni mencapai delapan sampai sepuluh

113 *Ibid.*,

114 Maubo Chang, Taiwan Lawmakers Cut Budget for Lafayette's Logistic Supplies, CNA, 11 Desember 2000, dalam *Ibid.*,

115 Michael Tsai and Jason C. Lin, Funding for Taiwan's Defense Reform, dalam *Jurnal Taiwan Defense Affairs*, volume 4, Nomor 2, 2003, hal. 232-258.

116 S.C. Chang, DPP Lawmakers Walk Out of Meeting After Major Bills Blocked, 2005, CAN, <http://www.cna.com.tw/eng/ceplist.php?date=1116940779&class_1P>, paragraf 4, (diakses pada 30 mei 2011).

tahun¹¹⁷. Dampaknya, pengumuman penetapan anggaran pertahanan Taiwan ini pun berubah secara signifikan. Kapal perang tipe Kidd-/Chitech-class menjadi bagian yang diproyeksikan untuk dibeli, meski hanya dilengkapi separuh senjata pelontar rudal saja¹¹⁸.

Bagaimanapun, anggaran pertahanan Taiwan tidak akan pernah mengalami peningkatan melebihi anggaran bidang lain seperti kesejahteraan sosial dan ekonomi (perdagangan), sesuai dengan yang disepakati wakil rakyat Taiwan di Legislatif Yuan dan pemerintahnya, dalam hal ini presiden, yang berjanji tidak akan pernah memotong anggaran kesejahteraan hanya untuk membeli persenjataan baru. Terlebih untuk merespon peningkatan kapabilitas militer China, Taiwan lebih memilih untuk memperkuat kerjasama ekonomi dengan ‘induknya’ tersebut.

Apalagi, sejak dasawarsa 2000, Taiwan menjadi salah satu pihak yang berinvestasi besar di China. Biro Perdagangan Luar Negeri China menyebutkan bahwa Taiwan berada di peringkat ke-delapan sebagai pengimpor barang ke China, dan berada di peringkat ke-sembilan sebagai tujuan ekspor China, pada 2004¹¹⁹. Tingkat investasi para pengusaha Taiwan di China juga sangat besar, yakni mencapai 60 miliar dollar AS pada 2002, sedangkan China malah memperkirakan angka investasinya mencapai 100 miliar dollar AS¹²⁰. Hubungan ekonomi China dengan Taiwan ini bahkan berdampak baik terhadap kehidupan sosial antarmasyarakatnya. Tak kurang dari satu juta jiwa warga negara Taiwan, menetap di China sekaligus berbisnis¹²¹.

Pada 1998, Taiwan memperkenalkan kebijakan reformasi militer yang berdasarkan Peraturan Pertahanan Nasional baru, dan kemudian digantikan oleh

117 Bernard D. Cole, *op.cit.*,

118 Wendell Minnick, Taiwan’s Military Will Fire Blanks, dalam *Taipei Times*, edisi 25 Mei 2005, hal. 8; Lihat juga Brian Hsu, Budgets Cut Gives Green Light to Kidds Deal, dalam *Taipei Times*, edisi 3 Juni 2003, hal. 3.

119 Bernard D. Cole, Taiwan’s Investments in Mainland Jumped by 47% in First Half of Year, dalam harian *People’s Daily*, 2002, Beijing, <http://english.people.com.cn/200209/16/eng20020916_103303.shtm>, paragraf 11, (diakses pada 30 Mei 2011).

120 *Ibid.*,

121 Bernard Cole, *op.cit.*, hal. 154.

Peraturan (Undang-Undang) Organisasi Pertahanan Nasional pada 2002. salah satu esensinya, mengubah total organisasi militer dan struktur kekuatannya.

Merujuk pada definisi Revolusi Militer (RMA), ada empat elemen penting, yakni: (1) Teknologi baru; (2) Sistem persenjataan baru; (3) Konsep operasi baru; dan (4) Struktur kekuatan baru. Definisi tersebut menyebutkan, jika struktur kekuatan tidak sejalan dengan elemen lainnya, maka bukan saja tiga elemen (teknologi baru, sistem persenjataan baru, konsep operasi) tersebut yang menjadi tidak berfungsi, tapi revolusi juga akan menjadi tidak maksimal. Untuk memastikan unit militer mendapatkan tujuan yang sesuai dengan harapan revolusi, fokus terhadap organisasi militer dan kekuatan struktur harus ditekankan. Karena dua hal itu merupakan elemen utama dari revolusi.

Kebijakan reformasi pertahanan yang terjadi di Taiwan, jika dikaitkan dengan konflik dengan 'negara induk' China, dinamikanya dianggap berkembang menjadi proses yang sulit dipahami, baik dalam konteks internal maupun eksternal¹²². Dari tahun 2000 sampai 2004, program pengadaan alat-alat pertahanan terbesar, yakni pembelian Kapal Perang Kelas Kidd DDG dari Amerika Serikat, pada masa Presiden Chen yang dihukum oleh Legislatif Yuan. Peristiwa tersebut adalah kasus pertama sebelum 2001. Program pengadaan alutsista tersebut kemudian dihadapkan pada situasi politik yang rumit. Perbedaan dua kubu pada referensi program dan pendapat masing-masing dari berbagai pemikiran, menjadi pembahasan yang semakin memanas di Legislatif Yuan, dan berujung kepada keputusan yang tidak lagi objektif dan rasional.

Pemerintah Partai Demokrasi Progresif di bawah pimpinan Presiden Chen kala itu, mendapat kritikan dari Amerika Serikat, sehingga Presiden Chen harus menjelaskan kepada Richard Bush, mantan Kepala Institut Amerika di Taiwan, tentang kesalahpahaman jadwal program pengadaan alutsista tersebut. Menurut Presiden Chen, penyebabnya adalah tarik-menarik kepentingan di dalam pemerintahan.

Prosedur pembelian kapal perang jenis *destroyer* ini sangat berbeda dengan prosedur yang berlaku pada Era Partai *Kuomintang* berkuasa. Di masa

¹²² *Ibid.*, hal. 167.

lalu, untuk menyelesaikan pengadaan senjata secepat mungkin, operasi pada Era *Kuomintang* dilakukan secara rahasia. Namun pada saat Partai Demokrasi Progresif berkuasa, hal tersebut tidak bisa dilakukan karena menolak adanya otorisasi seperti itu, dan mungkin juga karena Pemerintahan Chen tidak punya uang.

Sementara itu, pada 2010 Taiwan merencanakan untuk memangkas jumlah tentaranya sebanyak 9200 personil¹²³. Namun pemangkasan jumlah personil tersebut juga diimbangi dengan penggantian persenjataan canggih dan terbaru. Pengurangan jumlah personil tersebut merupakan bagian dari rencana lima tahun yang bertujuan memangkas postur Angkatan Bersenjata Taiwan hingga 60.000 orang, atau lebih dari 20 persen dari jumlah saat ini sebanyak 275.000 tentara. Namun Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan bahwa kemampuan pertahanan mereka tidak akan menurun, karena digantikan dengan sejumlah persenjataan yang canggih dan lebih baik mutunya.

Dinamika kebijakan pertahanan Taiwan terus bergerak seiring berjalannya waktu. Terkait ketegangan hubungan dengan China, hubungan dua pihak telah mengalami kemajuan yang lumayan signifikan, menyusul Presiden Taiwan Ma Ying-jeou, dari Partai Kuomintang yang bersahabat dengan China, menjabat pada 2008 dan menjanjikan peningkatan hubungan dagang serta pariwisata lintas Selat Taiwan¹²⁴.

Secara politis, istilah reformasi itu sangat menarik namun terkadang dengan penanganan yang tidak baik, justru akan menjadi langkah yang salah, tidak relevan dan bahkan cacat. Reformasi, perubahan atau inovasi tidak berdiri sendiri, tapi harus melalui suatu proses. Reformasi adalah hasil dari gabungan beberapa proses pengambilan keputusan¹²⁵. Pada kenyataannya, proses pengambilan keputusan (secara umum atau khusus) sering muncul dengan sendirinya terutama di masa tenang, dan jarang terjadi di masa vakum. Keputusan

123 Taiwan Kurangi Jumlah Tentara,
<http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=179586:taiwan-kurangi-jumlah-tentara&catid=16&Itemid=29>, paragraf 1 (diakses pada 4 April 2011).

124 Zhu Xianlong, *loc.cit.*,

125 Samuel P. Huntington, *The Common Defense: Strategic Programs in National Politics*, 1961, (New York: Columbia University Press), hal. 287.

bahkan lebih sering diambil di tengah kondisi politik yang kompleks, yakni saat pihak yang berperan sebagai pengambil keputusan sedang dihadapkan kepada berbagai macam kepentingan secara terus-menerus. Akibatnya, mereka cenderung kesulitan untuk menentukan prioritas utama di situasi semacam itu, karena penuh kepentingan dan akhirnya berpotensi bermuara kepada konflik.

Ada dua kemungkinan yang muncul jika reformasi lahir di tengah-tengah ragam kepentingan, yakni: Pertama, hasil yang diinginkan salah satu pihak tertentu, belum tentu sesuai dengan keinginan pihak yang lain. Perubahan itu pada dasarnya diwarnai konflik karena menawarkan keuntungan di satu pihak, dan di saat yang sama memaksa pihak lain untuk membayar keuntungan itu. Kemungkinan selanjutnya adalah reformasi yang menjadi jalan keluar malah menimbulkan masalah di pihak lain. Penyebabnya, efektivitas sebuah organisasi tergantung pada banyak faktor, dan tidak semuanya saling mendukung. Jika terjadi, maka selanjutnya lahir dilema.

Dari sudut pandang ini, reformasi (dalam bidang dan lingkup apapun) tidak selalu menjamin kemajuan dalam hal kemampuan ataupun dijadikan solusi dari masalah internal suatu negara (aktor). Reformasi yang dianggap lurus pun bahkan masih bisa gagal kecuali berdasarkan ide yang meyakinkan dan menyeluruh. Oleh karena itu, reformasi harus dimaknai dengan baik, sepenuh hati (sungguh-sungguh) dan dilakukan dengan tindakan nyata (tidak sebatas slogan).

Pada dasarnya, konflik antara China dengan Taiwan merupakan masalah internal antara 'negara induk' dengan 'anaknya'. Namun persengketaan mereka telah menjadi perhatian dunia karena telah (dan berpotensi selalu) mengganggu stabilitas keamanan kawasan Asia Timur. Persengketaan yang berpotensi menjadi konflik terbuka antara dua aktor serumpun ini, memperkeruh situasi di wilayah sekitar Selat Taiwan. Taiwan yang mempunyai tentara sendiri, menjadi salah satu penyebabnya. Meski kekuatannya jauh di bawah China, para petinggi di Taiwan masih cukup percaya angkatan bersenjata yang dimiliki oleh Taiwan cukup untuk membela diri dari serangan China.

Kepercayaan diri tersebut bahkan menginspirasi rakyat Taiwan. Sebuah hasil survei pada pertengahan 2010 menyimpulkan, kebanyakan orang Taiwan

tidak takut perang dengan China, tapi publik negeri itu mempunyai sentimen negatif terhadap pemerintah serta penduduk di China daratan¹²⁶. Dalam skala satu sampai sepuluh, di mana satu artinya tidak takut sama sekali dengan peluang terjadinya perang, rata-rata responden menjawab skala 3,2. Dalam survei yang digalang oleh *United Daily News* tersebut, 54 persen dari para responden mengungkapkan sentimen negatif mereka terhadap pemerintahan China yang mereka sebut bersikap ‘otoriter’ dan ‘korup’. Sedangkan 31 persen lainnya menyatakan kesan positif, menyebutkan pemerintahan China bersifat ‘efisien’ dan ‘bersahabat’.

Survei itu juga mendapati bahwa 47 persen responden menilai penduduk China daratan sebagai masyarakat yang ‘tidak berbudaya’ dan ‘terlalu perhitungan’. Di antara 38 persen responden yang menyatakan hal positif tentang penduduk China, menyebut mereka sebagai orang-orang yang ‘hangat’ dan ‘rajin’.

Survei itu dirilis setelah lebih dari dua tahun politisi yang ‘erat’ dengan Beijing, Ma Ying-jeou, berhasil menjadi Presiden Taiwan. Ma menjanjikan ekonomi Taiwan yang lebih baik dengan cara mengeratkan hubungan Taiwan dengan China daratan.

Meski hasil survei menyebutkan rakyat Taiwan tidak takut jika harus berperang melawan China, postur militer Taiwan yang jauh di bawah China, tetap menjadi tolok ukur. Ketidak-mampuan Taiwan mengimbangi China inilah yang ‘dimanfaatkan’ Amerika Serikat, dengan cara menerapkan politik standar ganda terhadap China dan Taiwan. Kebijakan Amerika Serikat yang didasarkan pada pilihan logis yang lebih menguntungkan bagi kepentingan nasionalnya, akan bersifat kondisional. Pada saat ini Amerika Serikat mungkin akan membatalkan penjualan senjata ke Taiwan, demi hubungan baik dengan China. Tetapi pada saat Amerika Serikat bermasalah dengan China, bukan hal yang tidak mungkin Amerika Serikat akan memasok senjata ke Taiwan, meski senjata yang dijual bukan senjata yang canggih.

126 Orang Taiwan Tidak Takut Perang Dengan China,
<<http://www.antaraneews.com/berita/1284199547/orang-taiwan-tidak-takut-perang-dengan-china>>, paragraf 3, (diakses pada 25 April 2011).

Pada 1991, Taiwan secara resmi memberlakukan kebijakan konfrontasi bersenjata dengan China, dan telah berlanjut untuk menurunkan beban pertahanan yang sesuai. Meski ancaman militer dari China muncul kembali pada 1995, Taiwan tidak membuat semacam investasi baru besar-besaran dalam kemampuan pertahanan dan mobilisasi pertahanan, padahal dua hal itu sangat disarankan untuk mengimbangi kekuatan militer China. Kekokohan postur pertahanan pada dasarnya bisa dimanfaatkan untuk tujuan politik, untuk mendukung perlawanan terhadap prinsip 'Satu China' dan sebagai sarana untuk memenangkan dukungan politik internasional demi pengakuan secara *de jure* terhadap negara mereka (Taiwan).

III. 4 Antisipasi Taiwan Terhadap Strategi China

Perbedaan kekuatan militer antara China dengan Taiwan yang tidak berimbang, telah melahirkan pesimis di kalangan pejabat tinggi Taiwan, seperti yang diakui oleh salah satunya, yakni Sekretaris Jenderal partai berkuasa Taiwan, Partai Nasionalis (Kuomintang/KMT), Wu Den-yih yang menyatakan, "Melihat kekuatan militer China, banyak orang yang ragu Taiwan akan bisa menang perang jika mengandalkan kekuatannya sendiri"¹²⁷. Meski China terbukti sulit untuk dicegah, Taiwan harus bersiap untuk menunjukkan bahwa serangan dari China akan selalu mendapatkan perlawanan yang kuat. Langkah-langkah khusus yang perlu dilakukan Taiwan, di antaranya:¹²⁸

- 1) Kesiapan pasukan militer yang ditempuh dengan latihan rutin yang keras sangat penting untuk dilakukan. Angkatan Bersenjata Taiwan harus bekerja untuk melawan semua serangan TPR China, baik melalui angkatan udara atau angkatan laut, strategi anti-kapal selam dan kemampuan menyapu ranjau, yang harus diberikan prioritas tinggi.
- 2) Perbaikan moral militer Taiwan juga harus dibenahi. Taiwan berharap untuk lebih mencegah TPR China yang menunjukkan kekuatan dan tekad, tanpa terlalu provokatif.

127 Ancaman Militer China Meningkat, 2009, <<http://internasional.kompas.com/read/2009/09/02/05554688/ancaman.militer.china.meningkat>>, paragraf 7, (diakses pada 26 Februari 2011).

128 Zhu Xianlong, *loc.cit.*,

- 3) Perencana pertahanan Taiwan juga harus fokus pada keberlanjutan-kemampuan terus berperang selama beberapa hari, bahkan saat peristiwa invasi besar-besaran terjadi dan keadaan terlihat semakin mendesak. Setiap usaha yang diambil harus dapat memastikan pasukan Taiwan tetap bisa bertahan dan melanjutkan perang. Untuk mencapai tujuan ini, penting untuk mengembangkan desentralisasi komando dan kontrol. Hal ini akan membantu memastikan bahwa kerusakan atau inaktivasi dari beberapa pusat komando kunci, tidak menghancurkan kapasitas untuk koordinasi dan pengendalian seluruh pasukan militer Taiwan. Semakin lama pasukan Taiwan mampu bertahan dalam sebuah invasi, semakin besar kemungkinan akan bahwa bantuan militer asing akan datang untuk membantu.
- 4) Para pemimpin Taiwan harus terus menekankan bahwa respon militer Taiwan atas invasi yang dilakukan China, merupakan wujud dari deklarasi langsung bagi kemerdekaan Taiwan. Hal ini merupakan pesan kepada China untuk tidak memulai menyerang Selat Taiwan. Untuk menjamin hal ini, Taiwan harus menunjukkan keinginan yang jelas untuk melanjutkan dialog yang berkelanjutan dengan China pada isu-isu kepentingan bersama.

Berbagai langkah antisipatif juga wajib diperhatikan oleh Taiwan, karena sebuah laporan lain menyebutkan bahwa, dampak yang ditimbulkan jika China melancarkan serangan ke Taiwan diperkirakan tidak hanya mampu menghancurkan seratus sarana di Taiwan, namun serangan balik Taiwan juga diperkirakan akan mudah diapatahkan. Di sisi lain, wilayah Taiwan yang sempit berpotensi menyebabkan masyarakat sipil jatuh menjadi korban, khususnya di wilayah Baratnya. Belum lagi wilayah Taiwan Selatan dan Taiwan Utara juga, berpotensi mudah 'dikuasai' China karena secara geografis, Taiwan yang berbentuk pulau cenderung terisolasi sehingga China akan lebih 'mudah' menguasainya, dan 'Taiwan pun akan menderita kelumpuhan serius'¹²⁹.

Data terakhir pada Maret 2011 menyebutkan, China terus berambisi meningkatkan kapabilitas (termasuk anggaran dan postur) militer mereka. Meski

129 *Ibid.*,

China berusaha meyakinkan dunia bahwa anggaran sebesar itu hanya demi memperbarui kekuatan militernya yang dinilai telah ketinggalan zaman dan bukan ancaman kepada siapapun, sejumlah negara di kawasan Asia Timur dan Amerika Serikat was-was¹³⁰. Untuk tahun ini (2011), China mematok anggaran militer mereka pada level 12,7 persen dari total anggaran belanja negara mereka, tepatnya 91,48 miliar dollar AS. Angka tersebut naik dari 70,3 miliar dollar AS di 2009¹³¹.

Berikut beberapa fakta tentang kemampuan militer China, modernisasi sistem pertahanan, dan beberapa sistem persenjataan yang dilakukan pada tiga mata TPR, yang dicapai sampai dengan 2011:

1) Angkatan Udara:

- China melakukan uji coba pertama pesawat jet siluman J-20, yakni pesawat berawak (pilot) tunggal dengan mesin ganda. Ukurannya lebih besar dan lebih berat jika dibandingkan dengan dua pesawat siluman milik Rusia dan Amerika Serikat, F-22 Raptor dan Sukhoi T-50. Spesifikasinya belum diketahui, tapi setidaknya pesawat siluman milik China ini memiliki panjang 75 kaki. Awal pengembangan proyek jet tempur siluman China dikabarkan telah dimulai pada dasawarsa 1990-an. Kantor US Office of Naval Intelligence (ONI) melaporkan bahwa, sebuah jet tempur canggih dengan mesin ganda sedang dibangun di Shenyang Aircraft Corporation (SAC) pada tahun 1998. Sebuah pesawat yang dikenal dengan nama J-12. Dan pada tahun 2002, Shenyang Aircraft Corporation (SAC) telah dipilih untuk penelitian dan pengembangan pesawat-pesawat tempur yang dibutuhkan China pada abad 21. Salah satunya adalah pesawat yang dikenal dengan nama XXJ atau Chengdu J-20. Pesawat tempur yang diproyeksikan untuk dua orang awak serta memiliki kelas dan kemampuan yang sama dengan F-22 Raptor milik Amerika Serikat¹³². China memamerkannya langsung di hadapan Menteri Pertahanan Amerika

¹³⁰ Kekuatan Militer China Kian Angker, 2011, <http://www.metrotvnews.com/read/news/2011/03/04/44329/Kekuatan-Militer-China-Kian-Angker/>, paragraf 1, (diakses pada 30 mei 2011).

¹³¹ *The Military Balance 2010*, *op.cit.*, hal. 398.

¹³² Belajar Mandiri Dari China, <<http://www.tiket-penerbangan.com/2011/01/pesawat-siluman-chengdu-j-20-buatan.html>>, 2011, paragraf 3, (diakses pada 4-April-2011).

Serikat, Robert Gates, yang saat itu sedang mengunjungi China. Atraksi itu segera menyulut ketegangan antara dua negara¹³³. Beberapa analis bahkan meyakini ketegangan dipicu oleh keberhasilan China mengembangkan J-20 yang menandakan negara ini mengalami kemajuan lebih pesat dari yang diperkirakan sebelum ini. China dianggap menjadi satu-satunya saingan terhadap pesawat tempur milik Amerika Serikat, F-22 Raptor buatan Lockheed Martin, yakni satu-satunya pesawat tempur di dunia yang dirancang untuk mengelabui radar musuh.

- China sedang mengembangkan kapasitas disain yang tangguh lewat Su-30 dan Su-27 yang keduanya buatan Rusia dan pesawat tempur China paling tangguh yang berpotensi membahayakan Amerika Serikat.
- Modernisasi angkatan udara juga termasuk dalam mengembangkan kapasitas isi ulang bahan bakar yang bisa menambah jarak tempuh pesawat-pesawat tempur dan pesawat pengintai China.

2) Angkatan Laut:

- China kini sedang memperbarui kapal perusak dan *fregat* agar bisa berlayar lebih jauh serta berdaya serang lebih dasyat.
- China diprediksi akan meluncurkan kapal induk pertamanya pada 2011 ini, atau satu tahun lebih cepat dari yang diperkirakan para analis militer Amerika Serikat. Dana yang dibutuhkan untuk membangun dua kapal induk berbobot 60.000 ton sama dengan kelas Kuznetsov buatan Russia, adalah sekitar dua miliar dollar AS.
- China sedang mengembangkan peluru kendali untuk kapal selam terbarunya dari kelas Jin terbaru, yang bisa meluncurkan rudal berhulu ledak nuklir dari bawah laut¹³⁴. Pejabat militer Amerika Serikat memperhatikan perkembangan terbaru yang menunjukkan peningkatan kapabilitas China, terutama dalam bidang peluru kendali antikapal lautnya yang bisa membahayakan kapal induk mereka. pengalaman keberhasilan

133 *The Military Balance 2010, op.cit.*,

134 *Ibid.*,

China meluncurkan sebuah rudal yang bisa menghancurkan sebuah satelit tua pada 2007 menunjukkan sebuah tingkatan baru yang berhasil diraih militer China. China juga sukses melakukan uji coba sebuah teknologi rudal baru yang bisa merontokkan roket di udara pada Januari 2010.

- China juga membangun markas angkatan lautnya di Hainan, sebuah provinsi kepulauan di selatan yang bisa menangani serangan kapal selam.

3) Angkatan Darat

- China sedang berusaha merampingkan personel angkatan daratnya yang berjumlah 2,3 juta orang, menjadi pasukan lebih kecil, ramping dan punya kemampuan tempur jarak dekat serta menghadapi konflik berintensitas tinggi saat melawan musuh yang lebih canggih.
- China diperkirakan mempunyai 1.400 rudal yang diarahkan ke Taiwan. Tujuannya, memenuhi janji mereka yang akan mengembalikan Taiwan yang demokratis ke bawah kekuasaannya dengan cara apapun, bila perlu dengan kekuatan militer.

Di lain pihak, Taiwan justru menurunkan anggaran pertahanannya, dari 10,49 miliar dollar AS pada 2008, menjadi hanya 9,7 miliar dollar AS pada 2009. Kapabilitas militer Taiwan juga justru berkurang, seiring rencana modernisasi persenjataan mereka (termasuk bagian dari rencana lima tahun) yang bertujuan memangkas postur angkatan bersenjata Taiwan hingga 60.000 orang, atau lebih dari 20 persen dari jumlah saat ini sebanyak 290.000 tentara, dengan rincian: 200.000 tentara angkatan darat, masing-masing 45.000 tentara angkatan laut dan udara¹³⁵.

Meski pada Januari 2010, Taiwan mendapat ‘bantuan’ persenjataan dari Amerika Serikat berupa rudal *Patriot*, helikopter *Black Hawk*, dan perlengkapan untuk skadron tempur F-16 Taiwan, namun paket persenjataan tersebut tidak dilengkapi kapal selam maupun jet tempur baru. Padahal, China mempunyai kekuatan udara dan laut yang kuat. Setidaknya, Cina memiliki 1.900 mesin perang

135. *Ibid.*, hal. 427.

angkatan udara, dan juga sebanyak 760 mesin perang angkatan laut¹³⁶. Amerika Serikat sebagai pengeksport utama senjata ke Taiwan, tidak berarti memenuhi semua kebutuhannya.

Ada sejumlah tahap yang harus dilewati sebelum Amerika Serikat mengabulkan permintaan senjata dari Taiwan, yakni harus melalui persetujuan Presiden Amerika Serikat dan diumumkan secara formal kepada Kongres. Setelah itu, pemerintah menetapkannya sebagai laporan pers yang termasuk bagian dalam program FMS (*Foreign Military Sales*) lingkup antar-pemerintahan suatu negara. Sebelum Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengabari lewat *Letters of Offer and Acceptance*, presiden harus memberitahukan FMS kepada Kongres sebagai syarat dari *Arms Export Control Act (AECA)*¹³⁷.

Dilihat dari lingkup internal (domestik), kebijakan pertahanan keamanan Taiwan tidak berdasarkan kebutuhan nasional. Keseluruhan dari lemahnya koordinasi strategi membuat akademisi berpendapat, kebijakan pertahanan luar negeri Taiwan lebih banyak dipengaruhi oleh sikap politis dan visi perseorangan dari pimpinan, yakni presiden¹³⁸. Faktor itulah yang sangat mempengaruhi penetapan kebijakan, khususnya keputusan dalam hal melengkapi persenjataan. Contohnya, penawaran pembelian paket persenjataan yang terdiri dari pesawat tempur tipe 12P-3C Orion ASW dan rudal *Patriot 2* dari Amerika Serikat pada 2001, baru disetujui pembeliannya enam tahun kemudian, yakni pada Juni 2007¹³⁹.

Inisiatif seorang presiden juga terlihat saat Presiden Taiwan Lee Teng Hui tidak menaruh perhatian pada perbaikan struktur kekuatan dan pengambilan keputusan terhadap pengadaan persenjataan. Presiden Lee berpandangan, China tidak akan menyerang Taiwan karena dua tujuan utama China yakni mempersatukan kembali Taiwan dan pencapaian stabilitas perekonomian,

136 China Menuju Yang Terkuat Di Dunia, <<http://forum.detik.com/militer-china-menuju-yang-terkuat-di-dunia-t212674.html>>, 2011, paragraf 5, (diakses pada 30 mei 2011).

137 Shirley A. Kan, *loc.cit.*, paragraf 8.

138 Michael D. Swaine, *Taiwan's National Security, Defense Policy, and Weapons Procurement Processes*, 1999, (Washington DC: RAND's National Defense Institute), hal. 73-74.

139 *The Military Balance 2008*, *op.cit.*, hal. 361.

bukannya menyerang untuk menguasai Taiwan¹⁴⁰. Presiden Lee melihat China selama ini hanya menakut-nakuti (*coercion*) Taiwan dengan melakukan latihan militer di sekitar Taiwan, serta memamerkan kapabilitas militernya melalui berbagai macam senjata canggih dan dalam kuantitas banyak. China belum pernah mengancam Taiwan dengan serangan militer yang nyata. Dengan kata lain, China'hanya' mengancam secara psikologis.

III. 5 Formulasi, dan Implementasi Kebijakan Pertahanan Taiwan

Proses penetapan kebijakan pertahanan Taiwan seperti formulasi dan implementasi tujuan strategis, serta prinsip utama yang dianut dalam keamanan domestik dan luar negeri Taiwan, berada di tangan pimpinan sipil dan militer pada waktu yang bersamaan. Meski telah diatur oleh Undang-Undang, proses ini sangat tidak terkoordinasi dengan baik di tingkat pimpinan, elit sipil maupun militernya.

Ada lima pihak yang paling berwenang menentukan sebuah kebijakan pertahanan di Taiwan, yakni:¹⁴¹

- 1) Presiden,
- 2) Menteri Pertahanan,
- 3) Panglima Angkatan Bersenjata (militer) Taiwan,
- 4) Panglima operasional Angkatan Bersenjata (militer) Taiwan,
- 5) Badan Eksekutif Yuan.

Berdasarkan Undang-Undang Pertahanan Taiwan Tahun 2002, mekanisme pembuatan keputusan kebijakan pertahanan harus melalui Presiden, Dewan Keamanan Nasional (*National Security Council*), Badan Eksekutif Yuan dan Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan (*Minister of National Defence/ MND*), untuk memastikan kebenaran arah dari keputusan yang diambil, serta menjamin terpenuhinya suara mayoritas di masyarakat¹⁴². Secara sederhana, mekanismenya adalah Kantor Kementerian Pertahanan memberikan laporan ke Presiden dalam

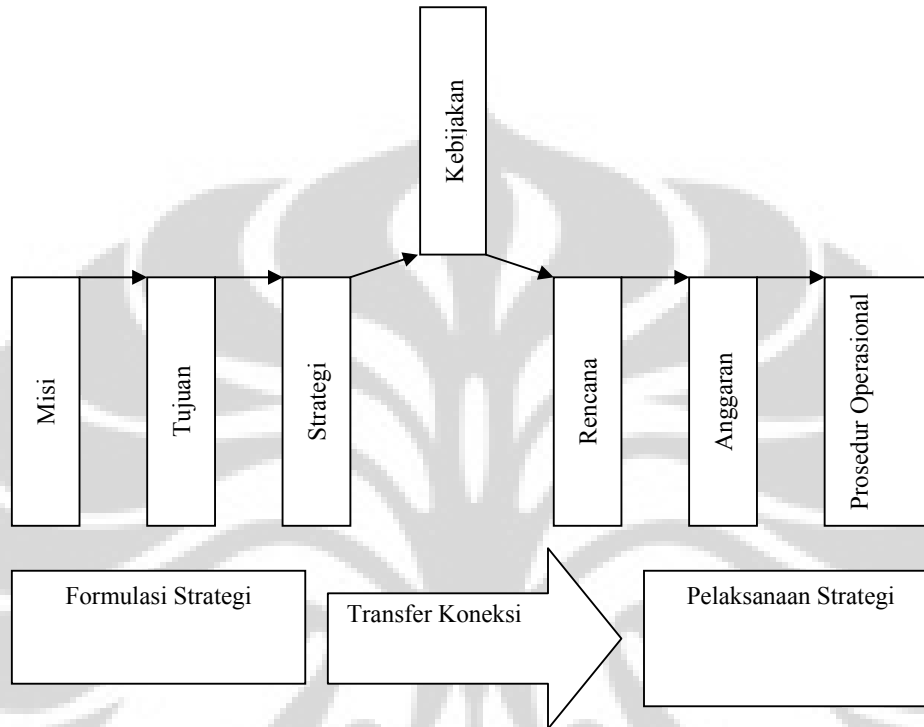
140 Michael D. Swaine, *op.cit.*, hal. 33-34.

141 *Ibid.*,

142 Ching-Pu Chen, Defense Policy-Making And Civilian Roles, dalam Martin Edmonds and Michael M. Tsai, *op.cit.*, hal. 81.

Rapat Kemiliteran, dan juga di Rapat Badan Eksekutif Yuan. Skema sederhananya sebagai berikut:

Gambar 3.1 Alur Formulasi Kebijakan Pertahanan Taiwan



Sumber: Martin Edmonds and Michael M. Tsai, *Taiwan's Defense Reform*, hal. 81.

Posisi Presiden adalah tepat di tengah-tengah proses pembuatan kebijakan pertahanan Taiwan, karena Presiden punya *power* untuk membuat keputusan. Selain itu, ie dasarnya diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Pertahanan Taiwan yang menyebutkan, “Presiden dengan dibantu oleh Dewan Keamanan Nasional bertanggungjawab untuk memformulasikan garis besar pertahanan nasional dan strategi keamanan nasional”. Setelah diintegrasikan oleh Eksekutif Yuan, kebijakan pertahanan kemudian dijabarkan oleh Presiden. Selanjutnya, kebijakan pertahanan (militer) atau bagian utama dari kebijakan keamanan nasional tersebut, diformulasikan dan ditindaklanjuti oleh Departemen Pertahanan Nasional Taiwan¹⁴³.

143 *Ibid.*,

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Pertahanan Nasional Taiwan, tugas dari Eksekutif Yuan adalah memformulasikan kebijakan pertahanan, mengintegrasikan seluruh kekuatan nasional dan mengontrol departemen-departemen yang berada di bawah yurisdiksinya. Badan Eksekutif Yuan mempunyai wewenang atas semua organisasi administrasi, atau dengan kata lain sesuai dengan definisi dari Huang Lu-shin tentang kebijakan pertahanan nasional, yakni gabungan dari perencanaan, inisiatif dan aksi yang diambil oleh sebuah negara untuk mencapai tujuan keamanan baik di masa damai atau peperangan untuk menghalau ancaman militer dari luar, dan menekan kekacauan yang terjadi di dalam negeri¹⁴⁴.

Dilihat dari Undang-Undang Pertahanan Nasional, Badan Eksekutif Yuan harus mengintegrasikan seluruh kekuatan nasional dan memformulasikan kebijakan pertahanan termasuk sisi politisnya, ekonomis, militer, psikologis dan kebijakan teknologi. Selain itu, Eksekutif Yuan juga bertanggung jawab mengintegrasikan semua institusi untuk membantu Kementerian Pertahanan Nasional guna mencapai/meraih tujuan militer, yakni pencapaian keamanan nasional untuk menjamin keamanan nasional dan juga kesejahteraan serta keamanan masyarakat¹⁴⁵.

Sedangkan Pasal 11 Undang-Undang Pertahanan Nasional Taiwan mengatur tanggungjawab Kementerian Pertahanan Nasional, yakni mengembangkan fungsi profesionalitas dalam administrasi serta komando militer, dan angkatan bersenjata¹⁴⁶. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga bertugas menyiapkan usulan kebijakan pertahanan, dan memformulasikan strategi militer berdasarkan kebutuhan dari pertahanan keamanan nasional, serta harus bisa memformulasikan strategi militer dan usulan yang terkait kebijakan elemen militer dan pertahanan-keamanan.

Dengan kata lain, lingkup pertahanan nasional meliputi keseluruhan kekuatan nasional, termasuk semua kemampuan/kapabilitas dan kekuatan pertahanan, termasuk sisi politis, ekonomi, psikologi, dan angkatan bersenjata itu

144 Huang Lu-shin, *Military Politics*, 2002, (Taipei: Rye Field Publishing Co.), hal. 36.

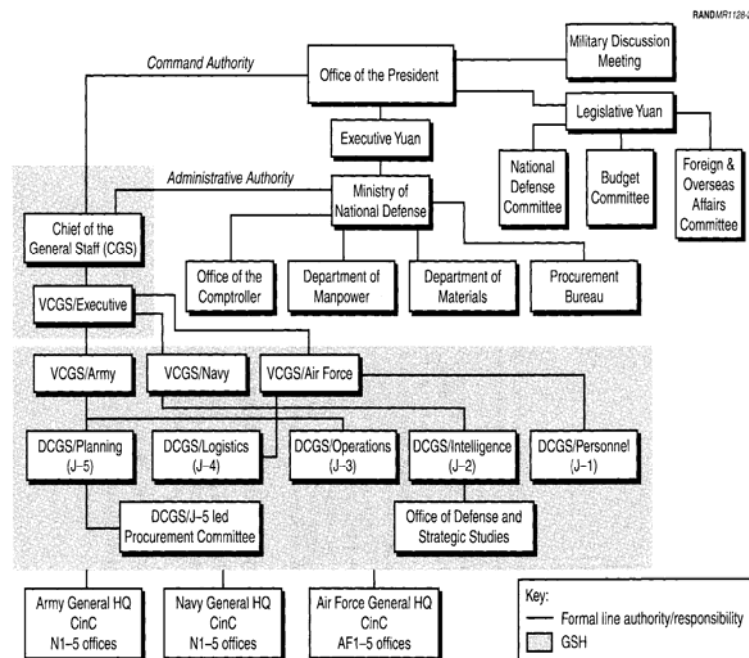
145 *Ibid.*, hal. 82.

146 *Ibid.*, hal. 83.

sendiri, baik yang secara langsung maupun tidak langsung terjun ke medan pertempuran, guna mencapai tujuan pertahanan untuk menjaga keamanan nasional dan menjaga perdamaian dunia.

Berdasarkan Laporan Pertahanan Nasional Taiwan pada 2002, Presiden diharuskan untuk ikut serta dalam kebijakan keamanan nasional, atau kebijakan pertahanan nasional dalam konteks yang lebih luas (luar negeri), dan dibantu Kementerian Pertahanan Nasional yang memformulasikan dan menyusun kebijakan pertahanan nasional. Inilah kesalahpahaman yang terjadi dalam mengartikan Undang-Undang Pertahanan Nasional. Jika digambarkan dalam sebuah tabel, berikut ini:

Gambar III. 2 Struktur Pihak-Pihak Berwenang Dalam Penentuan Kebijakan Pertahanan Taiwan



Sumber: Michael Swaine, *Taiwan's National Security, Defense Policy, and Weapons Procurement Processes*, 1999, (Washington DC: RAND's National Defense Institute), hal. 30.

Khusus untuk dua tahun terakhir, di mana Taiwan menurunkan anggaran pertahanannya, turut dipengaruhi oleh inisiatif sang Presiden terpilih, Ma Ying-Jeou, yang berasal dari Partai Kuomintang. Ma Ying-Jeou terpilih sebagai Presiden Taiwan dari partai oposisi, Kuomintang, pada 20 Mei 2008. terpilihnya Ma mengembalikan dominasi Partai Kuomintang di Taiwan setelah ‘terputus’ antara 2000-2007, di mana Partai Demokratik Progresif memimpin Taiwan melalui salah seorang kadernya, Chen Shui Bian. Ma merupakan seorang pengacara dan menjadi menteri kabinet termuda pada 1988. Sebagai menteri keadilan pada periode 1993-1996, Ma Ying Jeou memperoleh reputasi baik dalam memerangi korupsi, dan memenangkan kembali pemilihan walikota Taipei dalam pemilu 1998¹⁴⁷. Presiden Ma dikenal lebih ‘lunak’ menghadapi China dan berniat tidak mengadakan referendum untuk kemerdekaan Taiwan dari China. Tetapi sikap Ma yang menghormati China, tidak sepenuhnya mendapat apresiasi dari China karena Presiden Ma menyatakan bahwa Taiwan sebagai negara yang berdaulat dan ini yang akan dibawa dalam posisi hubungan bilateral dengan China¹⁴⁸.

Anggapan Taiwan sebagai negara berdaulat selalu membuat marah China. Hal tersebut terkait dengan janji yang mereka pegang, yakni akan menyerang Taiwan dengan menggunakan kekuatan militer jika Taiwan berniat memerdekakan diri, dan lepas dari China. Tetapi respon Taiwan relative ‘dingin’ menanggapi ancaman ‘induk’ mereka. Taiwan seolah menyadari kesimbangan kapabilitas militer di Selat Taiwan nyaris mustahil bisa tercapai. Tetapi perbincangan mengenai tema ini masih sering dilakukan dan dianggap menarik untuk dibahas, khususnya memperhatikan respon Taiwan.

Peningkatan kapabilitas militer China yang terus merasa tidak aman justru dianggap ancaman oleh tetangga-tetangganya, termasuk Taiwan. Dengan kata lain, peningkatan kapabilitas militer China sudah menciptakan dilema keamanan¹⁴⁹. Apalagi baik China maupun Taiwan lebih cenderung

147 Taiwan's Profile, *loc.cit.*, paragraf 15.

148 Ma: Taiwan Negara Berdaulat,

<<http://international.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/03/24/18/94038/ma-taiwan-negara-berdaulat>>, paragraf 4, 2008, (diakses pada 21 Maret 2011).

149 Nurani Chandrawati, *loc.cit.*, hal. 27.

mengedepankan strategi bertahan, sehingga besar kemungkinannya terjadi dilema keamanan. Robert Jarvis menyatakan situasi yang terjadi memungkinkan untuk terciptanya dilema keamanan, ada masalah keamanan karena aktor-aktor saling bertahan satu sama lain. Tetapi karena sikap menyerang mempunyai keunggulan, maka serangan sangat mungkin terjadi, bahkan cenderung lebih mudah dilakukan.¹⁵⁰ Jika kondisi seperti ini, kemungkinan konflik pecah menjadi perang cukup besar. Kondisi kapabilitas militer (kekuatan) yang tidak seimbang antara China dengan Taiwan, termasuk salah satu syarat terjadinya perang.

Terlepas dari intervensi Amerika Serikat yang akan membantu Taiwan saat menghadapi China, Taiwan perlu mempertimbangkan beberapa langkah agar keamanan lintas Selat Taiwan tetap terjaga. Dalam membahas masalah keamanan berarti kita menghubungkan antara pengertian klasik (keamanan nasional) dengan pengertian yang luas tentang relevansi dinamika. Tidak saja pada dinamika hubungan antarnegara, tetapi juga kualitas dari politik internasional dan dinamika sub-negara. Dalam tingkatan di luar kajian domestik negara, keamanan tidak dapat disimpulkan dengan cara yang sama karena adanya berbagai interaksi dalam tiga tingkatan yaitu internal negara, lingkungan regional dan sistem internasional. Namun isu keamanan harus tetap dilihat sebagai keamanan nasional sebagai sifat dasar dari sistem internasional. Pemerintah harus menghadapi dinamika internal dalam negara maupun eksternal di luar negara. Sehingga dibutuhkan rekonsialisasi dalam perumusan strategi keamanan internasional.

Informasi yang akurat merupakan syarat mutlak. Tetapi dalam dunia nyata informasi yang akurat sulit diperoleh, sehingga berdampak pada rasionalisasi dalam pengambilan keputusan. Perlu dirumuskan kendala-kendala dalam memperoleh gambaran situasi keamanan internal maupun eksternal untuk menjawab tantangan masalah ketidakamanan dan kerawanan. Logika kemudian berpengaruh pada pembuatan kebijakan keamanan yang berupa pilihan strategis dan karakteristik masalah keamanan yang dilaksanakan untuk menghadapi penerapan secara logis.

¹⁵⁰ Robert Jervis, *loc.cit.*, hal. 400.

Dalam hal ini makna dari pilihan strategi adalah tujuan dari kebijakan keamanan nasional yaitu membuat negara merasa aman walaupun tidak secara absolut. Namun rasa aman tidak semata-mata tercipta pada saat negara mampu mengatasi kerawanan tetapi juga dalam menghadapi ancaman dari luar.

Pilihan untuk mengurangi kerawanan dan berupaya membatasi atau mengurangi ancaman dengan mencari penyebab dasarnya. Pilihan pertama adalah strategi keamanan nasional untuk mengurangi kerawanan. Sedangkan pilihan kedua strategi keamanan internasional untuk menghadapi ancaman. Keduanya sangat bergantung pada pernyataan hubungan antarnegara secara langsung atau melalui perubahan dalam kondisi sistemik. Dapat digambarkan bahwa kebijakan keamanan lahir untuk mengatasi kerawanan, meningkatkan kemampuan diri atau membangun kekuatan penangkal untuk dapat mengantisipasi ancaman secara spesifik. Pada akhirnya akan menghasilkan upaya untuk memperkuat kapabilitas militer, mencari aliansi yang sesuai dan memperkuat negara untuk menghadapi ancaman. Keuntungan yang diperoleh dari kondisi negara yang siap menghadapi ancaman walaupun kita tidak pernah dapat menilai apakah strategi yang dimiliki suatu negara benar-benar siap untuk menghadapi ancaman, karena ancaman itu sendiri tidak jelas.

Terkait dengan konflik China melawan Taiwan, pilihan bekerjasama dalam sebuah forum bersama merupakan pilihan paling bijak. Karenanya hubungan kerjasama ekonomi (perdagangan) dan pertukaran pelajar/ mahasiswa seperti yang sudah dilakukan China-Taiwan saat ini, perlu terus dipelihara. Meski Taiwan cukup percaya diri tidak akan diserang China karena ada bantuan dari Amerika Serikat, saudara muda China tersebut perlu mempertimbangkan stabilitas niat Amerika Serikat untuk menolong mereka, berhadapan dengan negara yang memiliki kekuatan militer cukup sepadan dan juga memiliki nuklir.

Kebijakan keamanan nasional yang menuju pada sistem internasional adalah lebih sebagai produk dari faktor-faktor internal, banyak di antara faktor-faktor tersebut bersifat luas dan mengandung prinsip-prinsip pembenaran. Kebijakan keamanan nasional sangat berpengaruh pada struktur negara. Bila

militer dominan dalam kebijakan keamanan nasionalnya, maka struktur negaranya juga didominasi oleh militer.

Jika faktor domestik lebih mendominasi pembuat kebijakan di hampir semua negara, maka sistem internasional sebagai timbal balik di antara unit-unit yang ada, menjadi lemah. Rosecrance mencatat satu-satunya alasan mendasar untuk berbagai tekanan dalam sistem internasional adalah formulasi, dan tujuan dari kebijakan yang sepenuhnya didasarkan alasan domestik. Struktur politik domestik harus lebih spesifik pada lingkungan informal. Kematangan tingkat anarki juga berpengaruh pada kematangan negara dalam mengantisipasi dinamika keamanan internasional¹⁵¹.

III. 6 Peluang Penyatuan Kembali Taiwan Dengan China

Sejumlah akademisi, analis dan pengamat menyatakan, hubungan China Taiwan saat ini memasuki babak baru, setelah 60 tahun terlibat dalam konflik serumpun berlandaskan ideologi. Semula, peristiwa yang dianggap menjadi awal perbaikan hubungan ini adalah terpilihnya Ma Ying Jeou sebagai Presiden Taiwan sejak 20 Mei 2008 dalam sebuah pemilihan yang demokratis¹⁵². Modal awalnya, presiden terpilih yang berasal dari partai oposisi, Kuomintang, dikenal sebagai pihak yang menghormati kebijakan 'Satu China', dengan tidak berniat mengadakan referendum untuk menentukan kemerdekaan Taiwan dari China. Selanjutnya, berbagai kerjasama dan langkah-langkah politis dalam upaya memperbaiki hubungan, disambut China dengan langkah perbaikan.

Peluang ini semakin terbuka dengan adanya pembukaan kembali jalur penerbangan perdana dari Guangzhou—China ke Taiwan pada 4 Juli 2008¹⁵³. Penerbangan perdana ini merupakan sejarah bagi kedua pihak, baik bagi China maupun Taiwan, karena selama mereka tidak akur terhitung sejak 1949, tidak pernah ada penerbangan langsung dari China ke Taiwan atau sebaliknya. Seiring

151 Nurani Chandrawati, *loc.cit.*, hal. 30.

152 Tommy Su, Era Baru Hubungan China-Taiwan, <<http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/25/00520740/era.baru.hubungan.china>>, 2008, paragraf 6, (diakses pada 21 Maret 2011).

153 Penerbangan Langsung Pertama Cina Taiwan, <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0807/04/lu02.html>>, 2008, paragraf 1, (diakses pada 22 Maret 2011).

dengan pembukaan kembali jalur penerbangan China-Taiwan, jalur pelayaran di Selat Taiwan pun kembali dibuka setelah ditutup bersamaan dengan penutupan jalur penerbangan pada 1949¹⁵⁴.

Dua peristiwa fenomenal tersebut kemudian ramai dianggap sebagai tonggak kembali bersatunya China dengan Taiwan. Petinggi di dua pihak yang berkonflik berharap pembukaan jalur transportasi utama tersebut bisa memperlancar kerjasama Cina dan Taiwan dalam bidang perdagangan. Tak ketinggalan bidang pariwisata juga diharapkan ikut terdongkrak dengan semakin banyaknya wisatawan yang saling berkunjung.

Membaiknya hubungan China dan Taiwan ini bergerak ke arah yang lebih formal, saat muncul kesepakatan kerjasama bidang perdagangan oleh ‘induk dan anaknya’ tersebut. Persetujuan Kerangka Kerjasama Ekonomi atau *Economic Cooperation Framework Agreement* (ECTA) ditanda-tangani pada 22 Desember 2009¹⁵⁵. Kesepakatan ini bahkan oleh beberapa pihak dianggap sebagai puncak kesuksesan komunikasi China-Taiwan sejak berkonflik pada 1949¹⁵⁶. Kemudian, dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai pembentukan pakta perdagangan antara China dengan Taiwan, yang baru memasuki putaran pertama yang dilakukan di Beijing pada 24 Januari 2010¹⁵⁷.

Selain melalui pembukaan pintu perdagangan, China dan Taiwan juga melakukan pertukaran pelajar¹⁵⁸. Salah satu langkah yang disambut gembira oleh Presiden Taiwan Ma Ying Jeou, yang menyebutkan penerbangan langsung dapat mengubah mentalitas orang. Presiden Ma berharap di masa mendatang mahasiswa Taiwan bisa terbang ke Shanghai untuk berakhir pekan dan mahasiswa China bisa belajar di universitas Taiwan. Lebih jauh, Presiden asal Partai Kuomintang tersebut menyebutkan pertukaran pelajar akan berdampak jangka panjang, karena

154 Cina Taiwan Jalin Kerjasama Bersejarah, <http://dunia.vivanews.com/news/read/7293-cina_taiwan_jalin_kerja_sama_bersejarah>, 2008, paragraf 2, (diakses pada 20 Mei 2011).

155 China-Taiwan Bekerjasama, <<http://internasional.kompas.com/read/2009/12/23/07371129/China-Taiwan.Bekerja.Sama>>, 2009, paragraf 3, (diakses pada 22 Maret 2011).

156 Taiwan's Profile, *loc.cit.*,

157 China-Taiwan Eratkan Hubungan Ekonomi, <http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/25/03164543/China-Taiwan.Eratkan.Hubungan.Ekonomi>, 2010, paragraf 6, (diakses pada 23 Maret 2011).

158 Angga Nurdin, *loc.cit.*,

dalam 20 atau 30 tahun ada teman sekolah di antara pejabat dan pemimpin Taiwan dan China dan berpotensi mempererat persahabatan demi perdamaian lintas selat. Presiden Ma Ying Jeou mengungkapkan kegembiraannya atas pertukaran pelajar China deng Taiwan saat menerima utusan parlemen Australia di Taiwan¹⁵⁹.

Sejumlah pengamat menganggap pernyataan Presiden Ma tersebut menyiratkan harapan terhadap pelajar sebagai agen perdamaian di Selat Taiwan. Mahasiswa maupun pelajar akan membawa persepsi mengenai kondisi yang ada di masing-masing daerah mereka dan menjelaskan kondisi tersebut pada masyarakatnya. Mahasiswa atau pelajar dianggap tidak memiliki muatan politis dan tidak akan kecurigaan dari masing-masing pihak terhadap mereka. Cara ini merupakan sebuah upaya tepat yang dilakukan untuk melakukan rekonsiliasi bagi kedua pihak yang telah lama berkonflik.

Dalam bidang militer, intensitas konflik yang telah mereda dan membaiknya hubungan dengan China ditandai Taiwan dengan merencanakan untuk mengurangi jumlah tentaranya hingga 16 persen dalam waktu lima tahun mendatang¹⁶⁰. Meski program pengurangan jumlah tentara ini sudah digalakan sejak Kebijakan Reformasi Pertahanan mereka berlaku pada 2002, program ini juga dilakukan Taiwan demi menjaga iklim hubungan yang menuju harmonis dengan China.

Terlepas dari hubungan China dengan Taiwan yang sedang menghangat, sejumlah pengamat hubungan internasional memprediksi akan ada resolusi atas kedaulatan Taiwan tanpa perlu serangan militer dari China. Salah satunya adalah pakar militer Asia di Akademi Studi Internasional S Rajaratnam di Singapura, Richard Bitzinger. Menurut Bitzinger, alasan utamanya adalah superioritas militer China dan ketergantungan ekonomi Taiwan pada China. Sejumlah pengamat mengaku China gencar membeli perlengkapan senjata dari Rusia. China juga mengembangkan pesawat tempur dan misil serta membangun militer berteknologi tinggi. Bahkan, China tengah mempertimbangkan membangun kapal induk yang bisa mengangkut pesawat tempur.

159 Pertukaran Mahasiswa Pereda Ketegangan Hubungan Cina dan Taiwan, http://www.kapanlagi.com/h/0000229742_print.html, 2008, paragraf 8, (diakses 23 maret 2011).
160 Taiwan Akan Pangkas Jumlah Tentara, *loc.cit.*, paragraf 5.

Sebaliknya, militer Taiwan justru kerap terjerat sistem yang sudah tua. Persenjataan pun tidak secanggih China karena tak ada yang mau menjual senjata ke Taiwan—kecuali Amerika Serikat—karena ‘takut’ terhadap China. Bahkan, Taiwan juga mulai mengurangi jumlah personel pasukan¹⁶¹. Lebih jauh lagi, isolasi diplomatik atas Taiwan yang terus disebar oleh China bisa menyebabkan Taiwan makin ‘terdesak’ dan pada akhirnya terpaksa menerima penyatuan kembali dengan China.

Perang antara China melawan Taiwan tidak akan terjadi karena beberapa alasan, di antaranya: China tidak ingin kehilangan ‘bebek bertelur emas’, yakni Taiwan dengan pencapaian kemajuan ekonominya. Taiwan juga cenderung tidak akan memerdekakan diri dari China, karena Amerika Serikat belum sepenuhnya mau membantu mereka, melihat kondisi China sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Selain itu, Amerika Serikat yang sering kecewa karena Taiwan menunda, dan bahkan membatalkan rencana pembelian berbagai paket senjata dari mereka juga, bisa mempengaruhi Amerika Serikat untuk segera merubah kebijakan ‘standar gandanya’.

161 Ancaman Militer China Meningkat, *loc.cit.*, paragraf 2-3.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Modernisasi militer China sudah dicanangkan sejak 1985 oleh Presiden mereka saat itu, Deng Xiaoping. Ada empat lingkup yang mengalami modernisasi, satu di antaranya yakni angkatan bersenjata, dalam hal ini Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) China. Sementara itu, kemajuan ekonomi yang dicapai oleh China telah menjadi kondisi obyektif yang kondusif dalam memberikan kontribusinya bagi peningkatan kapabilitas militer tersebut. Faktor lain yang ikut mendukung modernisasi militer di China adalah iklim politik domestik pasca-Deng Xiaoping dan tragedi Tiananmen pada 1989. Kondisi keamanan China memerlukan dukungan tentara terhadap kepemimpinan Presiden Jiang Zemin dan Perdana Menteri Zhu Rongji, yang diwujudkan melalui kebijaksanaan pembentukan militer yang profesional berupa peningkatan kesejahteraan dan kapabilitas persenjataan militer.

Situasi keamanan di kawasan Asia Timur akan semakin rentan konflik jika peningkatan kapabilitas militer China ini direspon dengan peningkatan kekuatan bersenjata dari negara-negara lainnya, sehingga menimbulkan terjadinya perlombaan senjata (*arms race*) di kawasan ini. Keadaan seperti ini akan semakin buruk pada saat persengketaan antarnegara di Asia Timur, bergulir menjadi suatu konflik bersenjata yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan.

Di antara pihak-pihak bersengketa di wilayah Asia Timur, 'perang saudara' antara China dengan Taiwan merupakan salah satu perselisihan yang memiliki potensi cukup besar untuk pecah menjadi perang. Konflik China melawan Taiwan ini muncul ketika terjadi perang saudara di China daratan antara Partai Nasionalis Kuomintang dan Partai Komunis. Perang yang berakhir di tahun 1949 ini dimenangkan oleh kubu komunis yang kemudian membuat Kuomintang tergesur dan lari ke Taiwan.

Di Taiwan, Kuomintang yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek kemudian mendirikan pemerintahan yang tetap diberi nama Republik China. Chiang Kai-

shek mendirikan pemerintahan ini dengan tujuan untuk tetap mempertahankan filosofis nasionalis, dan berusaha membangun kekuatan untuk pada akhirnya kembali merebut China daratan.

Seiring berjalannya waktu dan China terus meningkatkan kapabilitas militer mereka, pencapaian negara dengan populasi terbanyak di dunia tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan pertahanan Taiwan. Meski melahirkan kekhawatiran pada sejumlah negara di kawasan Asia Timur, peningkatan kapabilitas militer China 'kalah' pengaruhnya oleh faktor dalam negeri (domestik), terutama pemikiran para pemimpinnya, dalam perumusan, penetapan dan implementasi kebijakan pertahanan Taiwan.

Inisiatif lokal Taiwan juga yang menyebabkan sebuah ironi, karena Taiwan justru menurunkan kapabilitas militernya, pada saat China meningkatkannya. Kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan dan friksi di antara dua partai politik yang ada di Taiwan, menjadi penyebab utamanya.

China terus bertransformasi melalui peningkatan kapabilitas militernya dan merubah strateginya menjadi cenderung menyerang (*offensive*), sedangkan Taiwan cenderung tetap bertahan meski di bawah kepemimpinan Presiden Chen-Shui Bian yang notabene berasal dari Partai Demokratik Progresif Taiwan yang menentang China daratan. Jika dikaitkan dengan konsep dilema kemanan Robert Jervis, maka kondisi yang paling mungkin terjadi dalam hubungan lintas selat China dengan Taiwan, adalah kolom ke satu, yakni kemungkinan terjadinya konflik terbuka sangat besar sekaligus berbahaya, karena China dengan strateginya yang cenderung menyerang menghadapi Taiwan yang lebih dominan bertahan.

Tabel IV. 1 Konsep Dilema Keamanan Robert Jervis

	CENDERUNG MENGUNAKAN STRATEGI MENYERANG	CENDERUNG MENGUNAKAN STRATEGI BERTAHAN
	1	2
SIKAP BERTAHAN LEBIH DOMINAN DIBANDING SIKAP MENYERANG	Sangat berbahaya	Terjadi dilema keamanan, tetapi tuntutan keamanan menjadi pilhan tepat
	3	4
SIKAP MENYERANG LEBIH DOMINAN DIBANDING BERTAHAN	Tidak terjadi dilema keamanan, sangat memungkinkan terjadi penyerangan. Aktor status-quo mampu mengikuti perbedaan sikap lawan (menunggu stimulus). Waspada mutlak diperlukan.	Stabil bagi para aktor (dunia aman)

Sumber: Robert Jervis, *Cooperation Under The Security Dilemma*, dalam *World Politics*, 1978, Center of International Studies, (New York: Princeton University Press), hal. 400.

Oleh karena itu, ada beberapa saran atau rekomendasi penyusun untuk China dan Taiwan, mengacu kepada agar konflik yang ada tidak pecah menjadi perang.

Saran untuk China dan Taiwan, di antaranya:

- 1) Baik China ataupun Taiwan sebaiknya sama-sama berusaha untuk membangun kepercayaan, sekaligus bertukar informasi tentang kemampuan militer masing-masing, yang teknisnya bisa melalui langkah-langkah seperti:
 - a) Menyediakan jalur komunikasi langsung (*hotline*) atau sistem komunikasi lainnya sebagai pusat penanggulangan krisis (*crisis center*);
 - b) Meningkatkan transparansi tentang situasi militer di Selat Taiwan melalui dokumentasi kegiatan militer yang terjadi di wilayah tersebut, dan berdasarkan titik acuan data yang konsisten;
 - c) Menerbitkan peraturan yang disepakati China dan Taiwan yang tentang zona pemisahan militer di Selat Taiwan;

- d) Menggelar pertemuan-pertemuan yang bisa memperbaiki sejarah China-Taiwan, seperti pertemuan tentara yang sudah pensiun, dan
 - e) Meningkatkan transparansi tentang situasi keamanan yang komprehensif di Selat Taiwan dengan menerbitkan perkembangan kekuatan keamanan masing-masing pihak di wilayah tersebut secara berkala, misal satu tahun sekali.
- 2) Membatasi kecenderungan untuk menciptakan tindakan atau aksi yang berlebihan (sensasional), terlebih yang berkaitan dengan keamanan karena bisa menjadi dasar penilaian sikap politik.

Sementara saran khusus untuk China di antaranya:

- 1) Mengurangi atau bahkan menghindari aksi yang mengindikasikan penyebaran rudal di sekitar Selat Fujian. Agar tidak menciptakan ketegangan, saran paling baik adalah melucuti rudal-rudal tersebut..
- 2) Membatasi latihan militer di Selat Taiwan.
- 3) Menanggapi aksi demiliterisasi Taiwan di sejumlah pulau kecil di sekitar Selat Taiwan atau dengan kata lain menyesuaikan dengan kapabilitas militer Taiwan.
- 4) Transparansi secara mendasar di seluruh tingkat pemangku kebijakan pertahanan, khususnya yang terkait keamanan di Selat Taiwan.

Di samping saran untuk China, Taiwan juga penyusun kira perlu melakukan sejumlah evaluasi demi keamanan lintas selat, di antaranya:

- 1) Terus menggali dan meningkatkan dukungan publik untuk demiliterisasi di pulau-pulau di sekitar Selat Taiwan;
- 2) Meski lebih dikarenakan kemampuan ekonomi dan inisiatif para pemimpinnya, Taiwan perlu untuk terus berusaha menahan diri dalam menganggarkan sekaligus mengeluarkan biaya pertahanan. Tujuannya, menciptakan keamanan dan menciptakan hubungan antarselat yang harmonis.

- 3) Menurunkan kedekatan hubungan pertahanan dan keamanannya dengan Amerika Serikat, jika China melakukan penyesuaian proyeksi anggaran pertahanannya karena China sensitif dengan kehadiran Amerika Serikat di Asia Timur.



DAFTAR REFERENSI

- Boyne, Walter J. (ed.), 2002, *Air Warfare: An International Encyclopaedia*, ABC-CLIO.
- Chandrawati, Nurani, 2009, *Modul Pengkajian Strategis*, FISIP Universitas Indonesia, Jakarta.
- Cheek, Timothy, 2002, *Mao Zedong and China's Revolutions*, Bedford/ St. Martin's, New York.
- Chow (ed.), Peter C.Y., 2008, *The One China Dilemma*, Palgrave Macmillan, New York.
- Cole, Bernard D., 2006, *Taiwan's Security: History and Prospects*, Routledge, New York.
- Cooney, Kevin J. Cooney and Yoichiro Sato (eds.), 2009, *The Rise Of China and International Security*, Routledge, New York.
- Dougherty, James E., dan Robert L. Pfaltzgraff, Jr., *Teori-Teori Hubungan Internasional*, terjemahan M. Amien Rais, Harwanto Dahlan, dan Tulus Warsito, 1995, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Edmonds, Martin and Michael M. Tsai (eds.), 2006, *Taiwan's Defense Reform*, Routledge, New York.
- Faisal, Sanapiah, 2003, *Format-Format Penelitian Sosial*, Cetakan Keenam, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Fisher Jr., Richard D., 2008, *China's Military Modernization: Building For Regional And Global Reach*, Praeger Security International, Connecticut.
- Goldstein, Avery, 2005, *Rising to the Challenge: China's Grand Strategy and International Security*, Stanford University Press.
- Howarth, Peter, 2006, *China's Rising Sea Power: The PLA Navy's Submarine Challenge*, Routledge, New York.
- Huntington, Samuel P., 1961, *The Common Defense: Strategic Programs in National Politics*, Columbia University Press, New York.
- Jervis, Robert, 1978, Cooperation Under The Security Dilemma, dalam *World Politics*, Center of International Studies, Princeton University Press, New York.
- Kegley, Charles W. (ed.), 1995, *Controversies in International Relations Theory: Realism and the Neoliberal Challenges*, Saint Martin's Press, New York.
- , dan Eugene R. Wittkopf, 2003, *World Politics: Trends and Transformation*, Wadsworth, Belmont.
- Lary, Diana, 2007, *China's Republic*, Cambridge University Press, New York.
- Lilley, James R. dan David Shambaugh (eds.), 1999, *China's Military Faces the Future*, M.E. Sharpe.

- Mosher, Steven W., 2000, *Hegemon: China's Plan to Dominate Asia and the World*, Encounter Books.
- Mulvenon, James dan David Finkelstein (eds.), 2005, *China's Revolution in Doctrinal Affairs: Emerging Trends In the Operational Art of the People's Liberation Army*, Center for Naval Analysis and RAND Co., Alexandria, VA.
- Newman, W. Lawrence, 2003, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, fifth edition, Pearson Education, Inc., Boston.
- Papp, Daniel S., 1997, *Contemporary International Relations*, Boston: Allyn & Bacon.
- Pillsbury, Michael, 2000, *China Debates the Future Security Environment*, National Defense University Press, Washington D.C, www.fas.org/nuke/guide/china/doctrine/pills2/, (diakses pada 26 Februari 2011).
- Security Studies, International Institute of, 2000, *The Military Balance 2000*, Nanyang Technological University, Singapore.
- , 2006, *The Military Balance 2006*, Nanyang Technological University, Singapore.
- , 2007, *The Military Balance 2007*, Nanyang Technological University, Singapore.
- , 2008, *The Military Balance 2008*, Nanyang Technological University, Singapore.
- , 2009, *The Military Balance 2009*, Nanyang Technological University, Singapore.
- , 2010, *The Military Balance 2010*, Nanyang Technological University, Singapore.
- Swaine, Michael D., 2009, *Taiwan: Defense and Foreign Policy Making*, National Defense Research Institute, Washington DC.
- Viotti, Paul R., dan Mark V. Kauppi, 1999, *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism and Beyond*, Allyn & Bacon, Boston.
- Wanchao, Guo, 2004, *Zhongguo Jueqi (Rise of China)*, Jiangxi Renmin Chubanshe, Nanchang.

Artikel lainnya:

- Ancaman Militer China Meningkat, 2 September 2009, <<http://internasional.kompas.com/read/2009/09/02/05554688/ancaman.militer.china.meningkat>>, (diakses pada 23 Maret 2011).
- China Perkuat Kekuatan Militer, edisi Rabu, 20 Agustus 2010, <<http://international.okezone.com/read/2010/08/18/18/363978/china-perkuat-kekuatan-militer>>, (diakses pada 26 Maret 2011).
- A. Dahana, Taiwan Beban Berat Hu, Ma, Obama, <<http://m.inilah.com/read/detail/62655/taiwan-beban-berat-hu-ma-obama>>., paragraf 8, (diakses pada 26-02-11).
- Erickson, Andrew S., 2008, PLA Navy Modernization: Preparing for 'informatized' War at Sea, dalam jurnal *China Brief*, Volume 8, edisi 29 Februari 2008, <http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/Itx_news>.
- Foot, Rosemary, 2006, Chinese Strategies in a US Hegemonic Global, Order: Accommodating And Hedging, dalam Jurnal *International Affairs* volume 82.
- Global Future Institute, Tim Riset, 2010, Data Kekuatan Militer China, <<http://id.shvoong.com/law-and-politics/politics/1947209-kekuatan-militer-cina/>>, (diakses pada 24 Maret 2011).
- Goldstein, Avery, 1997, Great Expectations: Interpreting China's Arrival, dalam Jurnal *International Security*, Volume 22, Nomor 3.
- Hadianto, Catur, 2009, Proses Pengambilan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap RRC Pada Krisis Selat Taiwan Tahun 1995/1996 dan 1999/2000, abstraksi tesis di Universitas Indonesia, Jakarta, <<http://www.lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=92079&lokasi=lokal>>, (diakses pada 4 Maret 2011).
- Indonesia Tetap Berpegang Pada Kebijakan 'Satu Cina', 20 September 2007, <<http://www.antara.co.id/print/1190263963>> (diakses pada 24 Februari 2011).
- Kalahkan Jepang, Ekonomi China Kini Terbesar Kedua di Dunia, edisi 14 Februari 2011, <<http://www.detikfinance.com/read/2011/02/14/103031/1570639/4/kalahkan-jepang-ekonomi-china-kini-terbesar-kedua-di-dunia?992204topnews>>, (diakses pada 24 Februari 2011).
- Kan, Shirley A., 2009, Taiwan: Major U.S. Arms Sales Since 1990, Report for Congress, <http://fpc.state.gov/documents/organization/16159.pdf>., (diakses pada 9 Mei 2011).
- Manafe, Aco, 2003, Konflik Selat Taiwan: Politik Satu China Paradigma Perang Dingin, Harian Umum *Suara Merdeka*, edisi Minggu, 14 Desember 2003.
- Pertumbuhan Ekonomi China Dilaporkan 10,1%, 2011, dalam *Market Watch*, <<http://www.pacific2000.co.id/research/berita-hong-kong/report->

- pertumbuhan-ekonomi-china-dilaporkan-101.php.>, (diakses pada 24 Februari 2011).
- Muhamad, Simela Victor, 2009, Pengembangan Kekuatan Militer China Dan Dampaknya Terhadap Kawasan Asia Timur, dalam Jurnal *Kajian*, volume 14 nomor 3.
- Nemets, Alexander dan Thomas Torda, 2002, PLA Navy: From ‘Green Water’ to ‘Blue Water’, <<http://archive.newsmax.com/archives/articles/2002/7/25/16133.shtml>>, (diakses pada 15 Februari 2011).
- Nurdin, Angga, 2010, Taiwan Dilema Di Antara Dua Super Power, dalam Jurnal *Multiversa* Volume 02 Nomor 01, Institute of International Studies (IIS) Jurusan Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Pentagon Report: China’s Military Expanding Its Capabilities, 2009, dalam *cnn.com/asia*, edisi 26 Maret, <<http://www.cnn.com/2009/WORLD/asiapcf/03/25/china.military.report/>>, (diakses pada 23 November 2010).
- Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi China Capai 10,6%, <<http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/03/06/213/89403/rata-rata-pertumbuhan-ekonomi-china-capai-10-6>>, (diakses pada 17 Februari 2011).
- Ross, Robert S., 2000, The 1995–96 Taiwan Strait Confrontation: Coercion, Credibility, and the Use of Force, dalam Jurnal *International Security*, edisi ke-25, volume (2).
- Scobell, Andrew, 2000, China’s Use of Military Force, dalam Jurnal *International Security*, edisi ke-25, volume (2).
- Republic of China Navy, <<http://www.globalsecurity.org/military/world/taiwan/navy.htm>>, (diakses 21 April 2011).
- Shanker, Thom, 2009, U.S. Sees Chinese Military Rise, dalam Jurnal *International Herald Tribune*, edisi 26 Maret 2009.
- Sucitra, Udayana, 2011, Konflik China Taiwan, <<http://luar-negeri.kompasiana.com/2011/01/15/konflik-china-taiwan/>>, (diakses pada 24 Maret 2011).
- Taiwan Defence Budget, 2011, <<http://www.globalfirepower.com/defense-spending-budget.asp>>, (diakses 29 Maret 2011).
- Taiwan Flexes It’s Military Might at National Day Parade, 2007, <http://www.chinapost.com/tw/news/2007/10/11/126124/Taiwan-flexes.htm>., (diakses 29 Maret 2011).
- Trabanco, Jose Miguel Alonso, 2009, The Great Dragon Awakens: China Challenges American Hegemony, dalam Jurnal *Centre for Research on Globalization*, edisi 2 Februari 2009, <http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=11638>., (diakses pada 21 November 2010).